

KAJIAN EKONOMI

REGIONAL

TRIWULAN III

2009

VISI BANK INDONESIA :

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

MISI BANK INDONESIA :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan”

KATA PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan III - 2009 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB dan Keuangan Daerah), Inflasi, Moneter dan Perbankan, Sistem Pembayaran, Kependudukan dan Kesejahteraan serta Perkiraan Perkembangan Ekonomi Daerah pada triwulan III-2009. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau, serta data dari instansi/lembaga terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran, dukungan penyediaan data dan informasi sangat diharapkan.

Pekanbaru, 3 November 2009

BANK INDONESIA

PEKANBARU

ttd

Wiyoto
Pemimpin

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR	ISI
--------	-----

	HALAMAN
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xii
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih.....	xvi
 RINGKASAN EKSEKUTIF	 1
 BAB 1. KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	 8
I Pertumbuhan PDRB.....	8
1. Kondisi Umum.....	8
2. PDRB Sisi Permintaan.....	10
2.1. Konsumsi	12
2.2. Investasi	13
2.3. Ekspor dan Impor.....	14
2.3.1. Migas	14
2.3.2. Non Migas	15
2.3.2.1. Struktur	15
2.3.2.2. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor-Impor Non Migas	 17
3. PDRB Sisi Penawaran.....	20
3.1. Sektor Pertanian.....	22
3.2. Pertambangan dan Penggalan.....	23
3.3. Industri Pengolahan.....	25
3.4. Listrik dan Air Bersih.....	27

3.5.	Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	28
3.6.	Pengangkutan dan Komunikasi.....	28
3.7.	Keuangan, Persewaan bangunan & Jasa Keuangan.....	29
3.8.	Jasa-jasa.....	31
BOKS 1.	UPAYA REVITALISASI PERKEBUNAN : KONDISI TERKINI DAN TANTANGAN KEDEPAN	
BAB 2.	PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	32
1.	Kondisi Umum.....	32
2.	Perkembangan Indeks Harga Konsumen.....	33
2.1.	Inflasi Kota Pekanbaru.....	35
2.2.	Inflasi Kota Dumai.....	44
BAB 3.	PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH.....	50
1.	Kondisi Umum.....	50
2.	Perkembangan Moneter	51
3.	Perkembangan Perbankan	52
3.1.	Bank Umum	53
3.1.1.	Jaringan Kantor.....	53
3.1.2.	Perkembangan Aset	54
3.1.3.	Kredit	50
3.1.2.1.	Perkembangan Penyaluran Kredit.....	55
3.1.2.2.	Konsentrasi Kredit	56
3.1.2.3.	<i>Undisbursed Loan</i> dan Persetujuan Kredit Baru.....	60
3.1.2.4.	Kualitas Kredit	62
3.1.3.	Intermediasi Perbankan	64
3.1.3.1.	Perkembangan LDR	64
3.1.3.2.	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM.....	65
3.1.4.	Kondisi Likuiditas	68
3.1.4.1.	Perkembangan dan Struktur Dana	

	Pihak Ketiga (DPK).....	68
	3.1.4.2. Rasio Alat Liquid	71
	3.1.5. Profitabilitas	73
	3.1.5.1. Spread Bunga	73
	3.1.5.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	74
	3.1.5.3. Perkembangan Laba Rugi	76
	3.1.6. Bank Syariah	77
	3.3. Bank Perkreditan Rakyat.....	79
BAB 4	KONDISI KEUANGAN DAERAH.....	81
	1. Kondisi Umum	81
	2. APBD-P Provinsi Riau Tahun 2009.....	82
	3. Realisasi Belanja.....	83
	4. Realisasi Belanja Tidak Langsung	80
	5. Realisasi Belanja Langsung.....	85
BAB 5	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	88
	1. Kondisi Umum	88
	2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	89
	2.1. Aliran uang masuk dan keluar (<i>inflow – outflow</i>).....	89
	2.2. Penyediaan uang kartal layak edar	90
	2.3. Uang Palsu	92
	3. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai	93
	3.1. Kliring	93

BAB 6	KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN DAERAH	95
	1. Kondisi Umum	95
	2. Ketenagakerjaan	96
	3. Nilai Tukar Petani.....	97
.		
BAB 7	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	101
	1. Pertumbuhan Ekonomi	101
	2. Inflasi	104
	3. Perbankan	106
	Daftar Istilah	108

DAFTAR	TABEL
--------	-------

HALAMAN

Tabel 1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Menurut Penggunaan Tahun 2008-2009 (%).....	10
Tabel 1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Menurut Penggunaan Tahun 2008-2009 (%)..	11
Tabel 1.3.	Perkembangan Ekspor Non Migas	15
Tabel 1.4.	Perkembangan Nilai Rata-Rata Komoditi Ekspor Non Migas Utama Triwulan III-2008-Triwulan III-2009.....	16
Tabel 1.5.	Perkembangan Nilai Rata-Rata Komoditi Ekspor Non Migas Utama Triwulan III-2008-Triwulan III-2009.....	17
Tabel 1.6	Wilayah Tujuan Tiga Komoditas Ekspor Non Migas Utama Triwulan III-2009 (dalam USD ribu).....	18
Tabel 1.7	Negara tujuan Ekspor Non Migas Utama (dalam USD ribu).....	19
Tabel 1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Provinsi Riau Menurut Sektor Tahun 2008-2009.....	21
Tabel 1.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Provinsi Riau Menurut Sektor Tahun 2008-2009.....	21
Tabel 2.1	Perbandingan IHK dan Inflasi Bulan September 2009 di Kota-Kota Wilayah Sumatera.....	34
Tabel 2.2.	Sepuluh Komoditas yang Memberikan Sumbangan Tertinggi Dalam Pembentukan Inflasi Kota Pekanbaru.....	38
Tabel 2.3	Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Pekanbaru Triwulan III-2009	39
Tabel 2.4	Realisasi Penyaluran Raskin di Kab./Kota Provinsi Riau.....	40
Tabel 2.5	Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Inflasi dan Deflasi pada Triwulan III-2009 di Kota Pekanbaru	44
Tabel 2.6	Perkembangan Inflasi Kota Dumai	47

Tabel 2.7	Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Perubahan Harga Tertinggi dan Terendah Selama Triwulan III-2009.....	49
Tabel 3.1.	Perkembangan Jaringan Kantor Bank di Provinsi Riau.....	53
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau (Juni 2009).....	54
Tabel 3.3.	Posisi Kredit Di Provinsi Riau (juta rupiah).....	55
Tabel 3.4.	Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah).....	59
Tabel 3.5.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)	60
Tabel 3.6.	Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau.....	62
Tabel 3.7.	Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah)	59
Tabel 3.8.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	64
Tabel 3.9.	Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (juta rupiah).....	66
Tabel 3.10.	Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan	66
Tabel 3.11.	Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah)	67
Tabel 3.12.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau.....	67
Tabel 3.13.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	68
Tabel 3.14.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp).....	69
Tabel 3.15.	Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah).....	70
Tabel 3.16.	Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten di Provinsi Riau.....	70
Tabel 3.17.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau....	71
Tabel 3.18.	Perkembangan Alat Likuid dan <i>Non Core Deposit</i>	72
Tabel 3.19.	Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta).....	78
Tabel 3.20.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Provinsi Riau (juta rupiah).....	79
Tabel 4.1.	APBD Provinsi Riau Tahun 2009.....	82
Tabel 4.2.	Nilai Transaksi Belanja SKPD Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp Juta).....	79
Tabel 4.3	Nilai Transaksi Komponen Belanja Tidak Langsung SKPD Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp Juta).....	85

Tabel 4.4.	Nilai Transaksi Komponen Belanja Tidak Langsung SKPD Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp Juta).....	86
Tabel 6.1.	Perkembangan Jumlah PHK yang Dilaporkan Kepada Pemerintah Provinsi/Daerah Tingkat II Provinsi Riau Tahun 2006-2009.....	96
Tabel 6.2.	Perkembangan Jumlah Perusahaan yang Melakukan PHK yang Melapor Kepada Pemerintah Provinsi/Daerah Tingkat II Provinsi Riau Tahun 2006-2009.....	97
Tabel 6.3.	Perkembangan Beberapa Harga Rata-Rata Komoditas Internasional Tahun 2008-2009.....	98
Tabel 6.4.	Perkembangan Komponen Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	99

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DAFTAR GRAFIK

	HALAMAN
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Tahun 2008-2009.....	9
Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Tahun 2008-2009.....	9
Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Triwulan I-2006-Triwulan III-2009.....	12
Grafik 1.4. Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Riau Triwulan I-2008-Triwulan III-2009.....	14
Grafik 1.5. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor CPO Riau Tahun 2008-2009.....	17
Grafik 1.6. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor Kertas Olahan Riau Tahun 2008-2009.....	17
Grafik 1.7. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor Kertas Olahan Riau Tahun 2008-2009.....	18
Grafik 1.8. Pertumbuhan (y-o-y) Sub Sektor Pertanian 2008-2009.....	22
Grafik 1.9. Pertumbuhan (q-t-q) Sub Sektor Pertanian 2008-2009.....	22
Grafik 1.10. Perkembangan <i>Lifting</i> Gas Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	23
Grafik 1.11. Perkembangan <i>Gross Revenue</i> dan Harga Gas Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	23
Grafik 1.12. Perkembangan <i>Lifting</i> Minyak Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	24
Grafik 1.13. Perkembangan <i>Gross Revenue</i> dan Harga Minyak Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	24
Grafik 1.14. Perkembangan Produksi Batu Bara Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	25
Grafik 1.15. Perkembangan Harga Batu Bara Dunia dan Rata-rata Volume Ekspor Batu Bara Provinsi Riau 2008-2009.....	25

Grafik 1.16.	Perkembangan Volume Ekspor dan Harga CPO dunia Tahun 2008-2009....	26
Grafik 1.17.	Perkembangan Volume Ekspor dan Harga Karet Dunia Tahun 2008-2009..	26
Grafik 1.18.	Perkembangan Produksi dan Konsumsi Listrik di Provinsi Riau (dalam ribu Kwh).....	27
Grafik 1.19.	Tingkat Hunian Hotel di Riau	28
Grafik 1.20.	Rasio Keberangkatan-Kedatangan Pesawat dan Penumpang di Bandara SSK II.....	29
Grafik 1.21.	Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan di Provinsi Riau	30
Grafik 1.22.	Pertumbuhan Tahunan (Y-o-Y) Sub Sektor Keuangan 2008-2009.....	30
Grafik 1.23.	Pertumbuhan (Y-o-Y) Sub Sektor Jasa Swasta 2008-2009.....	31
Grafik 1.24.	Pertumbuhan (Q-t-Q) Sub Sektor Jasa Swasta 2008-2009.....	31
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Pekanbaru, Dumai dan Nasional (mtm).....	35
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru.....	36
Grafik 2.3.	Perkembangan Indeks dan Sub Kelompok Bumbu-bumbuan.....	38
Grafik 2.4.	Inflasi kelompok Barang dan Jasa Tw II-2009.....	42
Grafik 2.5.	Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru Secara Triwulanan.....	42
Grafik 2.6.	Perkembangan Indeks Kelompok Barang dan Jasa Secara Triwulanan.....	44
Grafik 2.7.	Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga.....	43
Grafik 2.8.	Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Dumai.....	41
Grafik 2.9.	Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru dan Dumai (Y-o-Y).....	45
Grafik 3.1.	Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau (triliun rupiah)....	52
Grafik 3.2.	Perkembangan Aset Perbankan di Provinsi Riau (triliun rupiah).....	54
Grafik 3.3.	Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau.....	57
Grafik 3.4.	Posisi dan Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau (y-o-y).....	58
Grafik 3.5.	Jumlah <i>Undisbursed Loan</i> Perbankan Provinsi Riau (triliun rupiah).....	60
Grafik 3.6.	Ratio <i>Undisbursed Loan</i> Terhadap Total Kredit.....	61

Grafik 3.7.	Perkembangan NPLs <i>Gross</i> di Provinsi Riau.....	63
Grafik 3.8.	Perkembangan LDR Di Provinsi Riau.....	65
Grafik 3.9.	Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i>	73
Grafik 3.10.	Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito.....	74
Grafik 3.11.	Komposisi Pendapatan Bunga	75
Grafik 3.12.	Komposisi Beban Bunga.....	76
Grafik 3.13.	Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan).....	77
Grafik 4.1.	Pertumbuhan (y-o-y, %) Komponen Pendapatan Pajak Penghasilan (PPH) Non Migas Pada Triwulan II-2009.....	80
Grafik 5.1.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	90
Grafik 5.2.	Perkembangan PTTB di Bank Indonesia Pekanbaru	91
Grafik 5.3.	Perkembangan Peredaran Uang Palsu di Riau.....	92
Grafik 5.4.	Perkembangan Transaksi Kliring di Riau.....	93
Grafik 5.5.	Perkembangan Penolakan Cek/BG di Riau.....	94
Grafik 6.1.	Perkembangan NTP Sub Sektor di Provinsi Riau Tahun 2008-2009.....	100
Grafik 7.1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Riau.....	102
Grafik 7.2.	Indeks Rencana Konsumsi Konsumen.....	103
Grafik 7.3.	Indeks Ekspektasi Konsumen.....	104
Grafik 7.4.	Proyeksi Inflasi Tahunan (Y-o-Y) dan Triwulanan (Q-t-Q) Kota Pekanbaru ..	105
Grafik 7.5.	Indeks Ekspektasi Harga dan Laju Inflasi Aktual (%).....	106
Grafik 7.6.	Ekspektasi Konsumen Terhadap Tabungan.....	107

TABEL INDIKATOR

EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2008		2009		
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
MAKRO					
Indek Harga Konsumen :	112,23	112,85	113,39	112,78	114,70
Laju Inflasi Tahunan (yoy%) :	11,34%	9,02%	6,99%	3,68%	2,02%
PDRB - harga konstan (miliar Rp)					
- Pertanian	3.987,40	3.887,95	3.869,00	3.987,84	4.077,03
- Pertambangan & Penggalian	11.940,96	11.803,92	11.540,81	11.981,51	11.946,51
- Industri Pengolahan	2.529,20	2.610,92	2.502,43	2.534,87	2.620,35
- Listrik, gas dan Air Bersih	50,47	50,85	50,65	50,81	50,00
- Bangunan	756,12	794,05	760,79	786,37	818,77
- Perdagangan, Hotel, dan restoran	1.924,45	1.896,82	1.961,39	2.016,44	2.104,76
- Pengangkutan dan Komunikasi	653,46	679,62	675,03	682,51	696,67
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	295,27	312,89	301,98	304,75	319,53
- Jasa	1.123,03	1.154,16	1.142,69	1.150,34	1.208,78
Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)	6,78%	5,37%	4,42%	3,07%	2,50%
Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)	8,54%	7,38%	6,55%	6,43%	5,52%

B. PERBANKAN

INDIKATOR	2008		2009		
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
PERBANKAN					
Bank Umum :					
Total Aset (Rp Triliun)	37,86	37,71	37,90	41,58	39,68
DPK (Rp Triliun)	32,04	31,89	31,82	33,71	31,63
- Giro (Rp Triliun)	11,46	10,39	9,98	10,93	8,79
- Tabungan (Rp Triliun)	12,69	13,26	12,57	13,17	13,66
- Deposito (Rp Triliun)	7,89	8,25	9,27	9,62	9,16
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	29,84	32,01	31,71	30,93	33,99
LDR	93,13%	100,36%	99,65%	91,77%	107,46%
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab.	20,06	20,35	20,73	22,26	23,15
- Modal Kerja	7,40	7,05	7,32	7,89	8,45
- Investasi	5,71	6,19	5,84	6,21	6,42
- Konsumsi	6,95	7,10	7,54	8,16	8,28
- LDR	62,59%	63,80%	65,17%	66,03%	73,20%
Kredit UMKM (triliun Rp)					
- Kredit Modal Kerja	5,07	5,12	5,17	5,68	6,07
- Kredit Investasi	2,67	2,60	2,59	2,77	3,02
- Kredit Konsumsi	6,94	7,08	7,52	8,14	8,27
Total kredit UMKM (triliun Rp)	14,67	14,81	15,29	16,59	17,36
NPL MKM (%)	2,21%	1,93%	2,68%	2,51%	2,61%
BPR					
Total Aset (Rp miliar)	492,36	515,38	542,76	559,13	594,37
DPK (Rp Miliar)	353,04	366,16	382,02	390,02	438,41
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	331,94	335,12	353,33	375,33	382,77
Kredit UMKM (Triliun Rp)	331,94	335,12	353,33	375,33	382,77
Rasio NPL (%)	5,91	5,53	7,75	7,25	8,86
LDR	94,02	91,52%	92,49%	96,23%	87,31%

*) SBH 2007

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. GAMBARAN UMUM

Kondisi perekonomian global yang mulai membaik memberikan pengaruh positif

- Pada triwulan III-2009, adanya fase pemulihan pada perekonomian global telah memberikan indikasi penting terhadap peningkatan kinerja perekonomian non migas Riau secara triwulanan. Meskipun demikian, secara tahunan laju pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan perlambatan.

Penyaluran kredit meningkat sedangkan penghimpunan dana menurun

- Di sektor perbankan, tingkat suku bunga mulai bergerak turun mengikuti BI-Rate. Penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 4,02%, sedangkan dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 6,17% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

II. ASESMEN MAKROEKONOMI REGIONAL

Perekonomian pada triwulan III-2009 mengalami perlambatan, namun pertumbuhan tanpa unsur migas secara triwulanan (q-t-q) mulai menunjukkan kenaikan

- Kinerja perekonomian dalam triwulan III-2009 masih menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dengan migas melambat dari 3,07% (y-o-y) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,5% (y-o-y) dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas melambat dari 6,43% (y-o-y) menjadi 5,52% (y-o-y). Meskipun demikian, pertumbuhan triwulanan tanpa migas diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 2,21% (q-t-q) pada triwulan II-2009 menjadi 3,58% (q-t-q) pada triwulan III-2009. Fenomena kondisi perekonomian global yang mulai memasuki fase pemulihan (*recovery*) telah memberikan indikasi penting terhadap peningkatan permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet sehingga turut serta mendorong pertumbuhan sektor industri non migas.

PMTB Migas mencatat pertumbuhan tertinggi secara tahunan

- PMTB migas mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 19,48% (y-o-y), namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 20,66% (y-o-y). Hal ini diperkirakan terkait dengan adanya investasi di bidang migas terkait dengan penemuan dengan penemuan ladang minyak baru di Blok Sago Lirik, Kab. Indragiri Hulu. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 7,85%. Komponen ekspor masih mengalami penurunan sebesar 5,2% (y-o-y) yang terutama berasal dari ekspor migas, sementara ekspor non migas Riau mengalami perlambatan sebesar 1,05% (y-o-y) setelah mengalami penurunan pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan ekspor non migas secara triwulanan sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 0,07% (q-t-q) namun masih cukup tinggi dikarenakan pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 12,6% (q-t-q).

Dari sisi sektoral, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor pertambangan tanpa migas (y-o-y) dan sektor jasa (q-t-q)

- Dari sisi penawaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas sebesar 11,71% (y-o-y), diikuti oleh perdagangan hotel dan restoran sebesar 9,37% (y-o-y). Sedangkan pertumbuhan triwulanan tertinggi terjadi pada sektor jasa yang mencapai 5,08% (q-t-q) diikuti oleh industri non migas yang tercatat sebesar 4,87% (q-t-q). Membaiknya kondisi ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama

dan adanya hari besar keagamaan Idul Fitri serta musim liburan sekolah menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan pada kedua sektor tersebut.

Neraca perdagangan non migas secara triwulanan mulai menunjukkan adanya kenaikan yang cukup tinggi

- Secara umum, nilai kumulatif net ekspor non migas sampai dengan Agustus menunjukkan penurunan sebesar USD1.051,84 juta. Namun secara triwulanan, nilai dan volume rata-rata ekspor non migas pada triwulan III-2009 tercatat mengalami kenaikan masing-masing sebesar USD91,3 juta dan USD184,39 ribu ton. Hal ini menunjukkan hal yang cukup menggembirakan terutama pada volume ekspor triwulan III-2009 yang mencatat kenaikan setelah pada dua triwulan sebelumnya mengalami penurunan.

III. ASESMEN INFLASI

Terjadinya inflasi disebabkan oleh faktor musiman berupa hari raya idul fitri dan tahun ajaran baru

Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 3,52% (q-t-q)

- Pada triwulan laporan, Kota Pekanbaru tercatat mengalami inflasi sebesar 1,74% (q-t-q), dan inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,2%. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor musiman berupa hari besar keagamaan Idul Fitri dan musim liburan sekolah memasuki tahun ajaran baru.
- Sementara itu, Kota Dumai juga mengalami inflasi sebesar 3,52% (q-t-q), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,77%. Inflasi Kota Dumai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Kota Pekanbaru, karena barang-barang di Kota Dumai umumnya berasal dari Kota Pekanbaru, sehingga terjadi peningkatan harga (biaya transportasi) di Kota Dumai.

IV. ASSES MEN KEUANGAN

Perbankan Riau

Penghimpunan
Dana menurun

- Pertumbuhan kredit yang diikuti oleh penurunan dana telah menyebabkan meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan selama triwulan laporan dari 66,03% pada triwulan II-2009 menjadi 73,20% pada triwulan III-2009, sedangkan dari sisi jaringan kantor selama triwulan laporan terdapat penambahan jaringan kantor sebanyak 21 kantor.

Sebagian besar
kredit
disalurkan
kepada sub
sektor
perdagangan
eceran

- Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan yang mencapai 23,66% dari total kredit atau sebesar Rp5,48 triliun mengalami peningkatan 4,84% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp3,62 triliun (66,13%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Riau dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perdagangan pada tahun 2020 yang akan datang.

Pertumbuhan
kredit
konsumsi
cenderung
melambat

- Secara triwulanan pertumbuhan kredit konsumsi ini cenderung mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,09%. Perlambatan kredit konsumsi ini diperkirakan karena masih tingginya suku bunga kredit, sehingga untuk konsumsinya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan tambahan penghasilan yang berasal dari THR maupun lainnya

Penurunan
DPK
dipengaruhi
oleh
penurunan
dana milik
Pemda serta
pemerintah
pusat

- Posisi dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan sebesar Rp31,63 triliun, menurun Rp2,08 triliun (6,17%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kepemilikan, penurunan dana didominasi oleh penurunan dana milik Pemda (25,37%), dana milik Pemerintah Pusat (44,53%), dan dana milik BUMN (40,94%). Sementara itu, dana milik perusahaan swasta, yayasan/badan sosial, dan perusahaan asuransi masing-masing meningkat sebesar 11,04%, 5,83%, dan 3,59%

LDR mencapai 73,20%, sedangkan NPLs mencapai 2,76%

- *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 66,03% menjadi 73,20%. Sementara itu, *Non Performing Loans* (NPLs) sedikit mengalami perbaikan kualitas dari 2,71% menjadi 2,8%.

Profit perbankan mengalami peningkatan

- Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih mengalami peningkatan, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan suku bunga dana yang lebih besar dari suku bunga kredit belum dapat meningkatkan penerimaan laba bagi perbankan sehingga laba triwulan laporan masih lebih rendah dari penerimaan laba pada triwulan sebelumnya.

V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan akan mengalami peningkatan

- Pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan IV-2009 diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2009 namun masih akan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan III-2009 antara pemulihan ekonomi global, peningkatan produksi industri non migas serta hari raya natal

- Adanya fase pemulihan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan komoditas ekspor non migas yang memberikan pengaruh besar seperti *Crude Palm Oil* dan karetaupaya peningkatan produktivitas di sektor perkebunan yang tercermin dari adanya persetujuan investasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru diindikasikan akan mendorong pertumbuhan sub sektor industri pengolahan non migas. Adanya hari besar keagamaan Natal yang jatuh pada bulan Desember diindikasikan juga akan mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat..

Sektor listrik akan mulai mengalami perbaikan dalam triwulan IV-2009

- Kondisi kelistrikan Provinsi Riau akan mengalami perbaikan seiring dengan mulai adanya relokasi PLTD 8 MW sehingga meningkatkan rasio elektrifikasi dan mendukung iklim usaha di Provinsi Riau.

Laju Inflasi pada triwulan IV-2009 akan lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2009

- Laju inflasi pada triwulan IV-2009 (q-t-q) diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2009. Indikator utama yang mendukung perkiraan tersebut adalah perayaan hari besar keagamaan Natal, penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran dan kecenderungan pemulihan ekonomi global yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di Riau khususnya Pekanbaru terutama terhadap kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang dan perumahan.

Kredit diperkirakan akan mengalami peningkatan sementara DPK akan melambat

- Dari sisi perbankan, penghimpunan pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III-2009, sebagai dampak dari *trend* penurunan BI-Rate. Sementara itu, penyaluran kredit diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan mulai membaiknya kegiatan dunia usaha .

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab 1

KONDISI EKONOMI

MAKRO REGIONAL

I. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

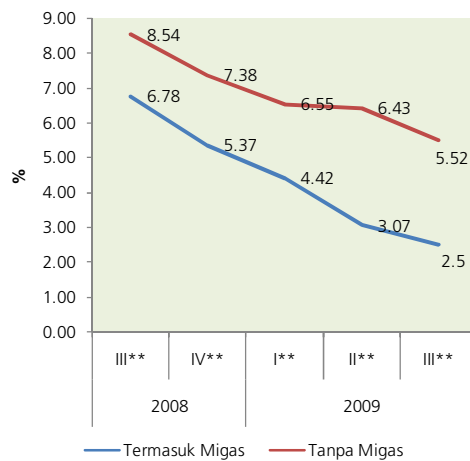
1. Kondisi Umum

Kinerja perekonomian Provinsi Riau dalam triwulan III-2009 yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), secara umum masih menunjukkan tren perlambatan sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1 dan Grafik 1.2. Dengan memasukkan komponen migas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara *year-on-year* (y-o-y) dan *quarter-to-quarter* (q-t-q) diperkirakan mencapai 2,5% (y-o-y) dan 1,48% (q-t-q).

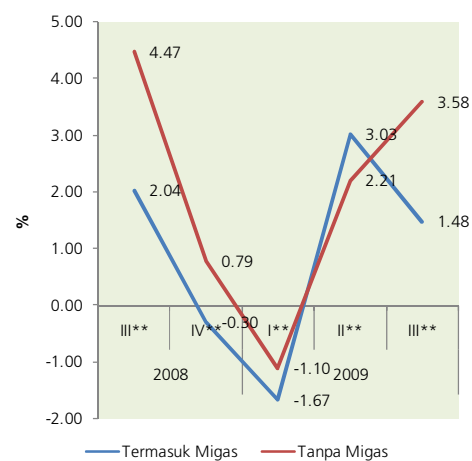
Secara tahunan, masih tumbuh melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,78% (y-o-y) maupun triwulan sebelumnya sebesar 3,07% (y-o-y), dan secara triwulanan tumbuh melambat dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,04% (q-t-q) maupun triwulan sebelumnya sebesar 3,03% (q-t-q).

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Tahun 2008-2009



Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Tahun 2008-2009



Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)
Keterangan : **) angka sementara

Sementara itu, dengan mengeluarkan komponen migas, tren perlambatan juga masih terlihat pada PDRB Provinsi Riau yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,52% (y-o-y), atau melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,54% (y-o-y) maupun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,43% (y-o-y). Meskipun demikian, pertumbuhan triwulanan PDRB Provinsi Riau tanpa unsur migas diperkirakan meningkat sebesar 3,58% (q-t-q) dibandingkan dengan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 2,21% (q-t-q), namun relatif melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,47% (q-t-q).

Fenomena kondisi perekonomian global yang mulai memasuki fase pemulihan (*recovery*) telah memberikan implikasi penting terhadap peningkatan harga minyak dunia¹ serta volume permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) (Grafik 1.5), sehingga ikut mendorong pertumbuhan industri pengolahan non migas Provinsi Riau yang dalam triwulan laporan diperkirakan tumbuh sebesar 4,87% (q-t-q).

¹ Berdasarkan data Bloomberg, harga rerata (average price) minyak dunia jenis WTI dalam triwulan III-2009 tercatat sebesar USD68,2/barel atau meningkat 14,45% dibandingkan dengan triwulan II-2009.

Disamping itu, adanya hari raya idul fitri serta masa liburan sekolah juga diimplikasikan turut memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat dan sektor perdagangan Provinsi Riau yang dalam triwulan laporan diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 5,1% (q-t-q) dan 4,38% (q-t-q). Secara umum, fenomena tersebut memberikan indikasi penting terhadap peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Riau secara triwulanan, khususnya tanpa unsur migas.

2. PDRB Sisi Permintaan

Dalam triwulan laporan, konsumsi masyarakat sebagai komponen yang mengalami pangsa terbesar² mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y). Konsumsi dalam triwulan laporan diperkirakan tumbuh mencapai 9,43% (y-o-y) dan 5,1% (q-t-q). Hal ini terjadi terutama akibat adanya faktor musiman berupa hari raya idul fitri, sehingga mendorong permintaan konsumsi makanan dan non makanan yang dalam triwulan laporan tumbuh masing-masing sebesar 5,58% (q-t-q) dan 4,84% (q-t-q) (Tabel 1.1 dan Tabel 1.2).

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Provinsi Riau Menurut Penggunaan Tahun 2008-2009 (%)

Komponen	2008		2009		
	III**	IV**	I**	II**	III**
Konsumsi Rumah Tangga	7,98	10,92	11,59	7,85	9,43
a. Makanan	7,82	9,34	11,16	10,48	11,78
b. Non Makanan	8,06	11,76	11,82	6,51	8,21
Konsumsi Lembaga Swasta	7,06	8,61	23,86	20,58	19,35
Konsumsi Pemerintah	8,23	7,25	0,65	5,75	7,88
PMTB	11,44	9,67	9,80	12,71	11,81
a. Migas	12,78	11,94	17,42	20,66	19,48
b. Non Migas	10,14	7,54	1,85	4,55	4,23
Ekspor	9,14	4,48	-1,57	-2,47	-5,20
a. Migas	9,72	5,11	-1,47	-6,91	-8,85
b. Non Migas	8,15	3,44	-1,76	5,36	1,05
Impor	8,48	7,59	2,42	4,81	3,37
Migas	6,78	5,37	4,42	3,07	2,50
Non Migas	8,54	7,38	6,55	6,43	5,52

Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)
Keterangan : **) angka sementara

² Tanpa unsur migas, pangsa konsumsi rumah tangga memiliki porsi sekitar 50% terhadap PDRB.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Provinsi Riau Menurut Penggunaan Tahun 2008-2009 (%)

Komponen	2008		2009		
	III**	IV**	I**	II**	III**
Konsumsi Rumah Tangga	3,58	2,92	0,55	0,62	5,10
a. Makanan	4,35	4,12	0,33	1,35	5,58
b. Non Makanan	3,19	2,30	0,66	0,23	4,84
Konsumsi Lembaga Swasta	1,79	2,87	15,70	3,25	-2,87
Konsumsi Pemerintah	4,63	1,97	-5,93	7,25	4,86
PMTB	4,55	3,46	0,15	4,04	3,71
a. Migas	2,56	3,20	10,34	3,33	1,55
b. Non Migas	6,60	3,72	-9,86	4,91	6,28
Ekspor	2,26	-0,67	-8,03	4,41	-0,60
a. Migas	1,16	-1,22	-6,61	-0,26	-0,94
b. Non Migas	4,20	0,27	-10,44	12,60	-0,07
Impor	3,24	1,89	-4,97	4,85	1,83
Migas	2,04	-0,30	-1,67	3,03	1,48
Non Migas	4,47	0,79	-1,10	2,21	3,58

Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)
Keterangan : ***) angka sementara

Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam triwulan laporan adalah PMTB migas yaitu sebesar 19,48% (y-o-y) diikuti oleh konsumsi lembaga swasta sebesar 19,35% (y-o-y). Relatif tingginya pertumbuhan PMTB migas diindikasikan akibat adanya investasi oleh perusahaan migas terkait dengan penemuan ladang minyak baru di Blok Sago Lirik, Kab. Indragiri Hulu. Sementara, tingginya konsumsi lembaga swasta diindikasikan masih merupakan dampak lanjutan dari faktor pemilu presiden beberapa waktu yang lalu akibat adanya belanja kampanye capres untuk percetakan dan iklan.

Pada saat yang bersamaan, ekspor triwulan III-2009 diperkirakan masih akan mengalami kontraksi hingga mencapai 5,20% (y-o-y). Hal ini dikarenakan masih belum membaiknya kinerja ekspor migas pada triwulan laporan yang mengalami kontraksi hingga mencapai 8,85% (y-o-y) dan 0,94% (q-t-q).

Adanya harapan pemulihan ekonomi dunia mulai sedikit terlihat pengaruhnya, terutama pada ekspor non migas Riau seperti CPO yang merupakan salah satu komoditas utama yang paling berpengaruh dan pada triwulan III-2009 mengalami pertumbuhan triwulanan 17,37% (q-t-q) atau tertinggi dibandingkan dengan

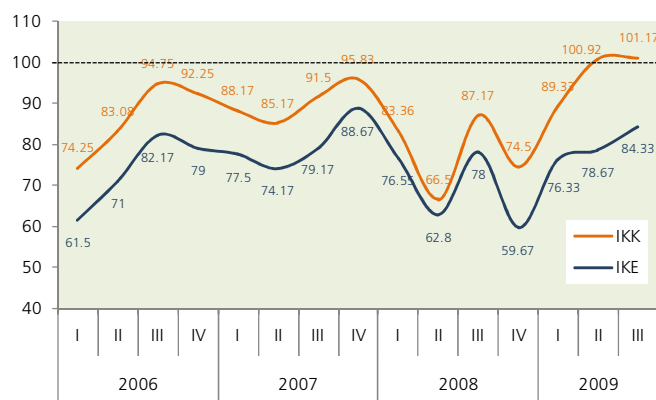
pertumbuhan dua triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 1,91% (Triwulan II-2009) dan -24,89% (Triwulan I-2009). Di sisi lain, menurunnya volume ekspor pulp sebesar 15,1% (q-t-q) diindikasikan menjadi salah satu faktor berkontraksinya ekspor non migas sebesar 0,07% (q-t-q) dalam triwulan laporan.

2.1. Konsumsi

Secara umum, perkembangan konsumsi provinsi Riau pada triwulan III-2009 menunjukkan tren meningkat. Konsumsi rumah tangga yang menguasai pangsa terbesar tercatat tumbuh sebesar 9,43% (y-o-y), bahkan secara triwulanan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 0,62% (q-t-q) pada triwulan II-2009 menjadi 5,1% (q-t-q) pada triwulan III-2009. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor musiman berupa hari raya Idul Fitri, sehingga mendorong konsumsi masyarakat baik pada konsumsi makanan maupun non makanan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,58% (q-t-q) dan 4,84% (q-t-q).

Disamping itu, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini mulai menunjukkan arah yang positif dan diperkirakan akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga masyarakat cenderung untuk meningkatkan tingkat konsumsi pada triwulan III-2009 (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (KK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Triwulan I-2006 – Triwulan III-2009



Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru

Komponen lain yang menunjukkan peningkatan adalah konsumsi pemerintah yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 7,88% (y-o-y). Kondisi tersebut diindikasikan terjadi akibat dampak lanjutan agenda lima tahunan berupa pemilihan umum presiden yang lalu. Disamping itu, pertumbuhan tahunan konsumsi lembaga swasta dalam triwulan laporan mengalami sedikit perlambatan dari 20,58% (y-o-y) pada triwulan II-2009 menjadi 19,35% (y-o-y) pada triwulan III-2009. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi lembaga swasta relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,06% (y-o-y).

2.2. Investasi

Perkembangan investasi yang diukur melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam triwulan laporan diperkirakan tumbuh sebesar 11,81% (y-o-y) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,71% (y-o-y), namun sedikit meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,44% (y-o-y).

Adanya investasi oleh perusahaan migas terkait dengan penemuan ladang minyak baru di Blok Sago Lirik Kab. Indragiri Hulu, dapat meningkatkan produksi minyak bumi Riau hingga mencapai 150 ribu/barel/hari, diindikasikan menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan tahunan PMTB migas yang mencapai 19,48% (y-o-y). Walaupun pertumbuhan ini mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 20,66% (y-o-y), namun lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12,78% (y-o-y).

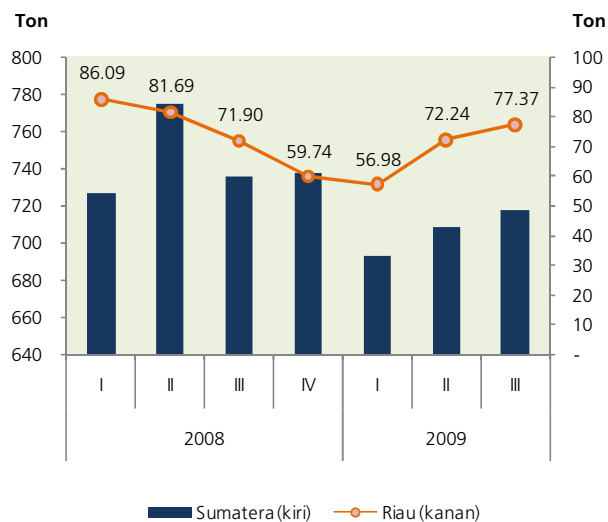
Disamping itu, berdasarkan hasil survei liaison³, diketahui bahwa seiring dengan mulai membaiknya permintaan pasar terhadap CPO, karet serta hasil perkebunan lainnya telah dilakukan peningkatan kapasitas produksi sehingga diindikasikan turut memicu pertumbuhan investasi non migas yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,23% (y-o-y) dan 6,28% (q-t-q).

³ Liaison adalah pendalaman informasi yang dilakukan melalui teknik *in-depth interview* kepada responden.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dukungan perbankan dalam hal pembiayaan juga terlihat dimana adanya pemberian kredit baru untuk investasi dalam triwulan laporan tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp353 miliar, hingga menjadi Rp801 miliar.

Selain itu, hal ini juga tercermin dari cukup tingginya nilai rata-rata penjualan semen⁴ pada triwulan laporan sebagaimana terlihat pada Grafik 1.4. Nilai rata-rata pengadaan semen Provinsi Riau dalam triwulan laporan tercatat sebesar 77,37 ton atau mengalami kenaikan sebesar 7,1% (q-t-q) dan 7,61% (y-o-y).

Grafik 1.4. Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Riau
Triwulan I-2008-Triwulan III-2009



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

2.3. Ekspor dan Impor

2.3.1. Migas

Dalam triwulan laporan, pertumbuhan ekspor migas diperkirakan masih akan mengalami kontraksi (penurunan) hingga mencapai 8,85% (y-o-y) dan 0,94% (q-t-q). Menurunnya pertumbuhan ekspor migas dalam triwulan laporan diindikasikan terjadi akibat belum begitu membaiknya produksi minyak dan gas bumi provinsi Riau.

⁴ Nilai penjualan diprosi melalui nilai realisasi pengadaan semen di Provinsi Riau..

2.3.2. Non Migas

Secara kumulatif, nilai ekspor non migas provinsi Riau (periode Januari-Agustus) tercatat sebesar USD4.604,79 juta atau turun sebesar USD1.051,84 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tabel 1.3). Hal ini berimbas pada menurunnya net ekspor non migas yang dalam triwulan laporan⁵ tercatat turun 11% atau sebesar USD3.938,77 juta. Meskipun demikian, dampak pemulihan perekonomian global sudah mulai terlihat pada pergerakan neraca perdagangan secara triwulanan.

Tabel 1.3. Perkembangan Ekspor Impor Non Migas Tahun 2008-2009

Komponen	2008	2009	2008 (Mean)		2009 (Mean)		
			Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Ekspor							
Nilai (USD juta)	5,656.63	4,604.79	620.03	851.05	490.86	589.92	681.22
Volume (ribu Ton)	7,528.24	9,437.54	879.73	1,416.54	1,144.20	1,127.23	1,311.62
Impor							
Nilai (USD juta)	1,230.84	666.02	138.82	122.00	101.93	68.48	77.39
Volume (ribu Ton)	1,193.00	971.14	136.47	132.50	89.41	112.86	182.17
Net Ekspor (USD juta)	4,425.80	3,938.77	481.21	729.05	388.93	521.44	603.83

Sumber : DSM Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata volume ekspor non migas dalam triwulan laporan mencapai 16,35% (q-t-q), atau tertinggi dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 19,23% (q-t-q) dan 1,48% (q-t-q).

Disamping itu, meskipun pertumbuhan triwulanan volume impor non migas masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008, namun meningkatnya nilai maupun volume impor non migas pada triwulan laporan yang mencapai 13% (q-t-q) dan 61,41% (q-t-q) mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian di Provinsi Riau mulai menggeliat.

2.3.2.1. Struktur

Dalam triwulan laporan, struktur ekspor non migas relatif tidak berubah dimana sekitar $\pm 70\%$ masih didominasi oleh kelompok minyak dan lemak nabati (dalam hal ini CPO), diikuti oleh kertas, kertas karton dan olahannya dan kertas dan pulp. Nilai rata-rata ekspor kelompok minyak dan lemak nabati pada triwulan laporan

⁵ Periode triwulan III-2009 yaitu bulan Juli sampai dengan Agustus.

tercatat sebesar USD489 juta atau meningkat sebesar 57,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada Tabel 1.4, terlihat bahwa ekspor komoditas utama seperti pulp dan kertas serta kertas, kertas karton dan olahannya mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 65,99% (y-o-y) dan 26,84% (y-o-y). Berdasarkan hasil survei liaison, diketahui bahwa salah satu faktor penyebab kondisi tersebut adalah menurunnya pasokan kayu sejak adanya peraturan daerah mengenai pembatasan penebangan kayu disamping masih belum pulihnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama.

Tabel 1.4. Perkembangan Nilai Rata-Rata Komoditi Ekspor Non Migas Utama Triwulan III-2008-Triwulan III-2009 (USD ribu)

No	Komoditi Ekspor	Tw III-2008	Tw III-2009
1	08 - Makanan Ternak	7,183.71	53.06
2	12 - Tembakau dan Olahan Tembakau	2,194.80	4,383.00
3	25 - Pulp dan Kertas	113,657.87	38,759.43
4	32 - Batu Bara, Kokas dan Briket	5,345.20	8,608.37
5	42 - Minyak dan Lemak Nabati	310,259.27	489,009.85
6	59 - Bahan Kimia Lainnya	42,384.43	23,287.50
7	64 - Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	108,499.14	79,382.66
8	72 - Mesin Industri Tertentu/Kausus	140.80	0.36
9	89 - Hasil Industri Lainnya	57.09	3.27
Sub Total Komoditi Utama		589,722.30	643,487.50

Sumber : DSM Bank Indonesia

Komposisi impor non migas provinsi Riau dalam triwulan III-2009 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.5 relatif mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan III-2008 yang sebagian besar didominasi oleh mesin industri tertentu dengan nilai mencapai USD38,5 juta.

Sebagian besar komoditas impor non migas Provinsi Riau dalam triwulan laporan berupa pupuk kimia buatan pabrik dengan transaksi nilai mencapai USD17 juta, diikuti oleh mesin industri dan perlengkapannya sebesar USD4,2 juta, mesin industri tertentu sebesar USD3,5 juta dan pupuk dan mineral alam lainnya sebesar USD3,3 juta. Adanya pergeseran komponen impor dalam triwulan laporan mengimplikasikan bahwa fenomena krisis keuangan global telah memberikan pukulan telak bagi sektor industri di Provinsi Riau.

Tabel 1.5. Perkembangan Nilai Rata-Rata Komoditi Impor Non Migas Utama Triwulan III-2008-Triwulan III-2009 (USD ribu)

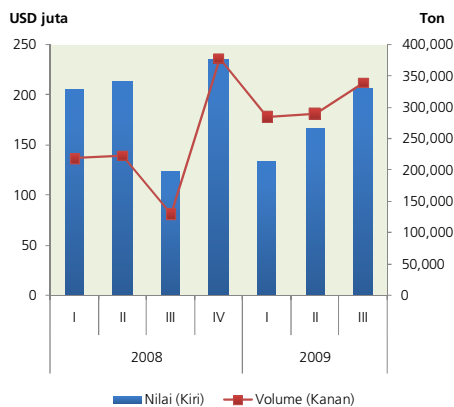
No	Komoditi Impor	Tw III-2008	Tw III-2009
1	05 - Buah-buahan dan Sayur-sayuran	1,261.56	1,814.80
2	11 - Minuman	93.74	82.35
3	27 - Pupuk dan Mineral Alam Lainnya	4,792.93	3,254.86
4	56 - Pupuk Kimia Buatan Pabrik	36,833.28	17,093.24
5	67 - Besi dan Baja	7,878.63	1,877.29
6	72 - Mesin Industri Tertentu/Kausus	38,524.56	3,524.65
7	74 - Mesin Industri dan Perlengkapannya	11,164.52	4,158.30
8	87 - Inst, Ilmu Pengetahuan, Kedokteran dsb	1,031.99	1,181.39
Sub Total Komoditi Utama		101,581.21	32,986.88

Sumber : DSM Bank Indonesia

2.3.2.2. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor-Impor Non Migas

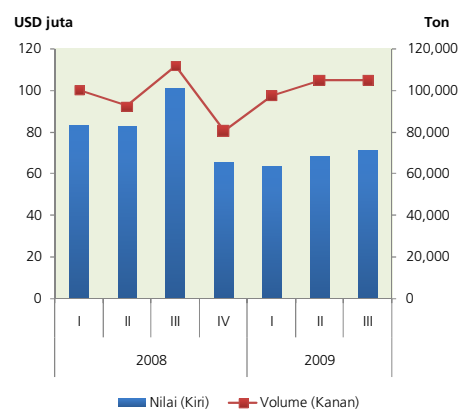
Secara spesifik, potensi pembalikan ekonomi mulai terlihat pada tiga komoditas utama ekspor non migas Provinsi Riau yang terlihat pada Grafik 1.5 sampai Grafik 1.6. Berdasarkan Grafik 1.5, diketahui bahwa ekspor CPO mulai menunjukkan arah pembalikan pada triwulan III-2009 sejak mencapai titik terendahnya di triwulan III-2008. Sebagaimana terlihat pada grafik tersebut, rata-rata volume ekspor CPO dalam triwulan laporan tercatat sebesar 339 ribu ton atau naik 17,37% (q-t-q) Meskipun demikian nilai ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV-2008 yang tercatat sebesar 378 ribu ton.

Grafik 1.5. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor CPO Riau Tahun 2008-2009



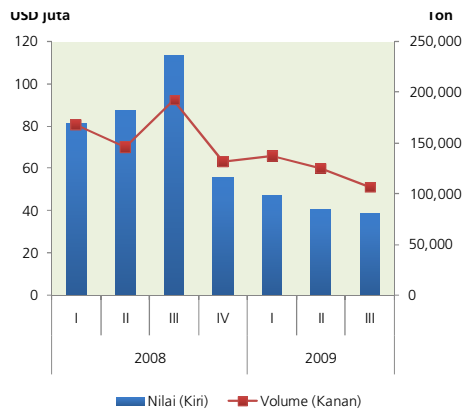
Sumber : DSM Bank Indonesia

Grafik 1.6. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor Kertas Olahan Riau Tahun 2008-2009



Sumber : DSM Bank Indonesia

Grafik 1.7. Pergerakan Nilai dan Volume Rata-Rata Ekspor *Pulp* Riau Tahun 2008-2009



Sumber : DSM Bank Indonesia

Sementara itu, dalam triwulan laporan, terlihat pada Grafik Grafik 1.7 bahwa pergerakan ekspor *pulp* Riau mengalami kecenderungan menurun. Nilai ekspor pulp dalam triwulan laporan mencapai sebesar USD39 juta atau turun 4,67% (q-t-q) dan 65,89% (y-o-y).

Sedangkan volume ekspor *pulp* dalam triwulan laporan mencapai 106,47 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 15% (q-t-q) dan 44,7% (y-o-y). Kondisi tersebut diindikasikan terjadi akibat adanya

permasalahan bahan baku yang dialami oleh sejumlah industri olahan kayu sejak adanya peraturan daerah terkait penebangan kayu ilegal.

Menurut wilayah tujuannya, pada Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa wilayah Asia merupakan tujuan ekspor komoditas utama non migas. Rata-rata nilai ekspor tiga komoditas non migas ke wilayah tersebut mencapai USD189,60 juta atau mencapai sekitar $\pm 50\%$ terhadap total ekspor tiga komoditas tersebut. Adapun wilayah lain yang menjadi mitra dagang terbesar setelah Asia adalah Eropa, dimana ekspor tiga komoditas utama non migas ke wilayah tersebut mencapai USD103,7 juta.

Tabel 1.6. Wilayah Tujuan Tiga Komoditas Ekspor Non Migas Utama Triwulan III-2009 (dalam USD ribu)

No	Komoditi Ekspor	Afrika	Amerika	Asia	Australia	Eropa
1	25152 - Pulp	180.72	30.85	34,929.91	-	3,617.95
2	42221 - <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	4,628.39	1,886.13	107,325.84	-	92,859.35
3	64126 - Kertas Karton dan Olahannya	3,084.83	10,444.23	47,349.25	2,801.65	7,247.06
Total		7,893.94	12,361.21	189,605.00	2,801.65	103,724.36

Sumber : DSM Bank Indonesia

Secara spesifik, pada Tabel 1.7, terlihat bahwa negara tujuan ekspor CPO Provinsi Riau dalam triwulan laporan relatif tidak berubah dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Negara mitra dagang utama untuk komoditas CPO adalah India dan Belanda dengan rata-rata nilai ekspor masing-masing mencapai USD82,5 juta dan USD62,7 juta.

Dalam triwulan laporan, nilai rata-rata ekspor ke India mengalami penurunan sebesar 7% (q-t-q). Meskipun demikian, kondisi tersebut ter-offset oleh kenaikan permintaan ekspor CPO dari Belanda yang pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 45,8 juta atau naik 271,5% (q-t-q).

Tabel 1.7. Negara Tujuan Ekspor Non Migas Utama Tahun 2009 (dalam USD ribu)

No	Komoditas	Negara	2009		
			I	II	III
1	CPO	India	77.476,36	88.756,65	82.496,07
		Belanda	26.298,36	16.866,77	62.654,46
		Itali	7.934,20	15.091,98	10.510,90
		Malaysia	4.402,31	11.755,49	19.936,47
		Jerman	6.801,95	12.809,94	9.828,16
		Spanyol	0,00	4.480,17	9.823,09
		R.R.C.	4.647,60	2.813,92	2.156,00
		Mesir	777,05	4.095,02	4.623,12
		Pakistan	2.752,95	4.003,27	331,50
		Bangladesh	1.286,71	3.892,28	2.133,31
2	Pulp	R.R.C.	31.097,41	22.575,86	20.563,96
		Korea Selatan	5.459,26	6.550,73	5.899,65
		India	1.585,59	4.399,48	4.823,26
		Vietnam	1.900,19	2.102,55	1.650,28
		Itali	1.516,06	1.480,50	2.169,95
		Jepang	1.390,69	1.146,73	985,89
		Belanda	466,48	400,96	902,87
		Bangladesh	859,45	353,05	65,03
		Taiwan	607,18	430,15	101,98
		Perancis	349,86	300,83	545,13
3	Kertas Karton dan Olahannya	R.R.C.	4.116,09	5.746,63	6.334,29
		Malaysia	3.917,53	6.184,96	5.801,43
		AS	3.354,11	4.258,66	6.937,87
		Vietnam	2.395,48	4.498,32	5.169,39
		Emirat Arab	3.503,32	2.840,14	2.821,97
		Singapura	3.106,88	2.786,14	3.172,85
		Hongkong	2.407,77	2.888,42	2.878,21
		Australia	2.984,37	2.582,45	2.292,20
		Korea Selatan	2.982,64	1.743,97	3.141,22
		Jepang	2.600,81	3.204,03	993,11

Dalam triwulan laporan juga diketahui bahwa kenaikan triwulanan permintan ekspor CPO yang cukup tinggi berasal dari Malaysia yaitu sebesar 69,59% (q-t-q). Sementara itu, pada Tabel 1.7 juga diketahui bahwa sebagian besar ekspor komoditas pulp dan kertas karton dan olahannya ditujukan ke Cina dimana nilai rata-rata ekspor triwulan III-2009 masing-masing mencapai USD20,5 juta dan USD6,3 juta.

Adanya fase pemulihan ekonomi global di negara industri maju mulai terlihat terhadap pergerakan ekspor komoditas utama dimana kenaikan permintaan triwulanan tertinggi untuk CPO berasal dari Belanda sebesar 271,5%. Sementara, kenaikan tertinggi permintaan komoditas pulp sebagian besar juga berasal dari wilayah Eropa yaitu Belanda dengan nilai transaksi USD902,87 ribu atau naik 125,18% (q-t-q), dan Perancis yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 81,21% (q-t-q). Sedangkan untuk kenaikan permintaan tertinggi komoditas kertas karton dan olahannya berasal dari Korea Selatan dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 80,12% (q-t-q) dan 62,91% (q-t-q).

3. PDRB Sisi Penawaran

Dalam triwulan laporan, pertumbuhan tahunan sektoral tertinggi diperkirakan terjadi pada sub sektor pertambangan dan penggalian non migas yaitu sebesar 11,71% (y-o-y). Sedangkan sub sektor pertambangan migas yang menguasai pangsa terbesar dalam PDRB diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,15% (y-o-y) akibat belum membaiknya produksi minyak dan gas bumi yang sebagian besar masih mengandalkan sumur tua. Disamping itu, menurunnya produksi listrik akibat kerusakan yang terjadi pada beberapa pembangkit dalam triwulan laporan diindikasikan menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya pertumbuhan sektor listrik Riau yang diperkirakan tumbuh sebesar 0,93% (y-o-y).

Sementara itu, adanya momen besar berupa hari raya idul fitri dan musim liburan sekolah diindikasikan memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan triwulanan sektor jasa yang dalam triwulan laporan tercatat mengalami kenaikan tertinggi dari 0,67% (q-t-q) pada triwulan II-2009 menjadi 5,08% (triwulan III-2009). Selain itu, kondisi tersebut juga turut memberikan pengaruh

terhadap meningkatnya pertumbuhan triwulanan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,38% (q-t-q).

Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Provinsi Riau Menurut Sektor Tahun 2008-2009

No	Sektor	2008		2009		
		III**	IV**	I**	II**	III**
<i>Tradables</i>						
1	Pertanian	5,74	2,09	3,10	3,14	2,25
2	Pertambangan dan Penggalian	5,52	4,00	2,85	0,42	0,05
	a. Migas	5,39	3,81	2,64	0,18	-0,15
	b. Non Migas	14,05	16,18	15,84	15,51	11,71
3	Industri Pengolahan	7,88	8,37	5,35	5,82	3,60
	a. Migas	2,83	0,08	0,93	1,12	-0,67
	b. Non Migas	9,54	11,04	6,78	7,37	4,92
<i>Non-Tradables</i>						
1	Listrik dan Air Bersih	6,86	7,25	5,60	4,87	-0,93
2	Bangunan	10,47	14,61	9,31	8,21	8,29
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,50	7,50	7,95	8,02	9,37
4	Pengangkutan dan Komunikasi	10,21	12,03	9,93	8,64	6,61
5	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	14,22	13,87	12,20	11,76	8,21
6	Jasa-jasa	9,30	9,34	9,26	8,63	7,63
Migas		6,78	5,37	4,42	3,07	2,50
Non Migas		8,54	7,38	6,55	6,43	5,52

Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)
Keterangan : **) angka sementara

Tabel 1.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Q-t-Q) Provinsi Riau Menurut Sektor Tahun 2008-2009

No	Sektor	2008		2009		
		III**	IV**	I**	II**	III**
<i>Tradables</i>						
1	Pertanian	3,13	-2,49	-0,49	3,07	2,24
2	Pertambangan dan Penggalian	0,18	-1,04	-3,91	3,82	-0,29
	a. Migas	-0,03	-1,26	-2,26	3,84	-0,36
	b. Non Migas	6,82	5,61	-0,25	2,65	3,30
3	Industri Pengolahan	5,59	3,23	-4,16	1,30	3,37
	a. Migas	0,30	-1,26	-0,49	2,61	-1,48
	b. Non Migas	7,33	4,61	-5,22	0,90	4,87
<i>Non-Tradables</i>						
1	Listrik dan Air Bersih	4,17	0,76	-0,40	0,32	-1,60
2	Bangunan	4,04	5,02	-4,19	3,36	4,12
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,09	-1,44	3,40	2,81	4,38
4	Pengangkutan dan Komunikasi	4,02	4,00	-0,68	1,11	2,07
5	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	8,28	5,97	-3,49	0,92	4,85
6	Jasa-jasa	6,06	2,76	-0,99	0,67	5,08
Migas		2,04	-0,30	-1,67	3,03	1,48
Non Migas		4,47	0,79	-1,10	2,21	3,58

Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)
Keterangan : **) angka sementara

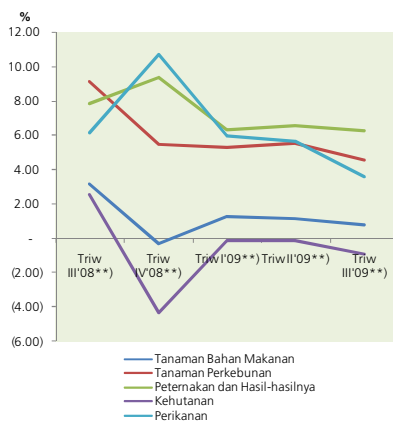
Sektor lain yang mencatat pertumbuhan triwulanan cukup tinggi dalam triwulan laporan adalah industri pengolahan non migas yaitu sebesar 4,87% (q-t-q). Kondisi ini diperkirakan dipicu oleh adanya fase pemulihan ekonomi global yang turut serta mendorong peningkatan produktivitas industri karet dan CPO seiring dengan mulai meningkatnya permintaan pasar.

Sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi industri maka permintaan terhadap batubara pun meningkat. Berdasarkan hasil survei liaison, diketahui bahwa kebanyakan industri non migas menggunakan batubara sebagai bahan baku energi untuk mendukung aktivitasnya. Kondisi tersebut diindikasikan mendorong peningkatan pertumbuhan pertambangan non migas yang dalam triwulan laporan tumbuh sebesar 3,3% (q-t-q).

3.1. Sektor Pertanian

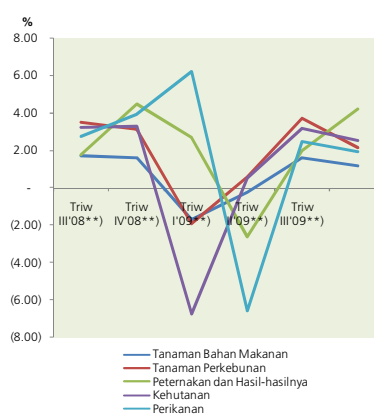
Pertumbuhan sektor pertanian Riau dalam triwulan laporan diperkirakan mencapai 2,25% (y-o-y) atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,14% (y-o-y), maupun periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,74% (y-o-y). Menurunnya kinerja sub sektor kehutanan akibat ketatnya pengawasan pemerintah provinsi Riau terhadap peredaran kayu ilegal yang diindikasikan menjadi salah satu pendorong melambatnya pertumbuhan sektor pertanian. Dalam triwulan laporan, diketahui bahwa pertumbuhan sub sektor kehutanan mengalami kontraksi sebesar 0,91% (y-o-y) atau relatif menurun dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi triwulan sebelumnya sebesar 0,17% (y-o-y).

Grafik 1.8. Pertumbuhan (y-o-y)
Sub Sektor Pertanian 2008-2009



Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.9. Pertumbuhan (q-t-q)
Sub Sektor Pertanian 2008-2009



Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)

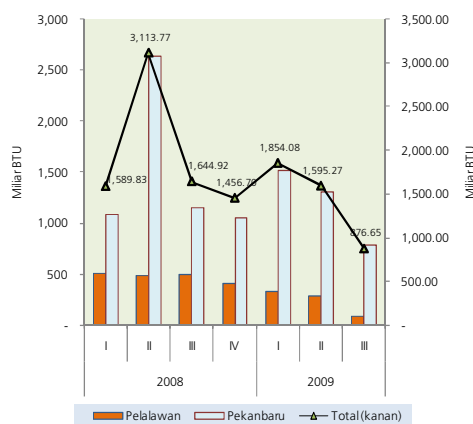
Disamping itu, curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Juli dan Agustus diduga menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan yang tercatat tumbuh melambat sebesar 0,75% (y-o-y) dibandingkan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 1,15% (y-o-y).

Secara triwulanan, pertumbuhan pada sub sektor peternakan tercatat sebesar 4,19% (q-t-q) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,97% (q-t-q). Sedangkan secara tahunan, sub sektor peternakan diperkirakan mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sub sektor lainnya yaitu sebesar 6,24%. Kondisi ini diindikasikan terjadi akibat meningkatnya permintaan daging ternak dan produk turunannya seiring dengan pelaksanaan hari raya idul fitri yang jatuh pada triwulan laporan.

3.2. Pertambangan dan Penggalian

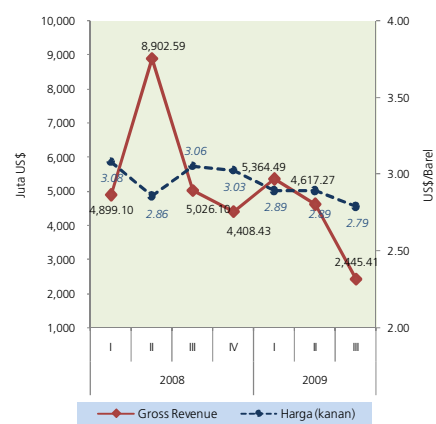
Dalam triwulan laporan, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan mengalami perlambatan hingga mencapai 0,05% (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,42% (y-o-y). Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya sub sektor pertambangan migas yang secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,15% (y-o-y), menurun jika dibandingkan dengan triwulan II-2009 yang tercatat tumbuh sebesar 0,18% (y-o-y).

Grafik 1.10. Perkembangan *Lifting* Gas Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009



Sumber : Dept. ESDM (diolah)

Grafik 1.11. Perkembangan *Gross-Revenue* dan Harga Gas Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009



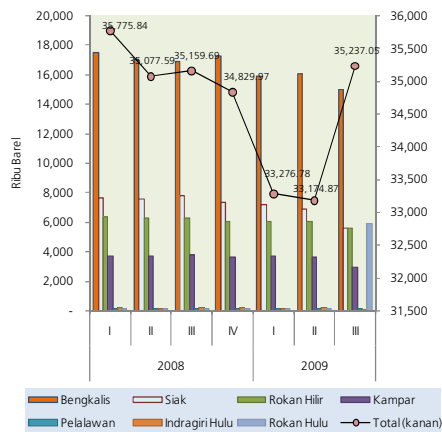
Sumber : Dept. ESDM (diolah)

Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah menurunnya kinerja *lifting* gas bumi meskipun dalam triwulan laporan *lifting* minyak bumi relatif mengalami kenaikan.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.10, *lifting* gas bumi Provinsi Riau pada triwulan III-2009 diketahui masih menunjukkan tren penurunan sebesar 45,05% (q-t-q) dan 46,7% (y-o-y). Kondisi tersebut diperkirakan terjadi akibat dari mulai berkurangnya cadangan gas bumi provinsi Riau serta belum ditemukannya sumur baru yang lebih produktif.

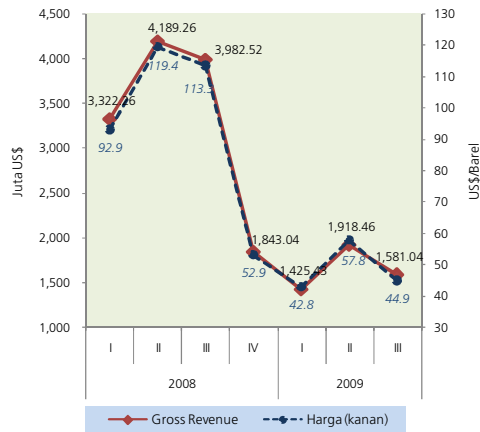
Meskipun demikian, berdasarkan Grafik 1.12, diketahui bahwa *lifting* minyak bumi Provinsi Riau dalam triwulan laporan mengalami kenaikan sebesar 6,22% (q-t-q) dan 0,22%(y-o-y). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya *lifting* minyak bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Rokan Hulu dari 128 ribu barel pada triwulan II-2009 menjadi 5,8 juta barel pada triwulan III-2009.

Grafik 1.12. Perkembangan *Lifting* Minyak Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009



Sumber : Dept. ESDM (diolah)

Grafik 1.13. Perkembangan *Gross-Revenue* dan Harga Minyak Bumi Provinsi Riau Tahun 2008-2009

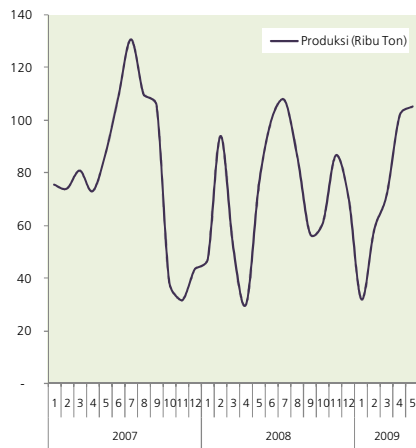


Sumber : Dept. ESDM (diolah)

Selain itu, dalam triwulan laporan juga diketahui bahwa sub sektor pertambangan non migas diperkirakan secara tahunan tumbuh sebesar 11,71% (y-o-y) atau melambat dibandingkan dengan triwulan II-2008 maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 21,74% (y-o-y) dan 30,88% (y-o-y).

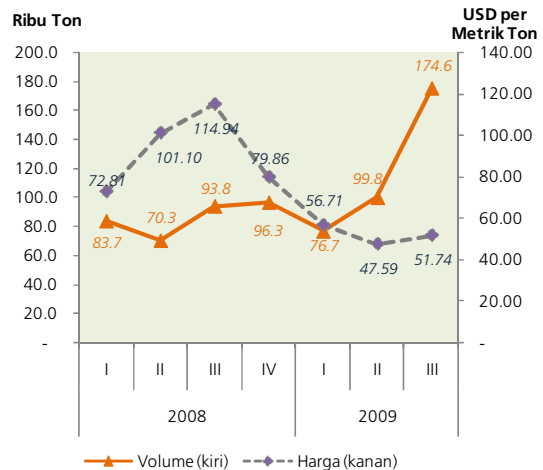
Meskipun demikian, secara triwulanan, pertumbuhan pertambangan non migas diperkirakan mengalami peningkatan dari 2,65% (q-t-q) pada triwulan II-2009 menjadi 3,3% (triwulan III-2009). Hal ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya⁶ produksi batu bara yang sejak triwulan II-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat sebagaimana terlihat pada Grafik 1.14. Selain itu, indikasi peningkatan produksi juga tercermin dari pergerakan volume ekspor batubara yang menunjukkan kenaikan pada triwulan III-2009⁷ (Grafik 1.15). Volume rata-rata ekspor batu bara Provinsi Riau dalam triwulan laporan tercatat sebesar 174 ribu ton atau meningkat 75% (q-t-q). Kenaikan ini relatif tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 30,1%.

Grafik 1.14. Perkembangan Produksi Batu Bara Provinsi Riau Tahun 2008-2009



Sumber : Dept. ESDM (diolah)

Grafik 1.15. Perkembangan Harga Batu Bara Dunia dan Rata-Rata Volume Ekspor Batu Bara Provinsi Riau 2008-2009



Sumber : DSM Bank Indonesia dan Bloomberg

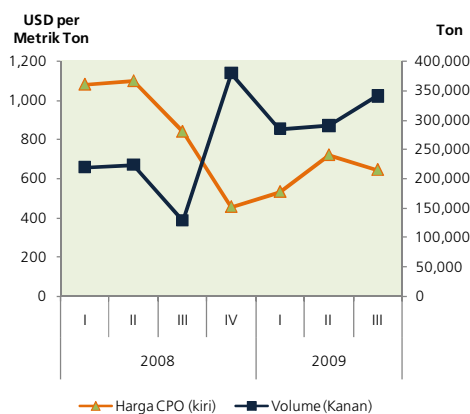
3.3. Industri Pengolahan

Pertumbuhan sektor Industri pengolahan dalam triwulan III-2009 diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% (y-o-y) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,82% (y-o-y) maupun periode yang sama tahun

⁶ Berdasarkan data ESDM, nilai rata-rata produksi perusahaan batu bara provinsi Riau pada triwulan II-2009 mengalami peningkatan sebesar 49 ribu ton atau meningkat 91,56% (q-t-q) dibandingkan triwulan I-2009

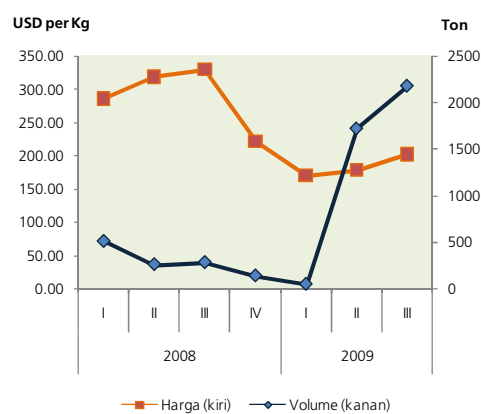
sebelumnya yaitu sebesar 7,88% (y-o-y). Terjadinya perlambatan pada sektor ini diindikasikan akibat melambatnya pertumbuhan sub sektor industri non migas yang memiliki porsi terbesar dalam sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,92% (y-o-y).

Grafik 1.16. Perkembangan Volume Ekspor dan Harga CPO Dunia Tahun 2008-2009



Sumber : DSM Bank Indonesia

Grafik 1.17. Perkembangan Volume Ekspor dan Harga Karet Dunia Tahun 2008-2009



Sumber : DSM Bank Indonesia

Meskipun pertumbuhan *year-on-year* pada sub sektor ini melambat, namun pertumbuhan triwulanan sub sektor ini diperkirakan mencapai 4,87% (q-t-q) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,9% (q-t-q).

Berdasarkan hasil survei liason diketahui bahwa hal ini diduga terkait dengan adanya fase pemulihan di beberapa negara mitra dagang utama, sehingga meningkatkan permintaan CPO Provinsi Riau, disamping adanya *roll over*⁷ penjualan. Meskipun terjadi penurunan rata-rata harga jual CPO/Kg sebesar 22,72%, namun dari hasil survei liaison diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai penjualan sebesar 3,34% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan hasil liason juga diketahui bahwa ekspor karet olahan baik secara nilai maupun volume juga mengalami peningkatan seiring dengan mulai

⁷ Periode triwulan III-2009 dari Juli-Agustus.

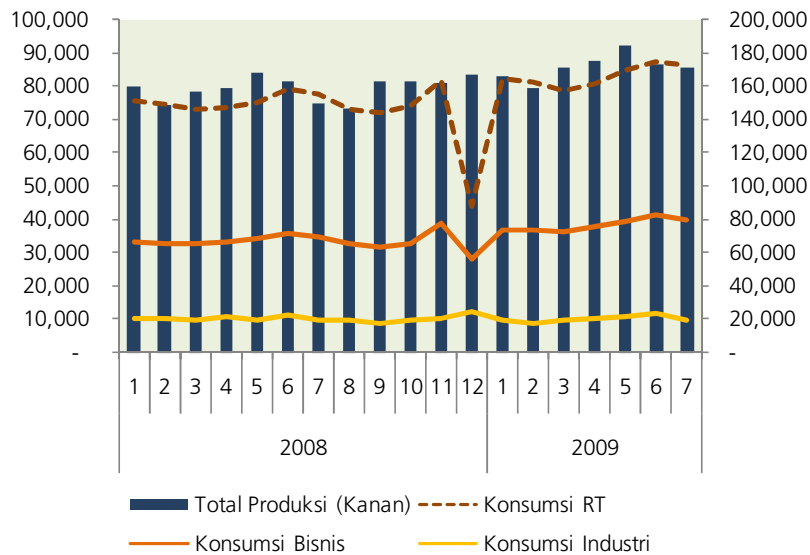
⁸ Roll over terjadi akibat penundaan pengiriman barang yang sesuai jadwal seharusnya dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2008 namun baru terealisasi di tahun 2009.

bergariahnya pasar otomotif dunia sebagaimana tercermin pada Grafik 1.17. Hal ini dikarenakan sebagian besar karet olahan yang diekspor ditujukan untuk industri ban kendaraan bermotor.⁹

3.4. Listrik, Gas dan Air Bersih (LGA)

Perkembangan sektor LGA dalam triwulan laporan menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,93% (y-o-y) dan 1,6% (q-t-q). Hal ini diakibatkan oleh menurunnya produksi listrik yang menjadi penopang utama pada sub sektor tersebut. Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.18, jumlah pemakaian listrik di provinsi Riau menunjukkan tren penurunan pada bulan Juli 2009. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya produksi listrik yang sangat bergantung kepada ketersediaan air (curah hujan) serta adanya kerusakan pada pembangkit listrik di Koto Panjang. Disamping itu, pertumbuhan sub sektor air juga masih melambat dikarenakan belum optimalnya produksi air bersih dan minimnya dana investasi di sektor ini.

Grafik 1.18. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Listrik di Provinsi Riau
(dalam ribu Kwh)



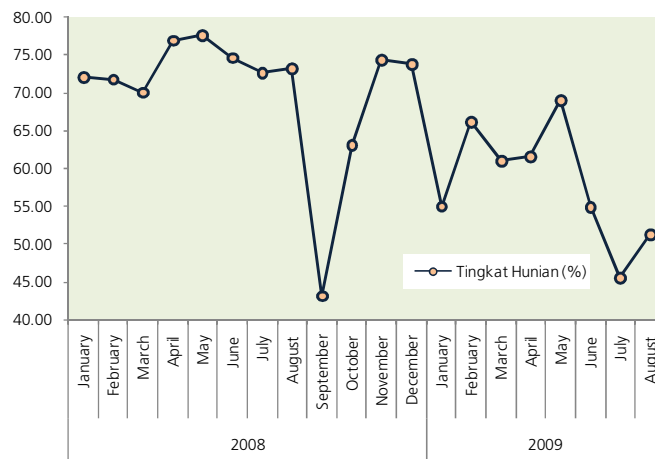
Sumber : PT.PLN, diolah.

⁹Harga karet per 1 September di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp14.700-Rp15.000/Kg, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus yang tercatat sebesar Rp14.500/Kg. Salah satu faktor yang mendorong

3.5. Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Perkembangan sektor PHR pada triwulan laporan diperkirakan tumbuh sebesar 9,37% (y-o-y), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya namun relatif menurun jika dibandingkan dengan triwulan II-2008. Secara triwulanan, sektor PHR diperkirakan tumbuh sebesar 4,38% (q-t-q). Adapun penyebab meningkatnya pertumbuhan sektor PHR adalah naiknya pertumbuhan pada sub sektor perdagangan besar sebesar 9,44% (y-o-y) dan hotel sebesar 7,7% (y-o-y). Kondisi ini diindikasikan terjadi akibat fenomena hari raya idul fitri dan masa liburan sekolah, sehingga mendorong tingkat belanja masyarakat secara agregat.

Grafik 1.19. Tingkat Hunian Hotel di Riau



Sumber : PHRI, diolah

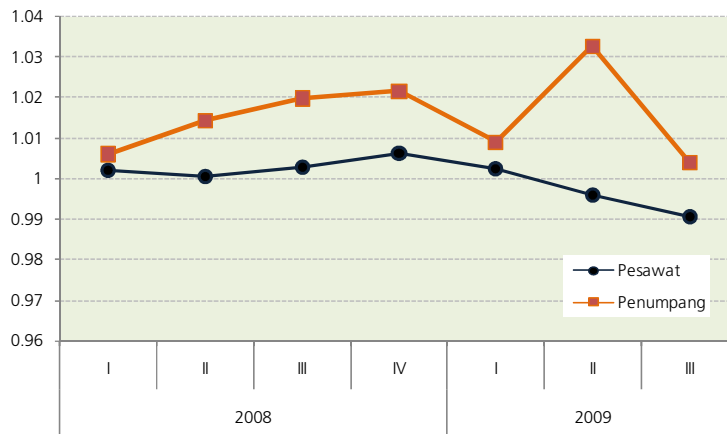
3.6. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam triwulan laporan diperkirakan tumbuh sebesar 6,61% (y-o-y) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,64% (y-o-y). Salah satu indikator perlambatan yang terlihat dalam triwulan laporan adalah masih rendahnya arus keberangkatan penumpang dibandingkan dengan arus penumpang yang datang. Pada Grafik 1.20, terlihat

kenaikan harga karet adalah menurunnya produksi lateks petani akibat curah hujan yang cukup tinggi pada bulan September 2009.

bahwa rasio keberangkatan-kedatangan penumpang di Bandara SSK II pada triwulan III-2009 cenderung menurun jika dibandingkan dengan triwulan III-2008¹⁰.

Grafik 1.20. Rasio Keberangkatan-Kedatangan Pesawat dan Penumpang di Bandara SSK II



Sumber : PT. Angkasa Pura, Riau, diolah

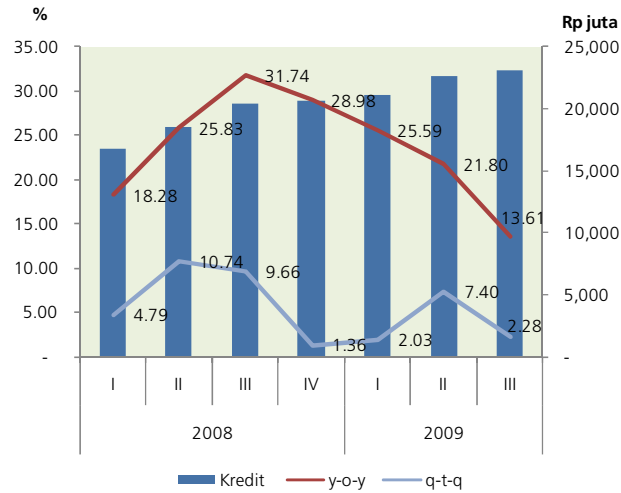
3.7. Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperkirakan melambat yaitu sebesar 8,21% (y-o-y). Melambatnya pertumbuhan di sektor ini dikarenakan melambatnya pertumbuhan sub sektor perbankan yang diperkirakan tumbuh sebesar 12,32% (y-o-y,%). Kondisi ini juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan Riau yang mengimplikasikan bahwa perbankan sangat bersifat hati-hati dalam menyalurkan dananya sebagaimana terlihat pada Grafik 1.21.

Dalam triwulan laporan, nilai kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp23,15 triliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 13,61% (y-o-y). Pertumbuhan ini relatif melambat dibandingkan dengan triwulan II-2009 yang tercatat tumbuh sebesar 21,8% (y-o-y). Sebagaimana diketahui, sub sektor perbankan memiliki pangsa cukup besar dalam sektor keuangan sehingga perkembangannya sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor keuangan.

¹⁰ Periode triwulan III-2009 (Juli-Agustus).

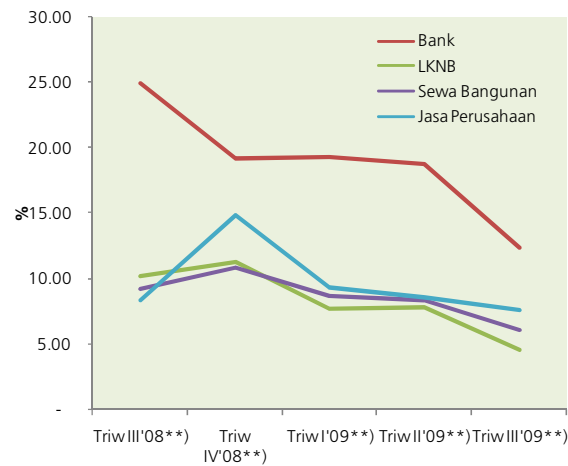
Grafik 1.21. Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan di Provinsi Riau



Sumber : LBU

Pertumbuhan sub sektor lainnya seperti lembaga keuangan non bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan secara *year-on-year* tumbuh masing-masing sebesar 4,59%, 6,05% dan 7,55% atau relatif melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.22).

Grafik 1.22. Pertumbuhan Tahunan (Y-oY) Sub Sektor Keuangan 2008-2009

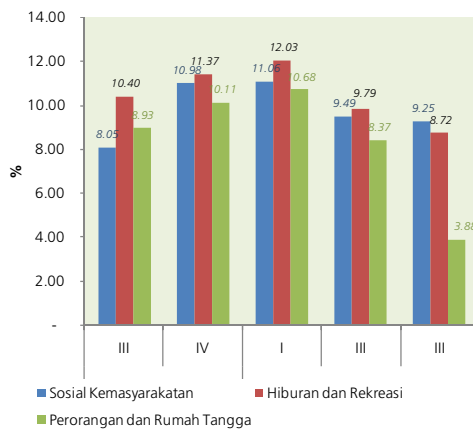


Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)

3.8. Jasa-jasa

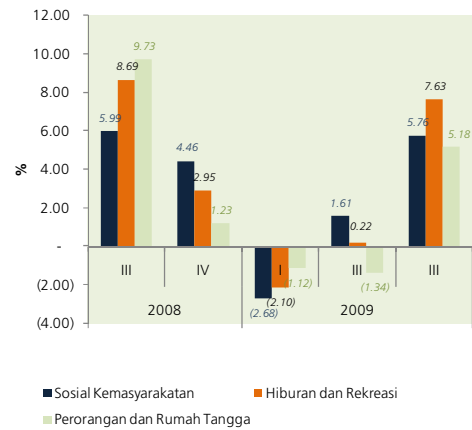
Pertumbuhan sektor jasa pada triwulan III-2009 diperkirakan tumbuh melambat sebesar 7,63% (y-o-y) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,63% (y-o-y). Meskipun demikian, pertumbuhan triwulanan sektor jasa menunjukkan kenaikan sebesar 5,08% (q-t-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,67% (q-t-q). Sub sektor hiburan dan rekreasi mengalami kenaikan triwulanan tertinggi dari 0,22% (q-t-q) pada triwulan II-2009 menjadi 7,63% (q-t-q) pada triwulan III-2009. Kondisi ini diperkirakan dipicu oleh adanya fenomena hari raya idul fitri dan masa liburan sekolah yang terjadi pada triwulan laporan.

Grafik 1.23. Pertumbuhan (y-o-y)
Sub Sektor Jasa Swasta 2008-2009



Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.24. Pertumbuhan (q-t-q)
Sub Sektor Jasa Swasta 2008-2009



Sumber : Data milik Bank Indonesia (diolah)

UPAYA REVITALISASI PERKEBUNAN: KONDISI TERKINI DAN TANTANGAN KEDEPAN

I. Latar Belakang

Saat ini, sektor perkebunan di Provinsi Riau merupakan salah satu *leading sector* yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Riau disamping sektor migas yang menguasai pangsa terbesar pada PDRB Provinsi Riau. PDRB Perkebunan Provinsi Riau pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp5,622 triliun atau menyumbang PDRB sebesar 14,26% terhadap PDRB non migas dan kontribusi ini lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PDRB perkebunan nasional yang hanya mencapai 3,5%.¹

Sejalan dengan kondisi tersebut, peranan sektor perkebunan tentunya memiliki andil penting terhadap pendapatan masyarakat Provinsi Riau dimana pada tahun 2008 sekitar 1.067.699 KK bekerja di sektor tersebut. Sementara pada tahun 2009, sektor tersebut diperkirakan akan memberi lapangan kerja baru bagi sekitar 15.250 tenaga kerja.²

Tabel 1. Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau (dalam Ton)

No	Komoditas	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	K. Sawit	3.386.801	3.406.394	4.659.426	5.119.270	5.580.004	6.203.848
2	Kelapa	572.624	523.739	55.459	552.021	563.789	560.745
3	Karet	305.644	396.291	415.906	532.901	391.353	404.424
4	Kakao	4.062	4.153	3.558	4.079	4.102	4.090
5	Sagu	180.003	111.565	143.463	123.005	176.102	164.831
Jumlah		4.449.134	4.442.142	5.277.812	6.331.276	6.715.350	7.337.938

* angka perkiraan

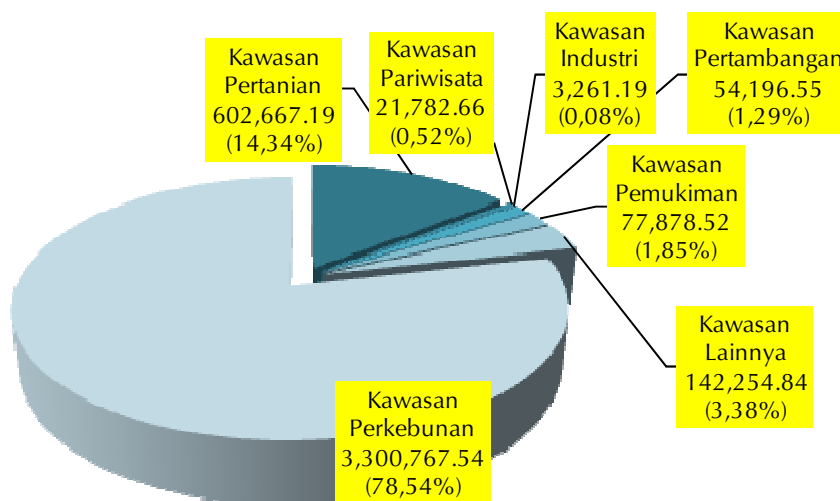
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

¹ Data milik Badan Pusat Statistik.

² Data milik Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa sawit masih merupakan tanaman perkebunan yang menjadi komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Riau disamping kelapa dan karet. Produksi kelapa sawit pada tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 6,20 juta ton atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11,18%, sedangkan komoditas kelapa diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,54% yang diperkirakan seiring dengan preferensi petani yang lebih tinggi kepada kelapa sawit. Disamping itu, komoditas karet diperkirakan akan mengalami kenaikan produksi sebesar 3,34% .

Grafik 1. Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi Riau (dalam Ha)



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Sementara itu, berdasarkan Grafik 1, diketahui bahwa sebagian besar lahan di Provinsi Riau merupakan kawasan perkebunan dengan luas mencapai 3,3 juta Ha atau sekitar 78,54% terhadap luas lahan keseluruhan di Provinsi Riau. Besarnya pangsa lahan perkebunan di Provinsi Riau, mengindikasikan tingginya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu basis perekonomian daerah.

Dengan masih adanya luas areal pertanian di Provinsi Riau yang mencapai 602,67 ribu Ha atau 14,34%, kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar bagi Provinsi Riau untuk dapat mengembangkan sektor pertanian kedepannya. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan implementasi pemetaan komoditas pertanian terkait dengan agroekosistem lahan.

II. Revitalisasi Perkebunan

II.1. Kondisi Terkini

Program Revitalisasi Perkebunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan pengembangan perkebunan baik melalui perluasan, peremajaan maupun rehabilitasi tanaman perkebunan. Program ini salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir.

Dalam triwulan laporan, wilayah yang direncanakan akan dilakukan revitalisasi berupa peremajaan kebun (*replanting*) dapat dilihat pada Tabel 2. Secara umum, luas lahan yang akan digunakan untuk program revitalisasi mencapai 29.873ribu Ha dengan luas lahan terbesar berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 11.100 Ha. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, program ini akan mampu memberikan lapangan kerja baru bagi sekitar 15 ribu KK.

Tabel 2. Potensi Luas Lahan dan Jumlah Petani Menurut Kab./Kota (dalam Ton)

NO	KABUPATEN	LUAS (Ha)	PETANI (KK)
1	Kabupaten Rokan Hulu	5.236	2.610
2	Kabupaten Kampar	450	220
3	Kabupaten Pelalawan	11.100	5.550
4	Kabupaten Kuantan Singingi	802	499
5	Kabupaten Indragiri Hulu	1.600	800
6	Kabupaten Indragiri Hilir	2.570	1.285
7	Kabupaten Siak	5.000	2.500
8	Kabupaten Bengkalis	2.116	1.086
9	Kabupaten Rokan Hilir	1.000	500
Jumlah		29.873,50	15.050,00

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Sementara itu, sebagian besar peremajaan kebun tersebut ditujukan untuk peningkatan produksi tanaman kelapa sawit dengan luas lahan mencapai 29.574 ha, sedangkan sisanya sebesar 300 ha akan digunakan untuk pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Indragiri Hilir.

II.1. Tantangan Kedepan

Permasalahan di sisi internal yang diperkirakan akan menjadi tantangan cukup serius bagi pengembangan sektor perkebunan Riau adalah terkait dengan kepemilikan lahan serta kemampuan petani dalam mengakses sumber permodalan baik yang berasal dari bank maupun lembaga keuangan non-bank disamping permasalahan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

Selain itu, di sisi eksternal, salah satu hal yang diperkirakan akan menjadi permasalahan cukup penting bagi sektor perkebunan Riau adalah isu strategis menyangkut rencana pembatasan impor *crude palm oil* terkait isu lingkungan serta adanya pergeseran tren bahan bakar nabati (BBN) yang direncanakan akan menggunakan tanaman bahan makanan seperti kedelai dan jagung oleh Uni Eropa.

Kondisi tersebut terkait dengan rancangan pertumbuhan berbasis lingkungan (*green growth*) yang dicanangkan oleh negara maju terutama Uni Eropa. Hal ini patut diwaspadai mengingat Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan ekspor CPO Provinsi Riau. Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah sebaiknya dapat melakukan inovasi melalui pengembangan industri hilir perkebunan untuk memberikan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan ekspor produk perkebunan mentah (*raw material*).

Bab 2

PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

1. Kondisi Umum

Pada triwulan III-2009, perkembangan harga yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pekanbaru, Kota Dumai, maupun secara nasional tercatat mengalami inflasi, setelah pada triwulan sebelumnya masing-masing mengalami deflasi. Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 1,70% (q-t-q), setelah mengalami deflasi sebesar 0,54% pada triwulan sebelumnya. Kota Dumai mengalami inflasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,52% (q-t-q), meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,77%. Sementara itu, secara nasional juga tercatat mengalami peningkatan sehingga mengalami inflasi sebesar 2,07% (q-t-q), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,15%.

Secara umum, peningkatan harga pada triwulan III-2009 didorong oleh perayaan hari besar keagamaan laporan yaitu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan tersebut telah mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat terutama konsumsi terhadap kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok makanan jadi dan kelompok transportasi. Namun demikian, peningkatan harga masih relatif terkendali karena ketersediaan stok yang mencukupi. Selain itu,

memasuki tahun ajaran baru bagi sekolah-sekolah dan akademi/ perguruan tinggi selama triwulan laporan diperkirakan turut memberikan tekanan terhadap peningkatan harga khususnya pada kelompok pendidikan.

2. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pekanbaru pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 1,70% (q-t-q), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,54%, namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,17%. Sementara itu, Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 3,52% (q-t-q), meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,77%, maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu inflasi sebesar 3,04%. Secara nasional, pada triwulan laporan terjadi inflasi sebesar 2,07% (q-t-q), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,15%, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,88%.

Pada bulan September 2009, secara bulanan (m-t-m) seluruh kota di Sumatera tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang. Kota Dumai berada di urutan ke 5 dan Kota Pekanbaru berada di urutan ke 14 dari 16 Kota yang disurvei oleh BPS di Wilayah Sumatera. Namun demikian berdasarkan indeksnya, Kota Bandar Lampung masih tetap memiliki indeks tertinggi, sementara Kota Batam tercatat memiliki indeks terendah, sedangkan Kota Pekanbaru berdasarkan indeksnya menjadi di urutan ke 15, dan Kota Dumai tetap berada di urutan ke 4 dari 16 kota dimaksud.

Tabel 2.1. Perbandingan IHK dan Inflasi Bulan September 2009 di Kota-Kota Wilayah Sumatera

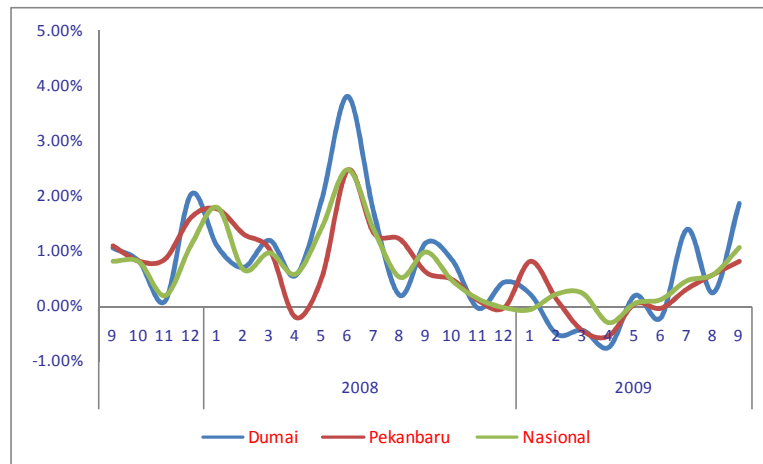
No.	Berdasarkan Inflasi		Berdasarkan IHK	
	Kota	Inflasi	Kota	IHK
1	Bandar Lampung	2.66	Bandar Lampung	123.55
2	Lhokseumawe	2.28	Pangkal Pinang	120.96
3	Sibolga	1.96	Bengkulu	120.58
4	Bengkulu	1.87	Dumai	120.56
5	Dumai	1.86	Lhokseumawe	119.20
6	Banda Aceh	1.82	Sibolga	118.91
7	Padang	1.56	Banda Aceh	118.86
8	Pangkal Pinang	1.51	Palembang	117.77
9	Padang Sidempuan	1.45	Tanjung Pinang	117.74
10	Palembang	1.29	Padang	117.72
11	Batam	1.27	Padang Sidempuan	117.32
12	Medan	1.20	Jambi	116.86
13	Jambi	0.95	Pematang Siantar	116.67
14	Pekanbaru	0.81	Medan	116.38
15	Pematang Siantar	0.80	Pekanbaru	114.70
16	Tanjung Pinang	0.70	Batam	112.53

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Meningkatnya indeks harga selama triwulan III-2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh adanya perayaan hari besar keagamaan yaitu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan September 2009, baik di Kota Pekanbaru, Dumai, maupun secara nasional. Meningkatnya konsumsi masyarakat terutama pada kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok makanan jadi maupun kelompok transportasi telah mendorong meningkatnya harga-harga beberapa komoditas pada kelompok tersebut. Kebutuhan anak sekolah dan mahasiswa terkait dengan memasuki tahun ajaran baru juga menjadi pendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dari kelompok pendidikan dimaksud.

Namun demikian peningkatan harga yang terjadi selama triwulan laporan masih relatif terkendali dibandingkan dengan peningkatan harga untuk *moment* yang sama pada periode-periode sebelumnya. Terkendalnya peningkatan harga yang terjadi pada hampir semua kelompok barang dan jasa disebabkan oleh ketersediaan stok barang dan jasa yang cukup di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai selama triwulan laporan.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Pekanbaru, Dumai dan Nasional (M-t-M)



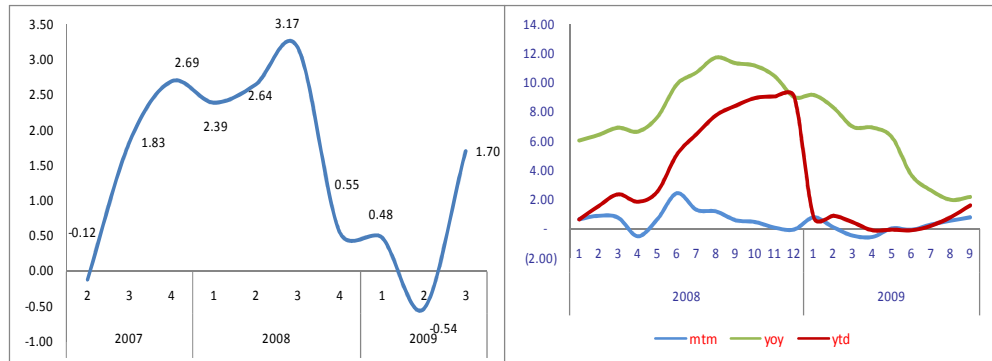
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau melalui rekomendasi kepada Pemda dan instansi terkait, agar melakukan langkah-langkah untuk menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi juga telah memberikan hasil yang positif, yang tercermin dari berkurangnya tekanan terhadap inflasi meskipun pada periode laporan terdapat perayaan hari besar keagamaan dan memasuki tahun ajaran baru bagi sekolah-sekolah dan akademi/perguruan tinggi. Selain itu, peningkatan harga yang terjadi selama triwulan laporan masih merupakan koreksi harga dari akhir triwulan I-2009 sampai dengan triwulan II-2009 yang lalu yang cenderung mengalami deflasi.

2.1. Inflasi Kota Pekanbaru

Secara tahunan (y-o-y), inflasi Kota Pekanbaru pada bulan September 2009 tercatat sebesar 2,20%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi bulan Agustus yaitu sebesar 2,00%, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada bulan Juli yang mencapai 2,64%. Secara bulanan (m-t-m), inflasi Kota Pekanbaru masih berada pada tingkat yang cukup rendah, pada bulan Juli, Agustus dan September terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,31%, 0,57%, dan 0,81%.

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Pada bulan Juli 2009, Kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 0,31% yang didominasi oleh peningkatan pada kelompok bahan makanan dengan andil 0,27%, kelompok makanan jadi dengan andil 0,03%, dan kelompok sandang dengan andil 0,01%. Komoditas yang mendominasi terjadinya inflasi adalah cabe merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih, rokok kretek dan lain-lain. Peningkatan harga pada kelompok bahan makanan ini memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan inflasi Kota Pekanbaru, yaitu membentuk 87,21% terhadap inflasi pada bulan Juli 2009. Peningkatan harga-harga pada kelompok bahan makanan terutama subkelompok bumbu-bumbuan pada bulan Juli 2009 diperkirakan masih merupakan koreksi harga dari bulan-bulan sebelumnya yang cenderung mengalami deflasi sejak awal tahun 2009 yang lalu.

Sementara itu, deflasi hanya terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yaitu sebesar 0,02%, namun tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat harga di Kota Pekanbaru pada bulan Juli 2009. Komoditas yang memberikan sumbangan tertinggi dalam meredam inflasi adalah beras, minyak goreng, emas perhiasan, dan lain-lain. Penurunan harga yang terjadi pada komoditas beras disebabkan oleh kecukupan stok beras yang pada bulan Juli 2009 yang lalu stoknya diperkirakan akan cukup sampai dengan 6 (enam) bulan kemudian.

Pada bulan Agustus 2009, inflasi Kota Pekanbaru yaitu menjadi 0,57% (m-t-m). Inflasi terjadi pada semua kelompok barang dan jasa dengan peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yaitu sebesar 2,05%. Namun demikian, inflasi utamanya disumbang oleh peningkatan pada kelompok

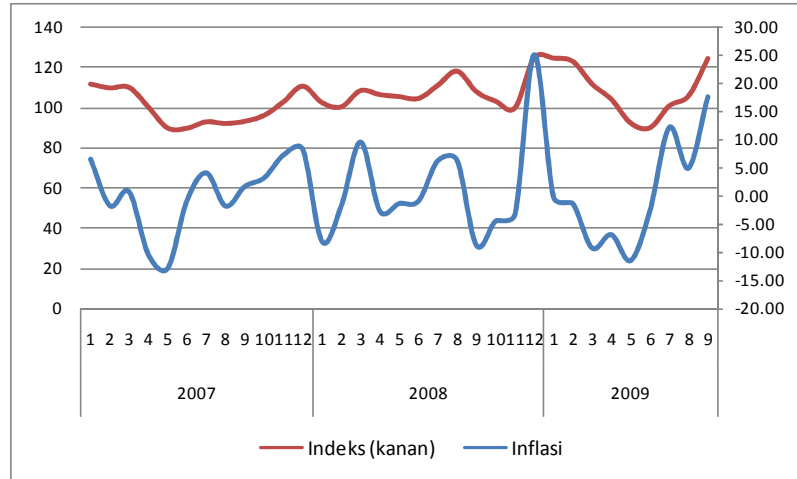
bahan makanan dengan andil 0,21%, diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau dan kelompok pendidikan, rekreasi, & olahraga dengan andil masing-masing sebesar 0,12%. Komoditas yang mendominasi terjadinya inflasi pada triwulan laporan antara lain rokok kretek, cabe merah, telur ayam ras, biaya akademi/perguruan tinggi, gula pasir, semen dan lain-lain.

Peningkatan kelompok barang dan jasa pada bulan Agustus 2009, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat terkait dengan Bulan Ramadhan dan persiapan Hari Raya. Sementara peningkatan pada kelompok pendidikan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa untuk sekolah dan akademi/perguruan tinggi terkait dengan tahun ajaran baru.

Selanjutnya, pada bulan September 2009 semua kelompok barang dan jasa juga mengalami inflasi yaitu sebesar 0,81%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan (2,03%) dan kelompok sandang (1,75%). Kedua kelompok ini juga memberikan sumbangan tertinggi dalam pembentukan inflasi di Kota Pekanbaru yaitu masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,49% dan 0,13%. Secara umum, kelompok bahan makanan mempunyai peran 60,49% dan kelompok sandang 16,05% dalam pembentukan inflasi Kota Pekanbaru bulan September 2009.

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan inflasi antara lain cabe merah, gula pasir, emas perhiasan, wortel, baju muslim, pertamax, angkutan antara kota dan lain-lain. Sementara itu, komoditas bawang merah, telur ayam ras, ikan teri, dan minyak goreng pada bulan September 2009 tercatat mengalami deflasi. Seperti pada bulan sebelumnya, peningkatan tersebut didorong oleh konsumsi terkait dengan perayaan Hari Raya pada bulan laporan. *Moment* tersebut juga telah mendorong peningkatan arus angkutan baik dalam kota maupun antar kota yang pada akhirnya mendorong peningkatan harga tiket angkutan dimaksud.

Grafik 2.3. Perkembangan Indeks dan Inflasi Pada Subkelompok Bumbu-bumbuan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Tabel 2.2. Sepuluh Komoditas yang Memberikan Sumbangan Tertinggi Dalam Pembentukan Inflasi Kota Pekanbaru

No.	Juli		Agustus		September	
	Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Cabe Merah	0.10	Rokok Kretek Filter	0.06	Cabe Merah	0.44
2	Bawang Merah	0.10	Cabe Merah	0.06	Gula Pasir	0.08
3	Telur Ayam Ras	0.05	Telur Ayam Ras	0.05	Emas Perhiasan	0.05
4	Daging Ayam ras	0.03	Akademi/Perguruan Tinggi	0.04	Wortel	0.04
5	Bawang Putih	0.03	Serai	0.04	Cabe Hijau	0.03
6	Pepaya	0.02	Bawang Putih	0.04	Bawang Putih	0.03
7	Kentang	0.02	Gula pasir	0.04	Cabe Rawit	0.03
8	Rokok Kretek	0.02	Ikan Tongkol	0.04	Baju Muslim	0.03
9	Buncis	0.02	Sewa Rumah	0.04	Pertamax	0.02
10	Serai	0.02	Semen	0.02	Angkutan Antar Kota	0.02

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka pada triwulan III-2009 terjadi inflasi sebesar 1,70% (q-t-q), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,54%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,17%. Secara keseluruhan, selama triwulan III-2009 terjadi inflasi pada semua kelompok barang dan jasa. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan (4,06%), diikuti oleh kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga (2,08%), kelompok sandang (1,94%), dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (1,24%).

Tabel 2.3. Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa di Kota Pekanbaru
Triwulan III-2009

NO	KELOMPOK	Juli		Agustus		September		Tw III 09
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Inflasi
1.	Bahan Makanan	0.27	1.12	0.21	0.86	0.48	2.03	4.06
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0.03	0.15	0.12	0.62	0.10	0.47	1.24
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.00	-0.02	0.08	0.37	0.03	0.15	0.50
4.	Sandang	0.01	0.11	0.01	0.08	0.13	1.75	1.94
5.	Kesehatan	0.00	0.04	0.03	0.64	0.00	0.05	0.73
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0.00	0.03	0.12	2.05	0.00	0.00	2.08
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.00	0.02	0.01	0.06	0.06	0.40	0.48
UMUM		0.31		0.57		0.81		1.70

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Selama triwulan laporan, inflasi pada kelompok bahan makanan, utamanya disebabkan oleh peningkatan pada subkelompok bumbu-bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 38,46%, diikuti subkelompok sayur-sayuran sebesar 4,90%, serta subkelompok ikan segar dan subkelompok telur, susu & hasilnya masing-masing sebesar 3,69% dan 2,68%. Sementara itu, subkelompok minyak & lemak serta subkelompok padi, umbi dan hasilnya mengalami deflasi masing-masing sebesar 2,09% dan 1,82%, diikuti subkelompok ikan diawetkan sebesar 1,72%, dan subkelompok kacang-kacangan sebesar 0,18%.

Penurunan harga pada subkelompok ini berasal dari penurunan harga pada komoditas minyak goreng dan beras. Penurunan harga pada komoditas minyak goreng ini terkait dengan adanya program "*Minyakita*" yang distribusinya menggunakan pola CSR. Ketersediaan "*Minyakita*" mencapai 45 ton/bulan, sementara kebutuhan minyak goreng di Riau mencapai 1.750 ton/bulan. Penjualan "*Minyakita*" ini dilakukan untuk mengeliminasi peredaran minyak curah yang proses penyaringannya belum higienis (kandungan *oleinnya* masih cukup tinggi), selain itu juga untuk mengurangi tekanan harga pada komoditas minyak goreng di pasaran.

Sementara itu, deflasi yang terjadi pada komoditas beras terkait dengan ketersediaan stok beras di Bulog serta penyalurannya yang berjalan lancar. Sampai dengan triwulan laporan, rata-rata penyaluran raskin di Provinsi Riau sebesar 5.937 ton/bulan, dengan persediaan beras sampai dengan awal September 2009 mencapai 15.811 ton atau diperkirakan akan cukup sampai dengan 2 (dua) bulan

ke depan. Realisasi penyaluran raskin di Provinsi Riau sampai dengan awal September 2009 telah mencapai 64,52%, dengan jumlah RTS sekitar 270.088. Namun demikian, realisasi penyaluran raskin pada bulan berjalan telah mencapai 86,03%, dan hanya raskin di Kota Dumai yang realisasi penyalurannya telah mencapai 100%.

Tabel 2.4. Realisasi Penyaluran Raskin di Kab./Kota Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Pagu Raskin Tahun 2009		Realisasi s.d. 1-Sep-09	% Terhadap	
		12 Bulan (kg)	1 Bulan (kg)		Bulan Berjalan	Tahun 2009
1	Kota Pekanbaru	3,159,900	263,325	2,129,475	89.85	67.39
2	Kab. Pelelawan	2,214,360	184,530	1,355,940	81.65	61.23
3	Kota Dumai	1,521,180	126,765	1,140,885	100.00	75.00
4	Kabu. Rokan Hilir	4,604,040	383,670	3,076,290	89.09	66.82
5	Kab. Bengkalis	7,191,900	599,325	4,851,165	89.94	67.45
6	Kab. Siak	2,527,740	210,645	1,788,885	94.36	70.77
7	Kab. Indragiri Hilir	9,803,880	816,990	5,730,180	77.93	58.45
8	Kab. Indragiri Hulu	5,455,620	454,635	2,793,765	68.28	51.21
9	Kab. Kauntan Singingi	2,794,320	232,860	1,755,285	83.75	62.82
10	Kab. Kampar	5,599,440	466,620	4,124,595	98.21	73.66
11	Kab. Rokan Hulu	3,743,460	311,955	2,622,825	93.42	70.06
Jumlah		48,615,840	4,051,320	31,369,290	86.03	64.52

Sumber : Bulog Propinsi Riau, diolah

Kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga mengalami inflasi sebesar 2,08%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada subkelompok kursus dan pelatihan (3,82%), subkelompok pendidikan/jasa pendidikan (2,86%), subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan (1,66%). Sementara subkelompok rekreasi dan subkelompok olahraga tidak mengalami perubahan harga selama triwulan laporan. Komoditas yang memberikan sumbangan terhadap peningkatan harga pada kelompok ini antara lain biaya pendidikan akademi/perguruan tinggi, uang sekolah SLTA dan SLTP, biaya bimbingan belajar, buku pelajaran akademi/universitas, dan biaya kursus bahasa asing.

Selanjutnya, kelompok sandang mengalami inflasi 1,94% yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pada subkelompok sandang wanita (3,12%), subkelompok sandang laki-laki (2,31%) dan subkelompok barang pribadi & sandang lainnya (1,35%). Komoditas yang memberikan sumbangan terhadap peningkatan subkelompok ini antara lain baju muslim, blus, sepatu, dan lain-lain. Peningkatan yang terjadi pada kelompok ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap beberapa kebutuhan sandang tersebut yang terkait dengan perayaan hari besar keagamaan yang terjadi pada triwulan laporan.

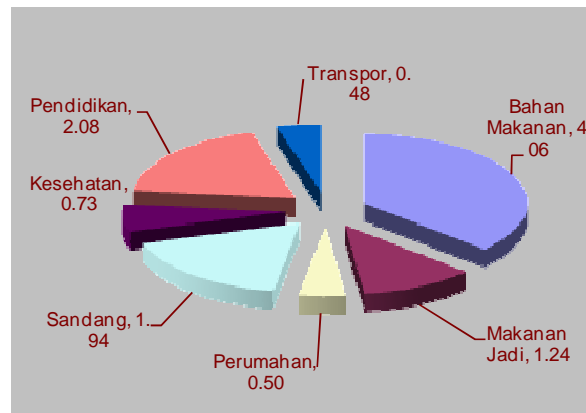
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau selama triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 1,24%, yang utamanya berasal dari peningkatan subkelompok minuman tak berakohol (3,68%), sub kelompok tembakau & minuman tak berakohol (2,41%). Komoditas yang memberikan sumbangan terhadap peningkatan harga pada kelompok ini antara lain rokok kretek filter, rokok putih, gula pasir, dan minuman ringan. Peningkatan pada komoditas gula pasir selain karena meningkatnya permintaan, juga karena pola distribusi gula pasir yang masih dikuasai oleh sekelompok orang, sehingga mereka dapat mengatur tingkat harga komoditas tersebut.

Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,73%, yang peningkatannya terjadi pada subkelompok perawatan jasmani & kosmetik (1,47%) dan subkelompok obat-obatan (1,16%). Komoditas yang memberikan sumbangan dalam pembentukan inflasi kelompok ini antara lain bedak dan parfum.

Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,50%, yang berasal dari peningkatan biaya perlengkapan rumah tangga (0,65%), biaya tempat tinggal (0,64%), dan biaya penyelenggaraan rumah tangga (0,49%). Komoditas yang memberikan sumbangan terhadap pembentukan inflasi kelompok ini antara lain tarif sewa rumah, semen, dan upah pembantu rumah tangga.

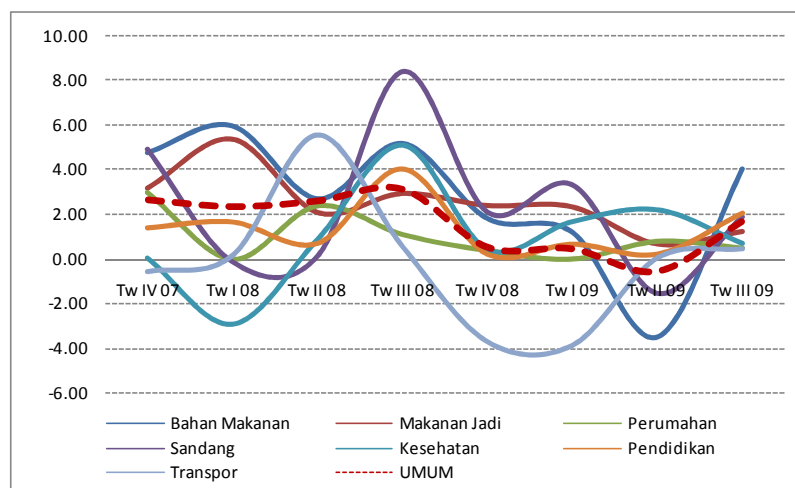
Kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan merupakan kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,48%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh peningkatan pada subkelompok transport (0,63%), subkelompok jasa keuangan (0,58%) dan subkelompok sarana penunjang transport (0,56%). Komoditas yang memberikan sumbangan dalam pembentukan inflasi kelompok ini antara lain pertamax, angkutan antar kota, harga mobil, dan tarif taxi.

Grafik 2.4. Inflasi kelompok Barang dan Jasa Tw III-2009



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

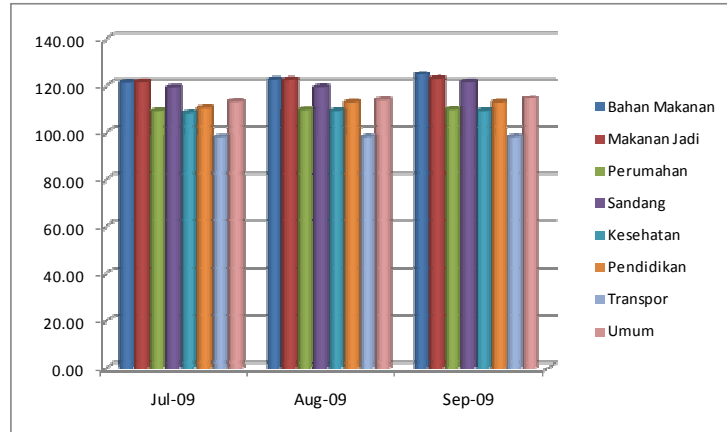
Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru Secara Triwulanan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan indeksinya, pada bulan Juli 2009 indeks tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi diikuti oleh kelompok bahan makanan. Namun demikian, pada bulan Agustus dan September terjadi pergeseran yaitu indeks dari kelompok bahan makanan tercatat merupakan yang paling tinggi diikuti oleh indeks dari kelompok makanan jadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada bulan Juli 2009 yang lalu konsumsi masyarakat utamanya masih terkonsentrasi pada kelompok makanan jadi, namun seiring memasuki perayaan hari besar keagamaan yaitu Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat lebih mengutamakan ketersediaan dari kelompok bahan makanan daripada ketersediaan dari kelompok makanan jadi.

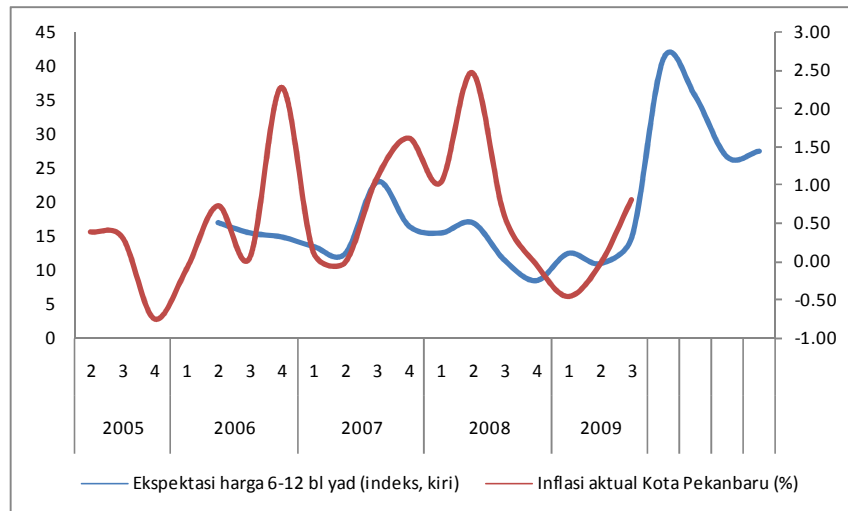
Grafik 2.6. Perkembangan Indeks Kelompok Barang dan Jasa Selama Triwulan III-2009



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Bedasarkan Survei Ekspektasi Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk wilayah sekitar Kota Pekanbaru, terlihat bahwa ekspektasi masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan inflasi di Kota Pekanbaru. Secara jangka panjang, inflasi aktual pada akhirnya akan mengikuti ekspektasi dari masyarakat.

Grafik 2.7. Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap Harga



Sumber : Survey Ekspektasi Konsumen Bank Indonesia, diolah

Menurut subkelompoknya, pada triwulan laporan subkelompok bumbu-bumbuan tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu mencapai 38,46%, diikuti subkelompok sayur-sayuran sebesar 4,90%, kursus-kursus/pelatihan sebesar 3,82%, subkelompok ikan segar sebesar 3,69%, dan subkelompok minuman tak

beralkohol sebesar 3,68%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi pada subkelompok lemak & minyak sebesar 2,09%, diikuti oleh subkelompok padi, umbi dan hasilnya sebesar 1,82%, dan deflasi terendah terjadi pada subkelompok kacang-kacangan yaitu sebesar 0,18%.

Tabel 2.5. Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Inflasi dan Deflasi pada Triwulan III-2009 di Kota Pekanbaru

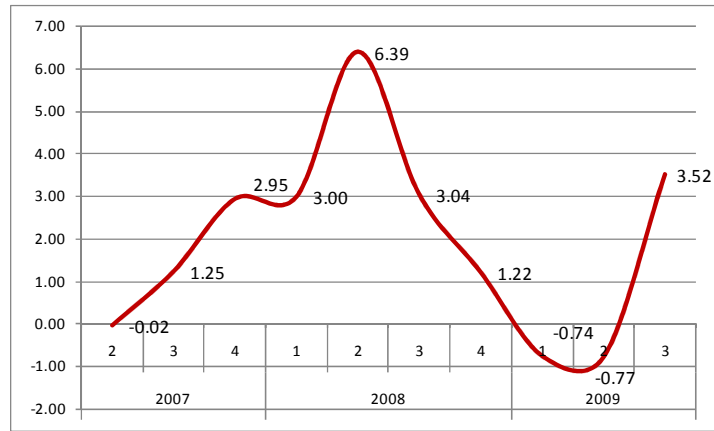
Peningkatan Harga Tertinggi			Penurunan Harga Tertinggi		
No.	Sub Kelompok	Inflasi (%)	No.	Sub Kelompok	Inflasi (%)
1	Bumbu-bumbuan	38.46	1	Lemak & Minyak	-2.09
2	Sayur-sayuran	4.90	2	Padi. Umbi dan Hasilnya	-1.82
3	Kursus-kursus/Pelatihan	3.82	3	Ikan Diawetkan	-1.72
4	Ikan Segar	3.69	4	Kacang-kacangan	-0.18
5	Minuman tak beralkohol	3.68			
6	Sandang Wanita	3.12			
7	Pendidikan / Jasa Pendidikan	2.86			
8	Telur. Susu & Hasilnya	2.68			
9	Buah-buahan	2.57			
10	Tembakau & Mnman Beralkohol	2.41			

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

2.2. Inflasi Kota Dumai

Pada triwulan III-2009, inflasi Kota Dumai mencapai 3,52% (q-t-q) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi 0,77%, dan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,04%. Seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru, inflasi yang terjadi di Kota Dumai pada triwulan laporan diperkirakan juga masih merupakan koreksi harga dari deflasi yang terjadi sejak triwulan I-2009 yang lalu.

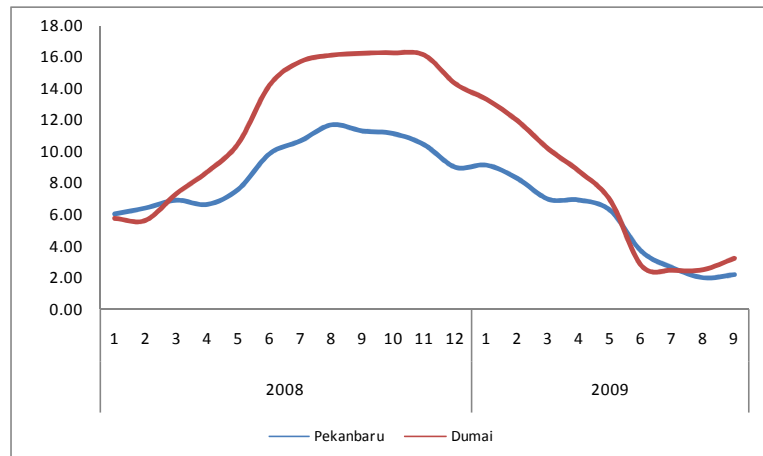
Grafik 2.8. Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Dumai



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Secara tahunan (y-o-y), inflasi Kota Dumai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh beberapa komoditas pokok yang ada di Kota Dumai seperti sayur-sayuran, ikan segar, bumbu-bumbuan, utamanya berasal dari Kota Pekanbaru, sehingga terjadi peningkatan biaya (biaya transportasi) dalam rangka pendistribusian barang-barang dimaksud. Namun demikian, beberapa komoditas lain yang sifatnya lebih tahan lama seperti beras, jenis-jenis makanan jadi, lemak dan minyak, dll, langsung masuk dari Pelabuhan Dumai yang utamanya berasal dari Sumatera Utara.

Grafik 2.9. Perkembangan Inflasi Kota Pekanbaru dan Dumai (yoy)

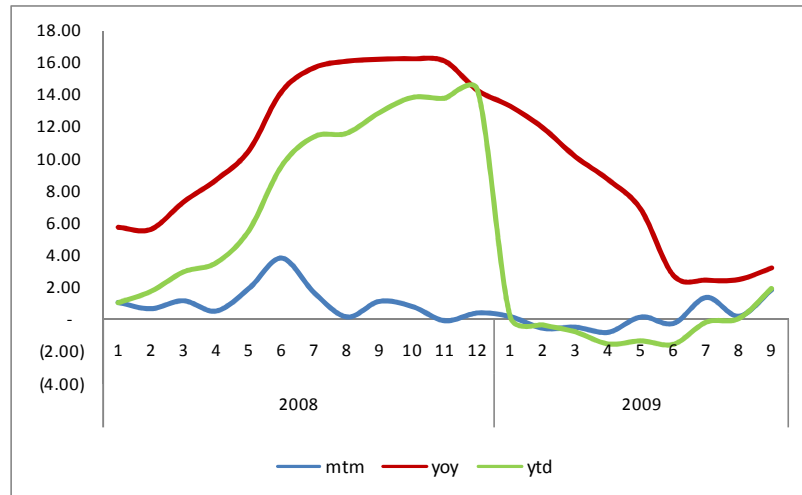


Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Secara tahunan, inflasi Kota Dumai pada bulan September 2009 sebesar 3,22%, mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya yang mencapai 16,24%. Inflasi Kota Dumai masih menunjukkan tingkat yang rendah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Selama triwulan laporan, secara bulanan (m-t-m) inflasi tertinggi terjadi pada bulan September 2009 yaitu mencapai 1,86%.

Grafik 2.10. Perkembangan Inflasi Kota Dumai



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Pada bulan Juli 2009 (m-t-m), inflasi Kota Dumai tercatat sebesar 1,39% dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transport dan komunikasi (3,20%), diikuti oleh kelompok bahan makanan (3,17%), serta kelompok kesehatan dan pendidikan yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,28% dan 0,09%. Berdasarkan subkelompoknya, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok sayur-sayuran (22,39%), diikuti oleh subkelompok bumbu-bumbuan dan subkelompok transport yang masing-masing mencapai 9,43%, dan 5,10%. Peningkatan pada subkelompok sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan diperkirakan masih merupakan koreksi harga sejak awal tahun 2009 yang lalu .

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2009 Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0,24%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman & tembakau (0,82%), diikuti oleh kelompok kesehatan (0,50%), kelompok bahan makanan dan kelompok sandang, masing-masing sebesar 0,43% dan 0,05%. Berdasarkan subkelompoknya, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok buah-buahan (6,81%), diikuti oleh subkelompok bumbu-bumbuan (5,15%), subkelompok ikan segar (2,55%), subkelompok telur, susu & hasilnya (2,31%),

serta subkelompok tembakau & minuman berakohol (2,17%). Peningkatan pada subkelompok ini diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat terkait dengan bulan Ramadhan.

Pada bulan September 2009, inflasi Kota Dumai mencapai 1,86% mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi terjadi utamanya didorong oleh peningkatan pada kelompok transport & komunikasi (4,99%), diikuti oleh kelompok bahan makanan (2,80%), dan kelompok sandang (0,65%). Berdasarkan subkelompoknya peningkatan tertinggi terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan (29,91%), subkelompok transport (7,72%), ikan segar (3,61%), dan buah-buahan 2,13%. Peningkatan permintaan barang dan jasa pada bulan September sangat terkait dengan Hari Raya, sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas bahan makanan dan makanan jadi. Sementara, peningkatan arus transportasi dari dan ke Kota Dumai sebelum dan sesudah Hari Raya juga diperkirakan telah mendorong peningkatan pada subkelompok transport.

Tabel 2.6. Perkembangan Inflasi Kota Dumai

NO	KELOMPOK	Juli	Agustus	September	Tw III 09
1.	Bahan Makanan	3.17	0.43	2.80	6.53
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	-0.11	0.82	0.61	1.32
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0.02	-0.17	0.16	-0.04
4.	Sandang	-0.09	0.05	0.65	0.61
5.	Kesehatan	0.28	0.50	0.02	0.80
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0.09	-0.11	-0.03	-0.04
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	3.20	-0.12	4.99	8.22
	UMUM	1.39	0.24	1.86	3.52

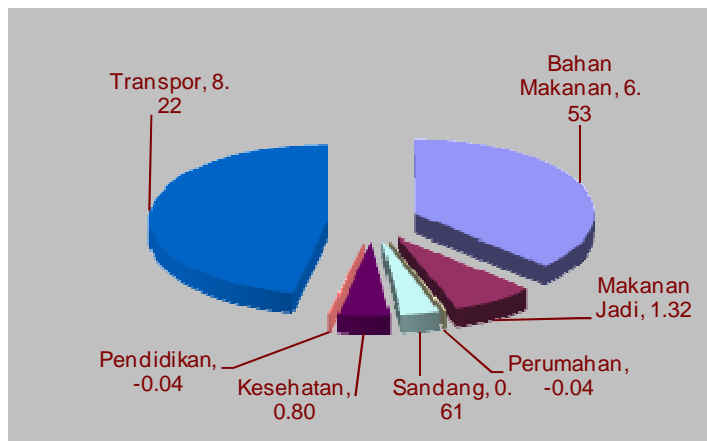
Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka pada triwulan laporan inflasi Kota Pekanbaru mencapai 3,52%. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok transport & komunikasi (8,22%), dengan subkelompok transport mengalami peningkatan tertinggi (13,08%). Peningkatan ini terkait dengan peningkatan arus lalu lintas sebelum dan sesudah Hari Raya yang lalu. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok bahan makanan (6,53%), dengan subkelompok bumbu-bumbuan mengalami inflasi tertinggi (49,47%), yang disebabkan oleh meningkatnya

permintaan menjelang Ramadhan dan Hari Raya dan peningkatan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (1,32%) yang utamanya berasal dari peningkatan pada subkelompok minuman tak beralkohol (2,26%) dan tembakau & minuman beralkohol (2,78%).

Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok perumahan dan kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga (masing-masing 0,04%). Diperkirakan kondisi ini terjadi karena kurangnya ketersediaan jasa pendidikan di Kota Dumai dibandingkan dengan Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat di Kota Dumai lebih banyak menggunakan jasa pendidikan di kota lain.

Grafik 2.11. Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa
Triwulan III-2009



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan selama triwulan laporan peningkatan harga tertinggi terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan (49,47%) diikuti oleh subkelompok transport (13,08%), subkelompok buah-buahan dan subkelompok ikan segar (masing-masing 8,27%), serta subkelompok sayur-sayuran (6,03%). Sementara itu, subkelompok yang mengalami penurunan harga tertinggi adalah subkelompok lemak & minyak (2,44%), subkelompok komunikasi & pengiriman (2,41%), subkelompok penyelenggaraan rumah tangga (1,14%), subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan (0,30%), serta subkelompok bahan bakar, penerangan & air (0,03%).

Tabel 2.7. Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Perubahan Harga Tertinggi dan Terendah Selama Triwulan III-2009 di Kota Dumai

Peningkatan Harga Tertinggi			Penurunan Harga Tertinggi		
No.	Sub Kelompok	Inflasi (%)	No.	Sub Kelompok	Inflasi (%)
1	Bumbu-bumbuan	49.47	1	Lemak & Minyak	-2.44
2	Transport	13.08	2	Komunikasi & Pengiriman	-2.41
3	Buah-buahan	8.27	3	Penyelenggaraan Ruta	-1.14
4	Ikan Segar	8.27	4	Perlengkapan/peralatan Penddkan	-0.30
5	Sayur-sayuran	6.03	5	Bahan Bakar. penerangan & Air	-0.03
6	Tembakau & Mnman Beralkohol	2.78			
7	Telur. Susu & Hasilnya	2.60			
8	Minuman tak beralkohol	2.26			
9	Perawatan Jasmani & Kosmetik	1.46			
10	Ikan Diawetkan	1.43			

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Bab 3

PERKEMBANGAN DAERAH

1. Kondisi Umum

Kondisi moneter dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari penurunan dana pihak ketiga (DPK) secara *agregat* sebagai akibat dari penurunan dana milik Pemda di perbankan pada triwulan laporan. Penurunan ini telah mendorong penurunan aset perbankan, meskipun terjadi peningkatan penyaluran kredit selama triwulan laporan.

Selama triwulan laporan, tercatat bahwa Bank Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan BI-Rate dari 7,00% menjadi 6,50%. Penurunan BI-Rate ini didasarkan pada perkembangan perekonomian global yang sudah mengindikasikan proses

pemulihan, ekspektasi yang positif terhadap perekonomian dunia menimbulkan sentimen positif pada pelaku pasar keuangan, sehingga mendorong peningkatan arus modal masuk ke Indonesia. Di sektor keuangan, secara nasional stabilitas sistem perbankan nasional tetap terjaga dengan CAR yang masih cukup tinggi dan NPL masih berada pada batas aman serta respon suku bunga perbankan terhadap penurunan BI Rate juga sudah mulai membaik. Selain itu, tren penurunan inflasi masih berlanjut seiring dengan masih terbatasnya permintaan domestik dan terus menurunnya ekspektasi inflasi.

Sementara itu, risiko kredit perbankan mengalami sedikit penurunan kualitasnya yang tercermin dari meningkatnya jumlah kredit bermasalah dan rasio *Non Performing Loans* (NPLs), yaitu dari 2,76% pada triwulan II-2009 menjadi 2,80% pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit yang diikuti oleh penurunan dana telah menyebabkan meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan selama triwulan laporan dari 66,03% pada triwulan II-2009 menjadi 73,20% pada triwulan III-2009, sedangkan dari sisi jaringan kantor selama triwulan laporan terdapat penambahan jaringan kantor sebanyak 21 kantor.

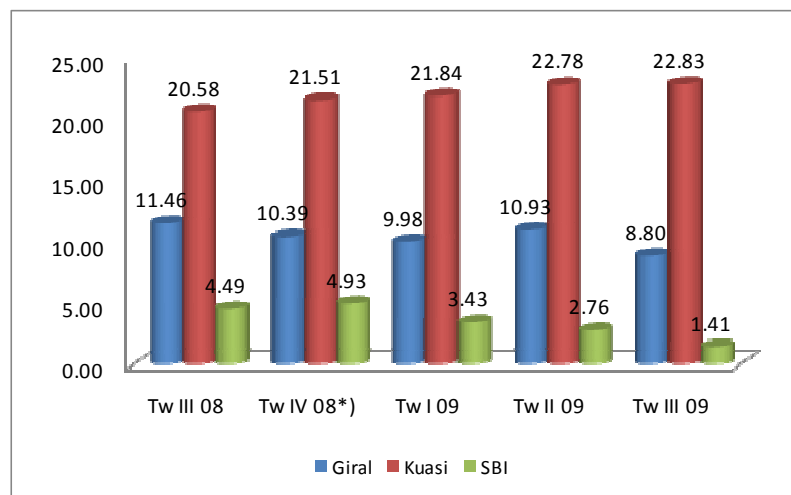
2. Perkembangan Moneter

Dalam triwulan laporan, kondisi moneter di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, yang tercermin dari menurunnya indikator-indikator moneter (uang beredar). Uang giral mengalami penurunan yang cukup berarti, sementara uang kuasi (tabungan dan deposito) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan jumlah uang beredar mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, jumlah uang giral mengalami penurunan sebesar 19,47% yaitu dari Rp10,92 triliun menjadi Rp8,80 triliun. Penurunan ini seiring dengan menurunnya giro milik Pemda di perbankan Riau. Di sisi lain, uang kuasi mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,21% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp22,78 triliun menjadi Rp22,83 triliun yang utamanya didorong oleh peningkatan komponen tabungan.

Perkembangan tersebut telah mendorong menurunnya total dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) yang merupakan komponen dari uang beredar yaitu dari Rp33,71 triliun menjadi Rp31,63 triliun atau menurun sebesar 6,17%. Sementara itu, posisi penanaman dalam bentuk SBI juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari Rp2,76 triliun menjadi Rp1,41 triliun (48,93%), seiring dengan *trend* penurunan BI-Rate selama triwulan laporan.

Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giro dan SBI di Provinsi Riau (triliun rupiah)



*) angka koreksi

3. Perkembangan Perbankan

Kondisi perbankan di Provinsi Riau pada triwulan laporan masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari masih menurunnya jumlah aset, yang didorong oleh menurunnya dana yang dihimpun perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sedangkan jaringan kantor perbankan masih mengalami penambahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3.1. Bank Umum

3.1.1. Jaringan Kantor

Tabel 3.1. Perkembangan Bank di Propinsi Riau

Keterangan	Periode	
	Tw II 09	Tw III 09
1. Jumlah Bank	40	40
- Pemerintah	6	6
- Swasta	24	24
- Asing	2	2
- Syariah	3	3
- Unit Usaha Syariah	5	5
2. Kantor Pusat	1	1
3. Kantor Cabang	70	71
- Pemerintah	38	39
- Swasta	30	30
- Asing*)	2	2
4. Kantor Cab.Pembantu	260	278
- Pemerintah	150	157
- Swasta	110	121
- Asing	-	-
5. Kantor Kas	35	37
- Pemerintah	24	25
- Swasta	11	12
6. Lainnya *)	79	79
	445	466

*) Payment point, VOA, RCR, Kantor Layanan Syariah, Gerai, Kas Mobil

dibawah Kantor Cabang tidak lagi digunakan. Oleh karena itu, kantor BRI Unit dan Danamon Simpan Pinjam (DSP) telah dimasukkan dalam kategori Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Perluasan jaringan kantor bank umum di Provinsi Riau pada periode yang akan datang diperkirakan masih akan berlanjut. Potensi dan perkembangan ekonomi di Provinsi Riau yang cukup pesat merupakan daya tarik bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya. Penyebaran kantor bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2. masih terpusat di Kota Pekanbaru, sedangkan di beberapa kabupaten lainnya jumlah kantor yang beroperasi masih relatif terbatas, meskipun dalam beberapa triwulan terakhir jaringan kantor di beberapa kota/kabupaten di luar Pekanbaru juga mengalami perkembangan.

Jumlah bank umum yang beroperasi di Provinsi Riau pada triwulan laporan masih tetap berjumlah 40 bank, sedangkan jumlah kantor bank bertambah sebanyak 21 kantor yaitu dari 445 kantor menjadi 466 kantor. Peningkatan terjadi pada Kantor Cabang bank milik pemerintah, Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Kas bank milik pemerintah dan swasta.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sejak Januari 2009 istilah kantor

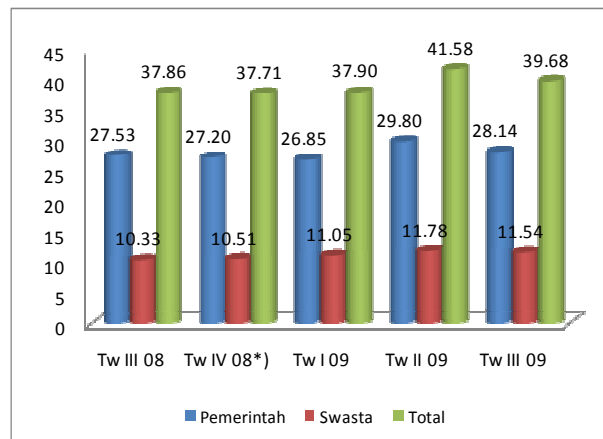
Tabel 3.2. Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau (September 2009)

No.	Kab./Kota	Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota				
		KP	KC	KCP	KK	Lainnya
1	Pekanbaru	1	43	91	17	32
2	Bengkalis	-	7	35	4	12
3	Dumai	-	6	12	2	7
4	Indragiri Hulu	-	4	17	6	4
5	Indragiri Hilir	-	3	18	-	4
6	Kampar	-	2	25	1	3
7	Kuantan Singingi	-	1	13	2	3
8	Pelalawan	-	1	18	-	3
9	Rokan Hulu	-	1	14	1	2
10	Rokan Hilir	-	2	12	1	2
11	Siak	-	1	23	3	7
Total		1	71	278	37	79

3.1.2. Perkembangan Aset

Total aset bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp39,68 triliun, menurun sebesar Rp1,90 triliun atau 4,57% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan terjadi pada kelompok bank milik pemerintah maupun kelompok bank milik swasta yaitu masing-masing sebesar 5,60% dan 1,99%. Penurunan aset ini didorong oleh menurunnya penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan, baik pada kelompok bank milik pemerintah maupun kelompok bank milik swasta, meskipun penyaluran kredit oleh perbankan masih menunjukkan peningkatan.

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Provinsi Riau (triliun rupiah)



*) angka koreksi

3.1.3. Kredit

Jumlah kredit yang disalurkan pada triwulan laporan masih terus menunjukkan peningkatan termasuk penyaluran kredit kepada UMKM. Jumlah *Undisbursed Loan* juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun masih berada pada tingkat yang cukup tinggi.

3.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Posisi kredit yang disalurkan oleh bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp23,15 triliun atau meningkat 4,02% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok bank pemerintah sebesar 4,13% dari Rp15,76 triliun menjadi Rp16,41 triliun, sedangkan kredit pada kelompok bank swasta meningkat sebesar 3,78% yaitu dari Rp6,50 triliun menjadi Rp6,74 triliun.

Dilihat dari jenis valutenya, kredit dalam mata uang rupiah tumbuh sebesar 4,77%, yaitu dari Rp20,84 triliun menjadi Rp21,83 triliun, sedangkan kredit dalam valuta asing mengalami penurunan sebesar 6,89% dari Rp1,42 triliun menjadi Rp1,32 triliun. Menurunnya penyaluran kredit dalam valuta asing diperkirakan karena semakin stabilnya nilai tukar rupiah selama triwulan laporan. Pangsa kredit rupiah dan valas terhadap total kredit masing-masing sebesar 94,29% dan 5,71%.

Tabel 3.3. Posisi Kredit Di Provinsi Riau (juta rupiah)

Keterangan	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
A. Kelompok Bank					
1. Bank Pemerintah	13,769,178	14,005,385	14,597,112	15,760,241	16,410,454
2. Bank Swasta	6,287,292	6,343,095	6,137,804	6,497,498	6,742,996
B. Valuta					
1. Rupiah	18,539,476	18,696,817	19,061,239	20,838,352	21,831,824
2. Valas	1,516,994	1,651,663	1,673,677	1,419,387	1,321,626
C. Total	20,056,470	20,348,480	20,734,916	22,257,739	23,153,450

*) angka koreksi

3.1.3.2. Konsentrasi Kredit

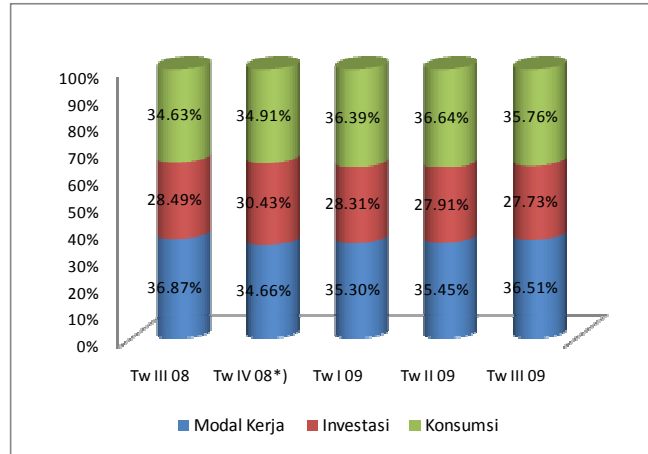
Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yaitu sebesar 7,12%, diikuti oleh kredit investasi sebesar 3,36%, dan kredit konsumsi sebesar 1,53%. Peningkatan kredit tersebut khususnya kredit investasi dan modal kerja memberikan indikasi mulai membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Riau dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kredit modal kerja meningkat dari Rp7,89 triliun menjadi Rp8,45 triliun, dan pangsaanya meningkat dari 35,45% menjadi 36,51%. Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa terbesar kredit modal kerja disalurkan kepada subsektor perdagangan eceran yaitu sebesar Rp2,79 triliun atau 32,99% dari kredit modal kerja, diikuti oleh subsektor perkebunan yaitu Rp1,40 triliun atau 16,61%, dan subsektor jasa lainnya (seperti sewa beli barang/leasing, gedung kantor, dan lain-lain) yaitu mencapai Rp832,87 miliar atau 9,85% dari kredit Modal Kerja.

Kredit investasi meningkat dari Rp6,21 triliun menjadi Rp6,42 triliun, namun pangsaanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 27,91% menjadi 27,73%. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit investasi ini disalurkan pada subsektor perkebunan, yaitu mencapai Rp2,37 triliun (36,92%) dari total kredit investasi, diikuti oleh subsektor perdagangan eceran dan subsektor industri kertas yang masing-masing sebesar Rp834,26 miliar dan Rp549,85 miliar atau dengan pangsa masing-masing sebesar 12,99% dan 8,56% dari total kredit.

Sementara itu, kredit konsumsi mengalami pertumbuhan terendah dari Rp8,15 triliun menjadi Rp8,28 triliun, dan pangsaanya mengalami penurunan dari 36,64% menjadi 35,76%. Sekitar 41,46% dari kredit konsumsi atau Rp3,43 triliun merupakan kredit yang disalurkan untuk perumahan, terutama perumahan tipe 70 kebawah. Pangsa kredit ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingginya pangsa kredit konsumsi untuk perumahan mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih cukup tinggi dan didukung oleh fenomena pasar yang menggairahkan sehingga memperoleh respon positif dari masyarakat yang relatif masih cukup memiliki daya beli baik untuk tujuan hunian maupun investasi.

Grafik 3.3. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau

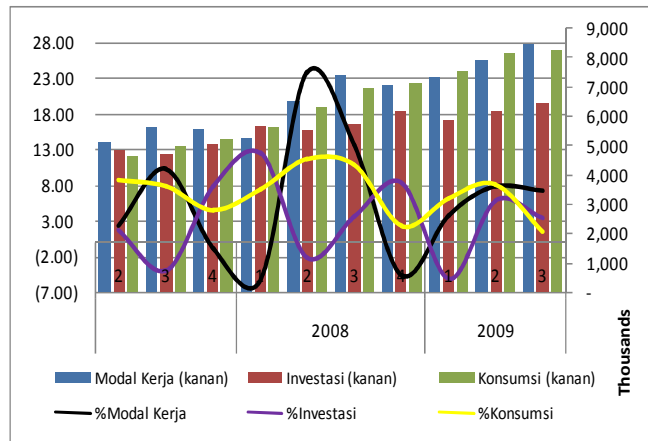


*) angka koreksi

Secara triwulanan pertumbuhan kredit konsumsi ini cenderung mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,09%. Perlambatan kredit konsumsi ini diperkirakan karena masih tingginya suku bunga kredit, sehingga untuk konsumsinya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan tambahan penghasilan yang berasal dari THR maupun lainnya. Namun demikian, kredit konsumsi tergolong stabil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang cenderung sangat *volatile*, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan kredit konsumsi selalu positif.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan yang mencapai 23,66% dari total kredit atau sebesar Rp5,48 triliun mengalami peningkatan 4,84% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp3,62 triliun (66,13%) merupakan kredit kepada subsektor perdagangan eceran. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Riau dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perdagangan pada tahun 2020 yang akan datang.

Grafik 3.4. Posisi dan Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau (Y-o-Y)



Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah pertanian yaitu sebesar Rp4,37 triliun atau mencapai 18,89% dari total kredit. Jumlah kredit pada sektor ini mengalami peningkatan sebesar 5,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp3,77 triliun (86,29%) merupakan kredit kepada subsektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada subsektor perkebunan terkait dengan besarnya skala usaha di subsektor ini seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa baik untuk kebutuhan pembukaan kebun baru maupun peremajaan (*replanting*). Pengembangan subsektor perkebunan akan memberikan pengaruh besar dalam upaya peningkatan pemerataan kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan, karena pengembangan pada subsektor ini lebih bersifat padat karya. Selanjutnya kredit yang disalurkan kepada sektor jasa mempunyai pangsa 7,69% dari total kredit, dan mengalami peningkatan 7,99% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp1,65 triliun menjadi Rp1,78 triliun.

Sementara itu, kredit kepada sektor industri tercatat mengalami penurunan sebesar 3,11% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp1,60 triliun dengan pangsa 6,89%. Penyaluran kredit kepada sektor lain-lain mengalami peningkatan sebesar 1,51% dari Rp8,17 triliun menjadi Rp8,29 triliun dengan pangsa mencapai 35,82%. Kredit pada sektor lain-lain di dalamnya termasuk kredit perumahan yaitu sebesar Rp 3,34 triliun meningkat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp3,34 triliun atau 41,39% dari total kredit sektor lain-lain.

Kredit kepada sektor konstruksi tercatat sebesar Rp1,07 triliun atau 4,61% dari total kredit, mengalami pertumbuhan sebesar 22,48% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit kepada sektor ini terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan usaha properti Provinsi Riau. Namun demikian, jumlah kredit pada sektor ini relatif kecil dibandingkan dengan perkembangan properti di Provinsi Riau, hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak *developer* yang menggunakan *self financing* dan pembiayaan lain di luar perbankan.

Tabel 3.4. Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1	Pertanian	3,919,423	3,932,236	3,828,840	4,158,900	4,374,625
2	Pertambangan	86,744	96,653	98,736	88,722	67,500
3	Perindustrian	1,661,044	1,672,153	1,650,967	1,646,813	1,595,625
4	Listrik, Gas dan Air	7,058	11,514	11,748	9,203	38,932
5	Konstruksi	931,025	817,718	761,886	871,547	1,067,470
6	Perdag., Resto. & Hotel	4,470,925	4,673,397	4,870,734	5,225,205	5,478,223
7	Pengangkutan, Pergud.	352,358	416,621	416,630	436,693	455,370
8	Jasa-jasa	1,668,944	1,610,994	1,534,564	1,649,491	1,781,217
9	Lain-lain	6,958,949	7,117,194	7,560,811	8,171,165	8,294,488
Jumlah		20,056,470	20,348,480	20,734,916	22,257,739	23,153,450

*) angka koreksi

Sementara itu, jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek¹ mencapai Rp33,99 triliun, meningkat 5,15% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank, yang berarti sebagian kegiatan usaha di Riau yaitu sebesar Rp10,83 triliun dibiayai oleh perbankan di luar Provinsi Riau. Pemberian kredit ini utamanya terjadi pada kredit berskala besar, karena terkait dengan batasan kewenangan memutus kredit oleh pemimpin kantor cabang bank di Provinsi Riau. Berdasarkan kabupaten/kota, pertumbuhan kredit lokasi proyek tertinggi terjadi di Kota Dumai yaitu mencapai 29,26% diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu sebesar

¹ Kredit yang persetujuannya berasal dari luar wilayah perbankan Riau, namun pelaksanaan proyek dari persetujuan tersebut dilaksanakan di wilayah Riau.

18,48%, sedangkan di Kabupaten Bengkalis penyerapan kredit mengalami penurunan sebesar 0,64%.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (juta rupiah)

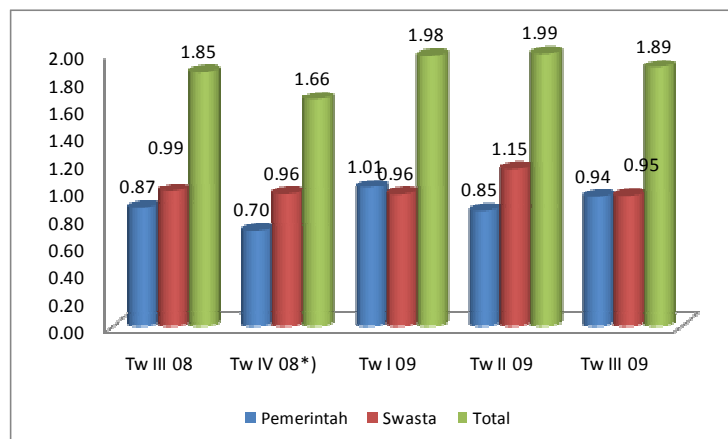
No	Kab./Kota	Lokasi Proyek di Riau				
		Tw III 08	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09*)
1	Pekanbaru	14,325,322	14,512,072	14,467,568	14,606,825	14,896,800
2	Bengkalis	1,960,533	1,972,309	2,030,110	2,059,619	2,046,540
3	Dumai	1,467,054	3,022,535	2,584,773	2,442,175	3,156,670
4	Indragiri Hilir	1,518,865	1,761,130	1,659,432	1,643,492	1,646,473
5	Indragiri Hulu	1,385,667	1,409,197	1,257,370	1,343,483	1,591,806
6	Lainnya	9,184,066	9,329,665	9,245,006	10,227,809	10,648,583
Jumlah		29,841,507	32,006,908	31,244,259	32,323,403	33,986,872

*) data sampai dengan Agustus 2009

3.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 4,95% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari Rp1,99 triliun menjadi Rp1,89 triliun. Penurunan *undisbursed loan* terjadi pada kelompok bank milik swasta yaitu sebesar 17,10% dari Rp1,15 triliun menjadi Rp994,59 miliar, sedangkan *undisbursed loan* kelompok bank pemerintah mengalami peningkatan sebesar 11,50% yaitu dari Rp846,17 miliar menjadi Rp943,50 miliar.

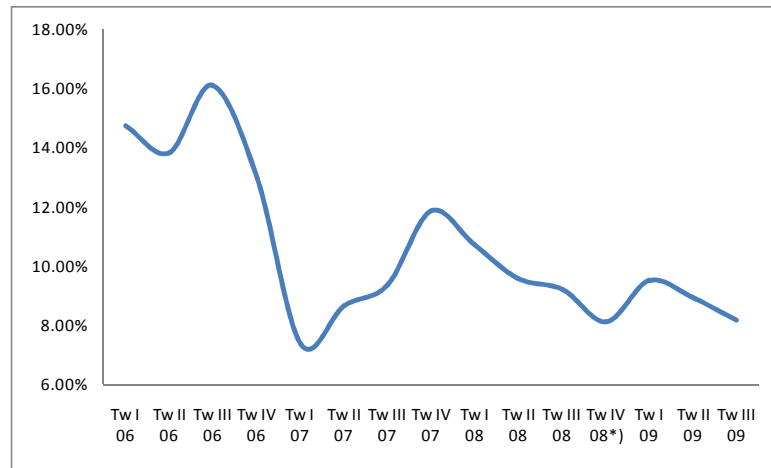
Grafik 3.5. Jumlah *Undisbursed Loan* Perbankan Provinsi Riau (triliun rupiah)



*) angka koreksi

Membbaiknya kondisi perekonomian pasca krisis ternyata belum dapat meyakinkan masyarakat untuk melakukan penarikan kredit yang telah disetujui oleh perbankan. Kondisi ini menyebabkan jumlah *undisbursed loan* perbankan masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya pembiayaan-pembiayaan di luar perbankan (*self financing* dan lembaga keuangan lainnya) dan kegiatan/proyek yang direncanakan belum berjalan sesuai rencana seperti *replanting* di sektor perkebunan. Penurunan jumlah *undisbursed loan* pada triwulan laporan telah menyebabkan *trend ratio undisbursed loan* terhadap total kredit kembali mengalami penurunan, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami sedikit peningkatan.

Grafik 3.6. Ratio *Undisbursed Loan* terhadap Total Kredit



*) angka koreksi

Berdasarkan jenis penggunaan, sebesar 85,17% dari total kredit yang belum ditarik merupakan kredit modal kerja, sementara untuk kredit investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 14,39% dan 0,44%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi 39,58% dari kredit yang belum ditarik merupakan kredit kepada sektor perdagangan, diikuti sektor pertanian sebesar 22,54%, jasa 13,15%, konstruksi 12,46%, pengangkutan 6,47% dan industri 5,28%.

Persetujuan kredit baru pada triwulan laporan sebesar Rp3,23 triliun, mengalami peningkatan sebesar 9,85% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persetujuan kredit baru pada triwulan laporan masih tetap didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 39,69% namun mengalami penurunan sebesar 11,22% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga pangasanya juga turut

mengalami penurunan. Persetujuan baru kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 78,72% menjadi sebesar Rp801,25 miliar dari Rp448,32 miliar dengan pangsa sebesar 24,36% yang juga mengalami peningkatan pangsa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan yang signifikan dari persetujuan baru kredit investasi tersebut menunjukkan adanya investasi baru di Riau yang pembiayaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, persetujuan baru kredit modal kerja mengalami peningkatan sebesar 9,94%, sehingga pangasanya juga turut mengalami sedikit peningkatan menjadi 35,95% dari total kredit persetujuan baru, sehingga jumlahnya menjadi Rp1,18 triliun dari Rp1,07 triliun pada triwulan laporan. Peningkatan persetujuan kredit baru ini diperkirakan karena masyarakat mulai membuka usaha-usaha baru, maupun perluasan usaha seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi Riau pasca krisis keuangan global yang lalu. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha baru dengan pembiayaan dari perbankan.

Tabel 3.6. Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau

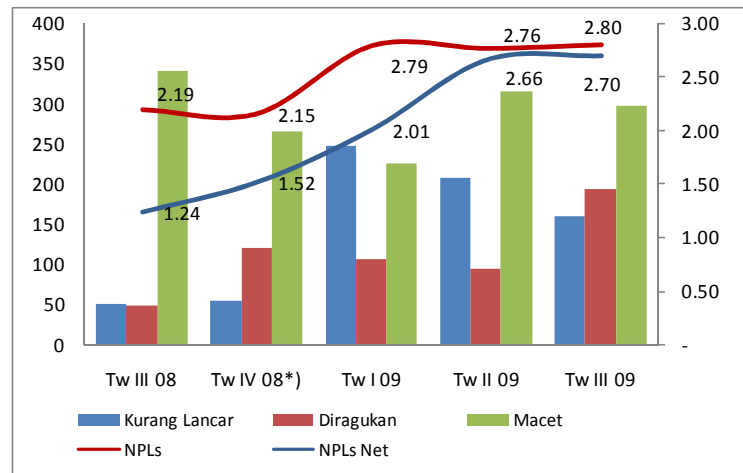
Jenis Penggunaan	Tw III 08		Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09	
	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1. Modal Kerja	2,053,289	38.05	1,087,244	38.57	862,065	34.09	1,075,409	35.92	1,182,294	35.95
2. Investasi	1,019,964	18.90	563,297	19.98	450,161	17.80	448,324	14.97	801,247	24.36
3. Konsumsi	2,322,725	43.05	1,168,539	41.45	1,216,468	48.11	1,470,403	49.11	1,305,427	39.69
Jumlah	5,395,978	100	2,819,080	100	2,528,694	100	2,994,136	100	3,288,968	100

*) angka koreksi

3.1.3.4. Kualitas Kredit

Kredit bermasalah pada triwulan laporan mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari meningkatnya *Non Performing Loans* (NPLs) dari 2,71% menjadi 2,80%. Dengan memperhitungkan pembentukan pencadangan aktiva produktif, rasio NPLs *net* perbankan pada triwulan laporan masih tetap mengalami penurunan kualitas yang tercermin dari meningkatnya NPLs Net yaitu dari 2,66% menjadi 2,70%.

Grafik 3.7. Perkembangan NPLs Gross di Provinsi Riau



*) angka koreksi

Berdasarkan sektor yang dibiayai, sektor konstruksi dan industri mempunyai NPLs tertinggi yaitu masing-masing mencapai 4,00% dan 3,92%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 3,58%, sektor pertanian sebesar 3,11%, sektor jasa dunia usaha sebesar 2,93%. Sementara itu, NPLs terendah berada pada sektor jasa sosial masyarakat dan pertambangan yaitu masing-masing sebesar 0,49%.

Tabel 3.7. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Trw III 08		Trw IV 08*)		Trw I 09		Trw II 09		Trw III 09	
		Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL	Jumlah	NPL
1	Pertanian	3,919,423	2.20%	3,932,236	2.29%	3,828,840	1.84%	4,158,900	3.32%	4,374,625	3.11%
2	Pertambangan	86,744	0.53%	96,653	0.04%	98,736	0.36%	88,722	0.37%	67,500	0.49%
3	Perindustrian	1,661,044	2.59%	1,672,153	6.71%	1,650,967	5.83%	1,646,813	4.12%	1,595,625	3.92%
4	Listrik	7,058	0.00%	11,514	0.00%	11,748	0.00%	9,203	4.97%	38,932	1.16%
5	Konstruksi	931,025	4.12%	817,718	2.31%	761,886	7.02%	871,547	4.81%	1,067,470	4.00%
6	Perdagangan	4,470,925	1.92%	4,673,397	1.58%	4,870,734	3.54%	5,225,205	3.27%	5,478,223	3.58%
7	Pengangkutan	352,358	4.00%	416,621	2.95%	416,630	3.75%	436,693	2.43%	455,370	2.47%
8	Jasa Dunia Usaha	1,452,844	4.05%	1,380,628	2.58%	1,307,612	3.71%	1,388,295	3.10%	1,527,307	2.93%
9	Jasa Sosial Masy.	216,100	5.07%	230,366	0.11%	226,952	0.23%	261,196	0.25%	253,910	0.49%
10	Lain-lain	6,958,949	1.45%	7,117,194	1.32%	7,560,811	1.60%	8,171,165	1.72%	8,294,488	1.89%
Jumlah		20,056,470		20,348,480		20,734,916		22,257,739		23,153,450	

*) angka koreksi

Berdasarkan Kabupaten/Kota, rasio NPLs tertinggi terdapat pada Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 3,51%, dan mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,47%, diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing sebesar 2,09% dan 1,70%. Selanjutnya,

NPLs Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu masing masing sebesar 1,35% dan 0,70%.

Tabel 3.8. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw III 08	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1	Pekanbaru	2.45%	2.64%	3.44%	3.47%	3.51%
2	Dumai	3.87%	2.08%	0.91%	2.55%	2.09%
3	Bengkalis	1.37%	1.07%	2.92%	1.32%	1.35%
4	Indragiri Hulu	1.43%	0.26%	1.32%	0.59%	0.70%
5	Indragiri Hilir	1.03%	0.92%	0.35%	1.25%	1.70%
6	Lainnya	0.85%	0.67%	1.04%	0.79%	0.96%

*) angka koreksi

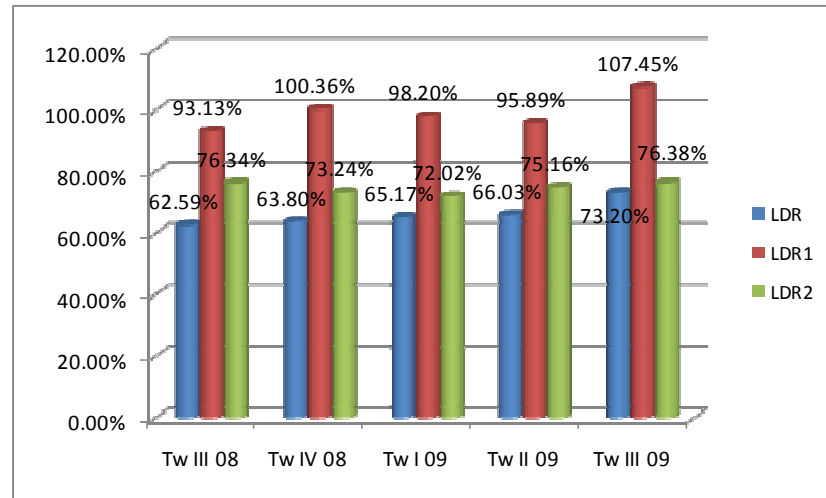
3.1.4. Intermediasi Perbankan

3.1.4.1. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan sebesar Rp31,63 triliun, menurun Rp2,08 triliun (6,17%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kepemilikan, penurunan dana didominasi oleh penurunan dana milik Pemda (25,37%), dana milik Pemerintah Pusat (44,53%), dan dana milik BUMN (40,94%). Sementara itu, dana milik perusahaan swasta, yayasan/badan sosial, dan perusahaan asuransi masing-masing meningkat sebesar 11,04%, 5,83%, dan 3,59%.

Peningkatan jumlah penyaluran kredit yang diikuti dengan menurunnya jumlah dana yang dihimpun pada triwulan laporan menyebabkan meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau yaitu dari 66,03% menjadi 73,20%. Sementara itu, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyek, LDR perbankan Riau pada triwulan laporan mencapai 107,45%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 95,89%, lebih tinggi dibandingkan dengan LDR nasional yang tercatat sebesar 76,38%.

Grafik 3.8. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



Ket : LDR1 = Rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK (data s.d Mei 2009)
LDR2 = LDR Perbankan Nasional (data s.d Agustus 2009)

3.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM mencapai Rp17,37 triliun, meningkat 4,68% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit skala kecil (Rp50 juta – Rp500 juta) yaitu sebesar 6,13%, yang juga mempunyai pangsa yang paling besar dibandingkan dengan pangsa kredit UMKM lainnya yaitu mencapai 48,09% mengalami peningkatan dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan kredit UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit mengalami peningkatan dari 74,53% menjadi 75,00%. Tingginya pangsa kredit kepada UMKM mencerminkan kepedulian perbankan di Riau dalam mendukung upaya pengembangan UMKM. Dalam kondisi ekonomi saat ini, peningkatan kredit kepada UMKM memberikan dukungan bagi penciptaan lapangan kerja baru karena kegiatan UMKM umumnya bersifat *labour intensif*.

Tabel 3.9. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (juta rupiah)

Plafon	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw II 09
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	4,313,046	4,218,941	4,437,546	4,582,529	4,724,321
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	6,450,230	6,647,201	7,051,797	7,868,187	8,350,552
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	3,910,187	3,940,897	3,803,852	4,138,815	4,291,223
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	5,383,007	5,541,441	5,441,721	5,668,208	5,787,354
Total Kredit	20,056,470	20,348,480	20,734,916	22,257,739	23,153,450
Total Kredit UMKM	14,673,463	14,807,039	15,293,195	16,589,531	17,366,096
(% terhadap Total Kredit)	73.16%	72.77%	73.76%	74.53%	75.00%

*) angka koreksi

Menurut jenis penggunaan, sebesar Rp9,09 triliun atau 52,37% dari total penyaluran kredit kepada UMKM digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi), dan sisanya disalurkan untuk kredit konsumsi. Hal ini memberikan indikasi positif bagi pengembangan beberapa sektor ekonomi yang banyak dilakukan oleh UMKM seperti perdagangan, pertanian dan jasa.

Tabel 3.10. Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Tw III 08		Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09	
	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1. Modal Kerja	5,067,953	34.54	5,123,740	34.60	5,173,656	33.83	5,676,254	34.22	6,071,543	34.96
2. Investasi	2,666,931	18.18	2,600,240	17.56	2,593,566	16.96	2,768,623	16.69	3,023,396	17.41
3. Konsumsi	6,938,579	47.29	7,083,059	47.84	7,525,973	49.21	8,144,654	49.10	8,271,157	47.63
Jumlah	14,673,463	100	14,807,039	100	15,293,195	100	16,589,531	100	17,366,096	100

*) angka koreksi

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM di sektor perdagangan mempunyai pangsa terbesar yaitu mencapai Rp4,62 triliun atau 26,62% dari total kredit UMKM. Sektor lain yang juga menyerap kredit UMKM cukup besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp2,19 triliun atau 12,63% dan sektor jasa sebesar Rp1,12 triliun atau 6,47% dari total kredit UMKM.

Tabel 3.11. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (juta rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tw III 08		Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian	2,089,931	14.24	1,963,008	13.24	1,987,008	12.99	2,138,879	12.89	2,192,489	12.63
2	Pertambangan	27,817	0.19	25,855	0.17	31,691	0.21	30,929	0.19	28,840	0.17
3	Perindustrian	181,614	1.24	174,351	1.18	177,623	1.16	190,674	1.15	188,210	1.08
4	Listrik, Gas dan Air	7,058	0.05	7,562	0.05	3,769	0.02	3,960	0.02	5,913	0.03
5	Konstruksi	569,401	3.88	594,623	4.01	421,814	2.76	469,030	2.83	616,855	3.55
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,533,525	24.08	3,626,653	24.45	3,887,922	25.42	4,269,552	25.74	4,622,480	26.62
7	Pengangkutan, Pergud.	212,552	1.45	210,662	1.42	198,700	1.30	215,345	1.30	224,429	1.29
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	1,018,630	6.94	1,058,146	7.13	968,781	6.33	1,032,843	6.23	1,123,289	6.47
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	62,514	0.43	62,525	0.42	56,458	0.37	58,558	0.35	56,694	0.33
10	Lain-lain	6,970,421	47.50	7,108,526	47.93	7,559,429	49.43	8,179,761	49.31	8,306,897	47.83
Jumlah		14,673,463	100	14,831,911	100	15,293,195	100	16,589,531	100	17,366,096	100

*) angka koreksi

Kualitas kredit UMKM pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya NPLs kredit UMKM dari 2,51% menjadi 2,61%. Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan kualitas kredit utamanya terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 1,06% menjadi 1,16%, sektor perdagangan dari 3,11% menjadi 3,36%, sektor pengangkutan dari 0,62% menjadi 0,90%, jasa usaha dari 2,09% menjadi 2,37% dan jasa sosial dari 0,46% menjadi 1,58%, sementara sektor yang lainnya mengalami perbaikan kualitas.

Tabel 3.12. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw III 08	Tw IV 08 *)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1	Pertanian	1.98%	2.26%	3.52%	3.64%	3.44%
2	Pertambangan	1.65%	0.15%	1.12%	1.06%	1.16%
3	Perindustrian	12.57%	13.24%	11.01%	3.63%	2.95%
4	Listrik, Gas dan Air	0.00%	0.00%	0.00%	11.54%	7.71%
5	Konstruksi	6.74%	3.95%	10.54%	7.02%	5.47%
6	Perdag., Resto. & Hotel	2.43%	1.99%	2.87%	3.11%	3.36%
7	Pengangkutan, Pergud.	2.26%	1.39%	3.17%	0.62%	0.90%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	2.28%	2.50%	3.72%	2.09%	2.37%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	9.45%	0.34%	0.30%	0.46%	1.58%
10	Lain-lain	1.45%	1.32%	1.61%	1.73%	1.83%

*) angka koreksi

Dilihat dari penyebarannya, penurunan kualitas NPLs UMKM hampir terjadi pada semua kabupaten/kota, kecuali NPLs pada Kota Dumai yang mengalami

peningkatan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 2,14% menjadi 1,78%. NPLs UMKM tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yaitu mencapai 3,44% dari 3,28% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu NPLs UMKM terendah terjadi pada Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar 0,75% dari 0,63% pada triwulan sebelumnya.

Tabel 3.13. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1	Pekanbaru	2.55%	2.42%	3.48%	3.28%	3.44%
3	Bengkalis	1.42%	1.11%	0.96%	1.38%	1.42%
2	Dumai	4.03%	2.16%	2.25%	2.14%	1.78%
5	Indragiri Hilir	1.83%	1.58%	2.24%	2.03%	2.66%
4	Indragiri Hulu	0.79%	0.28%	0.38%	0.63%	0.75%
6	Lainnya	0.87%	0.68%	1.05%	0.80%	0.97%

*) angka koreksi

3.1.5. Kondisi Likuiditas

Pada triwulan laporan, komponen giro dan deposito mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara komponen tabungan mengalami peningkatan. Namun secara keseluruhan, dana yang dihimpun oleh perbankan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, alat likuid perbankan juga mengalami penurunan yang didorong oleh penurunan komponen SBI, sementara komponen kas mengalami peningkatan.

3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK)

Posisi DPK dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp31,63 triliun, mengalami penurunan sebesar 6,17% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Menurunnya jumlah dana yang dihimpun terjadi pada komponen giro dan deposito yaitu masing-masing mengalami penurunan sebesar 19,47% dan 4,69%, sementara komponen tabungan mengalami peningkatan sebesar 3,79%.

Bila dilihat berdasarkan *maturity* (jatuh tempo), semua komponen deposito mengalami penurunan, kecuali komponen deposito berjangka waktu 3 s.d 6 bulan mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari Rp809 miliar menjadi Rp812 miliar. Deposito berjangka waktu lebih dari 12 bulan menurun sebesar 4,59%, sementara

deposito berjangka waktu 6 – 12 bulan mengalami penurunan sebesar 2,04%. Di sisi lain, deposito berjangka waktu s.d 3 bulan mengalami penurunan tertinggi yaitu 5,39% dan memberikan dorongan yang cukup besar terhadap penurunan komponen deposito secara keseluruhan, karena besarnya pangsa deposito tersebut.

Tabel 3.14. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
- Giro	11.463	10.385	9.979	10.925	8.798
- Tabungan	12.687	13.258	12.567	13.166	13.665
- Deposito (s.d 3 bln)	6.219	6.585	7.779	7.960	7.532
Total	30.369	30.228	30.325	32.051	29.995
- Deposito 3-6 bln	707	716	755	809	812
- Deposito 6-12 bln	424	441	497	470	460
- Deposito > 12 bln	541	508	240	381	363
Total	1.673	1.665	1.492	1.659	1.635
Total DPK	32.042	31.893	31.817	33.710	31.631

*) angka koreksi

Berdasarkan kepemilikan, DPK milik perorangan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 65,03% dari total DPK yang pada triwulan sebelumnya mempunyai pangsa 60,09%. Selanjutnya, dana milik Pemerintah Daerah mempunyai pangsa 19,82% menurun cukup signifikan dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang mencapai 24,92%, dan pangsa milik perusahaan swasta sebesar 9,54% dari triwulan sebelumnya sebesar 8,07%. Sementara itu, pangsa terkecil adalah kepemilikan dana oleh bukan penduduk dan kepemilikan dana oleh badan/lembaga pemerintah yaitu masing-masing sebesar 0,02% dan 0,05% dari total dana.

Berdasarkan perkembangannya, penurunan dana utamanya didominasi oleh penurunan dana milik Pemda yang menurun signifikan yaitu dari Rp8,40 triliun menjadi Rp6,27 triliun. Penurunan dana milik pemda memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan jumlah dana di perbankan, hal tersebut mengindikasikan besarnya peran penempatan dana Pemda di perbankan. Penurunan dana milik Pemda ini diperkirakan terkait dengan jadwal pembayaran proyek-proyek Pemda menjelang akhir tahun anggaran.

Namun demikian, dana milik perorangan dan perusahaan swasta tercatat memberikan sumbangan tertinggi dalam penambahan jumlah dana yang dihimpun yaitu masing-masing meningkat sebesar Rp311,98 miliar dan Rp300,09 miliar. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya penghasilan masyarakat dan perusahaan swasta seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca krisis keuangan global.

Tabel 3.15. Sebaran DPK Menurut Kepemilikan di Provinsi Riau (juta rupiah)

Kepemilikan	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
Pemerintah Pusat	395,355	330,521	356,426	579,844	321,636
Pemerintah Daerah	8,715,449	7,293,375	7,855,734	8,400,682	6,269,753
Badan/ Lembaga Pemerintah	91,090	34,547	28,069	20,165	15,288
Badan Usaha Milik Negara	187,095	332,593	413,873	622,347	367,557
Badan Usaha Milik Daerah	84,012	119,088	75,320	70,956	50,666
Perusahaan Asuransi	190,338	199,754	204,994	217,774	225,598
Perusahaan Swasta	2,963,401	2,988,270	2,808,640	2,719,012	3,019,100
Yayasan dan Badan Sosial	202,116	221,073	214,370	238,211	252,088
Koperasi	247,135	203,259	196,007	200,280	191,596
Perorangan	18,689,635	19,704,384	19,402,295	20,257,079	20,569,058
Lainnya	266,141	455,901	248,823	371,849	343,133
Bukan Penduduk	10,271	9,999	12,864	11,549	5,259
Jumlah	32,042,038	31,892,764	31,817,415	33,709,748	31,630,732

*) angka koreksi

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih berada di Kota Pekanbaru yaitu 63,05% dari total DPK, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 9,23% dan 6,80%. Selanjutnya Indragiri Hulu sebesar 3,43% dan Indragiri Hilir sebesar 3,02%. Namun demikian, berdasarkan perkembangannya penurunan tertinggi terjadi pada Kabupaten Bengkalis yaitu 15,90% dari Rp3,47 triliun menjadi Rp2,92 triliun, diikuti oleh penurunan pada Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 9,60% dari Rp1,06 triliun menjadi Rp955,18 miliar.

Tabel 3.16. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw III 08		Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09	
		Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1	Pekanbaru	18,096,411	56.48	18,905,421	59.278	19,136,165	60.14	20,389,837	60.49	19,941,959	63.05
2	Bengkalis	3,442,241	10.74	3,312,483	10.39	3,204,953	10.07	3,470,833	10.30	2,919,129	9.23
3	Dumai	2,020,070	6.30	2,107,987	6.61	2,150,957	6.76	2,144,671	6.36	2,151,634	6.80
4	Indragiri Hilir	1,023,447	3.19	1,027,731	3.22	1,075,275	3.38	1,056,587	3.13	955,178	3.02
5	Indragiri Hulu	1,431,093	4.47	1,394,986	4.37	1,037,360	3.26	1,133,827	3.36	1,084,702	3.43
6	Lainnya	6,028,776	18.82	5,144,156	16.13	5,212,705	16.38	5,513,993	16.36	4,578,130	14.47
	Jumlah	32,042,038	100	31,892,764	100	31,817,415	100	33,709,748	100	31,630,732	100

*) angka koreksi

Pada triwulan laporan, terjadi peningkatan jumlah rekening dana di perbankan yaitu sebesar 2,62% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun terjadi penurunan pada jumlah dana yang dihimpun oleh perbankan. Peningkatan jumlah rekening utamanya didominasi oleh dana berjumlah Rp1 s.d. Rp10 juta, yaitu sebesar 15.965 rekening diikuti oleh jumlah rekening dengan dana sampai dengan Rp1 juta sebesar 31.003 rekening. Di sisi lain, peningkatan jumlah dana terbesar juga didominasi oleh dana berjumlah Rp1 juta s.d. Rp10 juta yaitu sebesar Rp116,36 miliar. Hal ini mengindikasikan, peningkatan jumlah dana terjadi utamanya karena pembukaan rekening baru oleh masyarakat yang mendorong peningkatan jumlah nasabah perbankan Riau. Sementara, penurunan rekening terbesar berasal dari simpanan dana yang nominalnya lebih besar dari Rp10.000 juta, baik jumlah rekening maupun jumlah dananya.

Peningkatan pada komponen tabungan diperkirakan karena mulai membaiknya tingkat penghasilan masyarakat Riau yang terutama berasal dari peningkatan produksi beberapa komoditas dari sektor pertanian. Selain itu, mulai membaiknya kondisi ekonomi dan relatif stabilnya nilai mata uang rupiah mendorong masyarakat untuk melakukan *saving* di perbankan, yang ditunjukkan oleh peningkatan tabungan baik nominal maupun jumlah rekening tabungan.

Tabel 3.17. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau

Klasifikasi DPK	Tw III 08		Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09	
	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)
< Rp.1 juta	1,069,618	678,582	1,152,696	707,586	1,084,786	680,841	1,088,541	699,968	1,119,544	704,955
Rp.1 juta s.d. Rp.10 juta	322,835	952,012	281,490	846,320	320,633	861,937	342,004	921,834	357,969	1,038,189
Rp.10 juta s.d. Rp.50 juta	257,471	5,470,073	240,191	5,185,639	246,267	5,268,116	252,607	5,361,002	250,759	5,376,183
Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	20,720	1,470,670	32,486	2,176,981	25,539	1,777,137	25,626	1,752,360	25,648	1,835,150
Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	32,174	5,649,696	29,855	5,428,292	29,367	5,211,195	32,148	5,708,569	32,860	5,655,391
Rp.250 juta s.d. Rp.1.000 juta	8,421	3,499,136	10,779	4,562,287	10,233	4,422,438	9,847	4,228,414	9,946	4,256,871
Rp.1.000 juta s.d. Rp.10.000 juta	1,968	4,026,852	2,138	4,546,185	2,043	4,182,109	2,239	5,027,855	2,307	4,871,216
>=Rp.10.000 juta	219	10,295,017	190	8,439,474	184	9,413,642	211	10,009,746	172	7,892,777
Total	1,713,426	32,042,038	1,749,825	31,892,764	1,719,052	31,817,415	1,753,223	33,709,748	1,799,205	31,630,732

*) angka koreksi

3.1.5.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (Kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan Provinsi Riau tercatat sebesar Rp3,27 triliun mengalami penurunan sebesar 14,83% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya komponen SBI pada triwulan laporan yaitu sebesar 48,93% dari

Rp2,76 triliun menjadi Rp1,41 triliun. Di sisi lain, komponen kas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 72,55% dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,86 triliun. Meningkatnya komponen kas perbankan didorong oleh tingkat likuiditas perbankan yang menunjukkan trend menurun, sehingga mendorong perbankan untuk selalu mempersiapkan jumlah kas yang tinggi.

Di sisi lain, jumlah Non Core Deposit (NCD)² perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan juga mengalami penurunan sebesar 6,41% yaitu dari Rp9,62 triliun menjadi Rp9,00 triliun. Penurunan NCD terjadi pada komponen giro, dan deposito sampai dengan 3 bulan yaitu masing-masing sebesar 19,47%, dan 5,37%. Sementara komponen NCD yang berasal dari tabungan mengalami peningkatan sebesar 3,79%.

Tabel 3.18. Perkembangan Alat Likuid dan Non Core Deposit

Alat Likuid	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 08	Tw II 08	Tw III 08
Kas	1,159,320	1,229,837	909,600	1,077,535	1,859,250
SBI	4,487,970	4,930,041	3,427,780	2,761,001	1,410,106
Jumlah	5,647,290	6,159,878	4,337,380	3,838,536	3,269,356

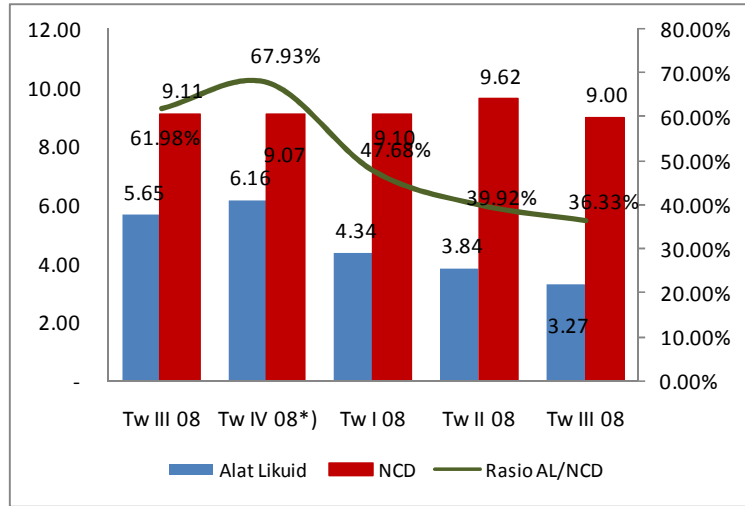
Non Core Deposit (NCD)	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 08	Tw II 08	Tw III 08
Giro (30%)	3,438,871	3,115,502	2,993,726	3,277,550	2,639,542
Tabungan (30%)	3,806,172	3,977,405	3,770,165	3,949,726	4,099,494
Dep 1-3 bln (30%)	1,865,700	1,975,521	2,333,684	2,387,878	2,259,543
NCD	9,110,743	9,068,427	9,097,574	9,615,153	8,998,579

*) angka koreksi

Dengan perkembangan tersebut di atas, maka rasio alat likuid terhadap NCD mengalami penurunan, yaitu dari 39,92% menjadi 36,33%. Kondisi ini mengindikasikan menurunnya kondisi likuiditas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan. Peningkatan penyaluran kredit yang diikuti dengan penurunan penghimpunan dana, terutama dana jangka panjang menjadi penyebab menurunnya kondisi likuiditas perbankan Riau.

² Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Grafik 3.9. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit



*) angka perbaikan

3.1.6. Profitabilitas

Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih mengalami peningkatan, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan suku bunga dana yang lebih besar dari suku bunga kredit belum dapat meningkatkan penerimaan laba bagi perbankan sehingga laba triwulan laporan masih lebih rendah dari penerimaan laba pada triwulan sebelumnya.

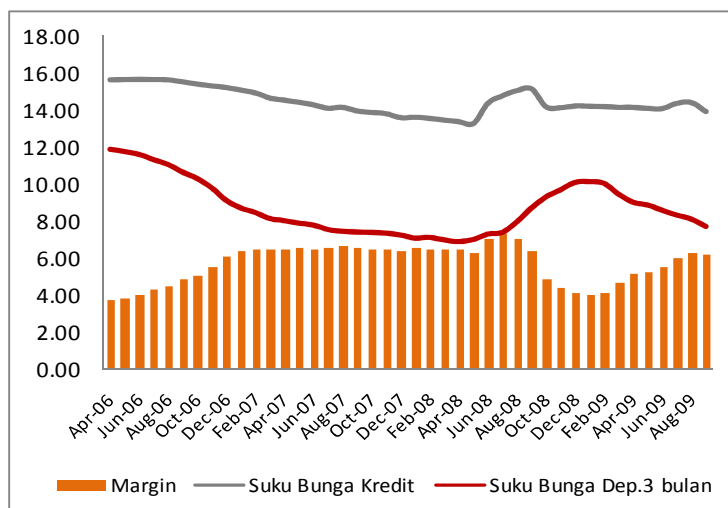
3.1.6.1. Spread Bunga

Selama triwulan laporan, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate sampai pada tingkat 6,50% dari 7,00% pada triwulan sebelumnya. Penurunan BI-Rate ini didasarkan pada perkembangan perekonomian global yang sudah mengindikasikan proses pemulihan, ekspektasi yang positif terhadap perekonomian dunia yang menimbulkan sentimen positif pada pelaku pasar keuangan, sehingga mendorong peningkatan arus modal masuk ke Indonesia. Di sektor keuangan, secara nasional stabilitas sistem perbankan nasional tetap terjaga dengan CAR yang masih cukup tinggi dan NPL yang berada pada batas aman, yaitu dibawah 5%.

Respon suku bunga perbankan terhadap penurunan BI Rate juga sudah mulai membaik. Selain itu, Bank Indonesia juga melihat bahwa tren penurunan inflasi masih berlanjut seiring dengan masih terbatasnya permintaan domestik dan terus menurunnya ekspektasi inflasi.

Tren penurunan BI-Rate sejak triwulan yang lalu telah direspon oleh kalangan perbankan dengan menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 87 bps dari 8,57% menjadi 7,70%. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) hanya mengalami penurunan sebesar 16 bps dari 14,10% menjadi 13,94%. Lebih tingginya penurunan suku bunga dana dibandingkan dengan suku bunga kredit menyebabkan *margin* yang dinikmati oleh perbankan mengalami peningkatan dari 5,53% menjadi 6,24% pada triwulan laporan.

Grafik 3.10. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito



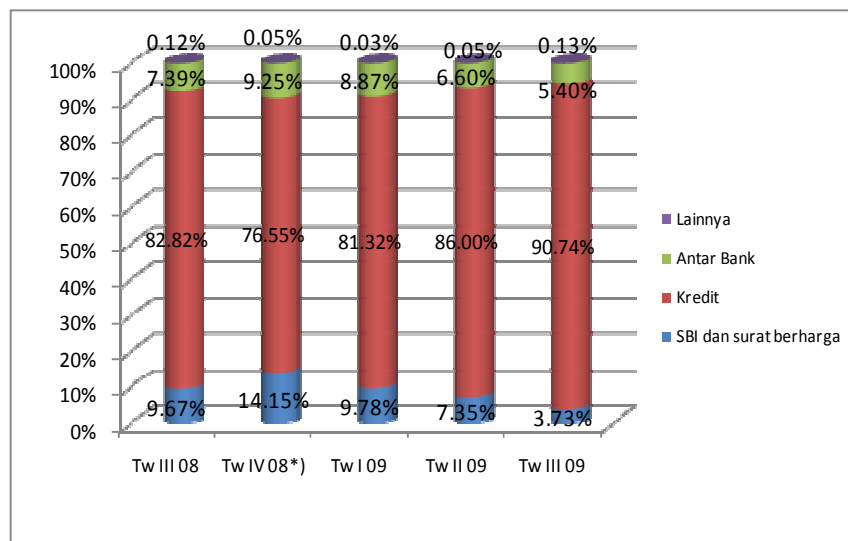
3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Selama triwulan laporan, perbankan Provinsi Riau tercatat memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp959,68 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp833,26 miliar (15,17%). Pangsa terbesar dari pendapatan ini berasal dari pendapatan kredit yaitu sebesar Rp870,85 miliar atau 90,74% dari total pendapatan, dan mengalami peningkatan sebesar 21,52% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meningkatnya pendapatan kredit ini

didorong oleh adanya peningkatan penyaluran kredit dan disisi lain penempatan perbankan dalam bentuk SBI dan Surat Berharga serta Antar Bank mengalami penurunan.

Sementara itu, komponen pendapatan lainnya mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 174,45% dari Rp454 miliar menjadi Rp1,25 triliun, namun pangsa komponen ini merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan pangsa komponen lainnya yaitu sebesar 0,13%. Sementara itu, komponen pendapatan yang berasal dari SBI dan Surat Berharga, serta komponen pendapatan dari antar bank mengalami penurunan masing-masing sebesar 41,57% dan 5,74% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan pendapatan yang berasal dari SBI terjadi seiring dengan semakin menurunnya suku bunga SBI dan menurunnya penempatan dana dalam bentuk SBI.

Grafik 3.11. Komposisi Pendapatan Bunga



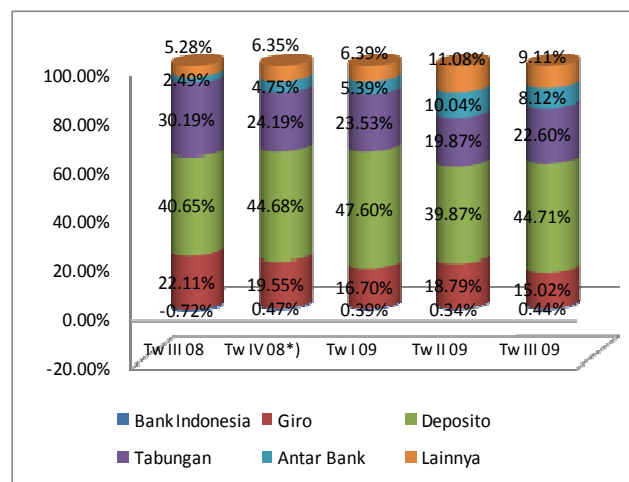
*) angka perbaikan

Di sisi lain, beban bunga yang dikeluarkan perbankan selama triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 5,77% dari Rp455,13 miliar menjadi Rp481,39 miliar pada triwulan laporan. Pembayaran bunga untuk dana pihak ketiga mencapai 82,33% dari total beban bunga dan beban bunga dana terbesar adalah komponen deposito. Dengan kondisi tersebut beban bunga terhadap dana pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar 10,88%, yang terjadi pada komponen

tabungan dan deposito, sementara beban bunga untuk komponen giro mengalami penurunan sebesar 15,46% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penurunan dana dan suku bunga dana yang diikuti oleh peningkatan beban perbankan terhadap dana diperkirakan terjadi karena beberapa bank masih memberlakukan suku bunga dana yang tinggi terhadap beberapa deposannya, terutama deposito besar (inti)

Grafik 3.12. Komposisi Beban Bunga



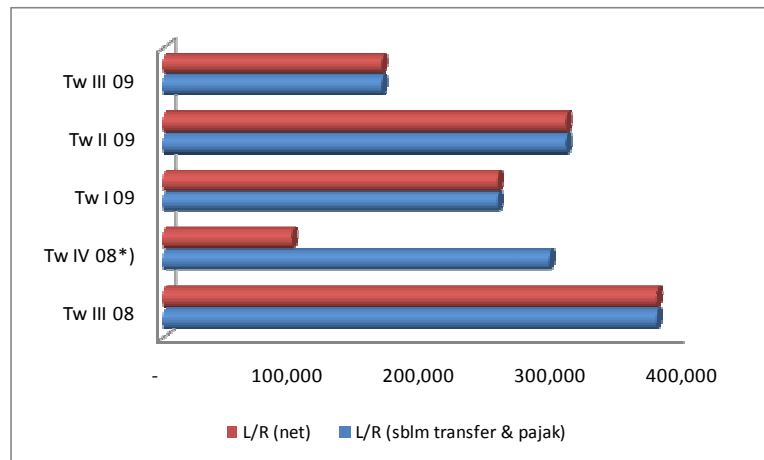
*) angka perbaikan

Peningkatan pendapatan bunga yang lebih tinggi dari peningkatan beban bunga telah mendorong meningkatnya *Net Interest Income* (NII) perbankan Riau pada triwulan laporan sebesar 26,49% yaitu dari Rp378,12 miliar menjadi Rp478,29 miliar.

3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan, perbankan Provinsi Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp165,88 miliar, mengalami penurunan sebesar 45,76% dibandingkan dengan laba pada triwulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan kredit pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Selain itu suku bunga yang diterapkan oleh perbankan pada triwulan yang lalu masih berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Grafik 3.13. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan, Rp Juta)



3.1.7. Bank Syariah

Pada triwulan laporan terdapat 8 (delapan) bank bank Syariah yang terdiri dari 4 Bank Umum Syariah (BUS) dan 4 Unit Usaha Syariah (UUS). Terjadi perubahan jenis operasional dari UUS BRI Syariah menjadi BUS, sehingga jumlah BUS di Riau menjadi 4 bank dan UUS menjadi 4 unit. Pangsa aset bank Syariah mencapai 3,74% dari total aset perbankan secara umum. Pangsa perbankan Syariah diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pihak yang terkait (Bank Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah, Asbisindo) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah melalui sosialisasi dan juga adanya peningkatan jumlah perbankan Syariah di Provinsi Riau.

Kegiatan perbankan Syariah pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Terjadi peningkatan pada komponen aset, dana, dan pembiayaan yang dilakukan. Seiring dengan itu, kualitas pembiayaan Syariah juga mengalami peningkatan kualitas yang tercermin dari menurunnya NPF (*Non Performing Financing*) perbankan Syariah dari 3,81% menjadi 3,59% pada triwulan laporan.

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah di Provinsi Riau (juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode				
		Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1	Jumlah Bank	7	7	8	8	8
2	Asset	1,341,695	1,385,441	1,311,672	1,375,322	1,482,928
3	DPK	818,815	887,900	847,991	909,582	1,039,538
4	Pembiayaan	904,449	884,571	898,019	896,916	977,235
5	Nominal NPF	17,634	24,850	46,326	34,195	35,090
6	NPF	1.95%	3.25%	5.16%	3.81%	3.59%
7	FDR	110.46%	99.63%	105.90%	98.61%	94.01%

*) angka koreksi
Bank Syariah dan UUS

Total aset perbankan Syariah mengalami peningkatan 7,82% yaitu dari Rp1,37 triliun menjadi Rp1,48 triliun. Peningkatan aset ini seiring dengan meningkatnya dana pihak ketiga perbankan Syariah sebesar 14,29% yaitu dari Rp909,58 miliar menjadi Rp1,04 triliun. Pembiayaan perbankan Syariah juga mengalami peningkatan sebesar 8,90% yaitu dari Rp896,92 miliar menjadi Rp977,23 miliar. Peningkatan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pembiayaan menyebabkan menurunnya FDR (*Financing to Deposit Ratio*) perbankan Syariah dari 98,61% menjadi 94,01%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan rasio LDR perbankan konvensional yaitu sebesar 73,20%.

Dilihat dari sektor yang dibiayai sebesar 35,42% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa terutama jasa dunia usaha (30,58%), diikuti oleh sektor pertanian sebesar 16,65%, sektor perdagangan sebesar 13,35%, konstruksi 6,07%, dan yang paling rendah adalah sektor listrik yaitu sebesar 0,06%. Sementara sektor lainnya (konsumsi) mempunyai pangsa 24,85%. Peningkatan penyaluran kredit utamanya terjadi pada sektor jasa yaitu mencapai 6,90% menjadi Rp337,30 miliar dan sektor perdagangan sebesar 16,02% menjadi sebesar Rp130,47 miliar.

Berdasarkan jenis penggunaan, pangsa terbesar dari pembiayaan disalurkan kepada pembiayaan modal kerja yaitu mencapai 41,10%, diikuti pembiayaan investasi sebesar 34,05% dan yang paling rendah adalah pembiayaan konsumsi yaitu sebesar 24,85%. Pada perbankan Syariah, realisasi pembiayaan kepada sektor konsumsi relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan kepada sektor produksi lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang besar

terhadap pertumbuhan ekonomi Riau ke depan, yaitu dengan memajukan sektor riil. Peningkatan tertinggi terjadi pada pembiayaan modal kerja yaitu mencapai 10,75% dari Rp362,64 miliar menjadi Rp401,63 miliar, diikuti oleh pembiayaan konsumsi sebesar 8,78% dari Rp223,23 menjadi Rp242,89 miliar. Selanjutnya, pembiayaan investasi mengalami peningkatan terendah yaitu 6,98% dari Rp311 miliar menjadi Rp332,92 miliar.

3.3. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR/S pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Kinerja BPR/S Riau masih menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya aset, dana, dan kredit yang disalurkan, meskipun belum ada peningkatan jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun terdapat potensi peningkatan jumlah BPR/S, karena terdapat 9 (tiga) BPR/S yang sedang dalam proses perizinan, dan salah satunya merupakan BPR Syariah.

Aset BPR pada triwulan laporan mencapai Rp594,37 miliar, meningkat 6,30% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp559,13 miliar. Peningkatan aset ini didorong oleh meningkatnya dana yang dihimpun BPR/S yaitu dari Rp438,41 miliar menjadi Rp390,02 miliar (12,41%). Peningkatan dana ini diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit sebesar 1,98% yaitu menjadi Rp382,77 miliar dari Rp375,33 miliar. Tingginya peningkatan dana dibandingkan dengan peningkatan kredit telah menyebabkan menurunnya LDR BPR/S Riau pada triwulan laporan, yaitu dari 96,23% menjadi 87,31%.

Tabel 3.20. Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Provinsi Riau (juta rupiah)

Keterangan	Periode				
	Tw III 08	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09
1. Jumlah BPR/S	24	24	27	27	27
2. Asset	492,357	515,379	542,764	559,128	594,367
3. DPK	353,041	366,161	382,024	390,023	438,411
4. Kredit	331,940	335,122	353,333	375,327	382,768
5. NPL (nominal)	19,617	18,531	27,367	27,196	33,927
LDR (%)	94.02	91.52	92.49	96.23	87.31
NPLs (%)	5.91	5.53	7.75	7.25	8.86

*) angka koreksi

Namun demikian, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPRS tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kredit yang tercermin dari meningkatnya NPLs BPR 7,25% menjadi 8,86% pada triwulan laporan. NPLs BPRS ini sudah melebihi tingkat toleransi yang diizinkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%. Tingkat NPLs ini harus menjadi perhatian bagi BPRS di Riau karena berpotensi menyebabkan memburuknya tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank, yang juga dapat menyebabkan menurunnya Tingkat Kesehatan bank. Selain itu, kondisi seperti ini juga dapat mengganggu tingkat intermediasi perbankan, karena bank tidak dapat melakukan pengembalian terhadap dana yang telah dihimpun.

Bab 4

KONDISI KEUANGAN

DAERAH

1. Kondisi Umum

Perkembangan kondisi keuangan daerah Provinsi Riau dalam triwulan laporan menunjukkan perlambatan. Angka realisasi belanja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sampai dengan triwulan III-2009 tercatat sebesar 48,06%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 50,64%. Satuan kerja setingkat dinas yang tercatat mengalami angka realisasi belanja terbesar terdapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan angka sebesar 74,13% diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 70,87%.

2. APBD-P Provinsi Riau Tahun 2009

Anggaran pendapatan dalam APBD-P Provinsi Riau pada tahun 2009 mengalami penurunan dari Rp3,66 triliun menjadi Rp3,08 triliun (15,89%). Hal ini disebabkan oleh menurunnya anggaran dana perimbangan yang tercatat turun dari Rp2,39 triliun menjadi Rp1,80 triliun atau turun 24,72%. Penurunan pada komponen ini terjadi akibat menurunnya dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang tercatat turun 25,77%.

Tabel 4.1. APBD Provinsi Riau Tahun 2009

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
PENDAPATAN	3.663.103	3.081.212	(581.891)	(15,89)
Pendapatan Asli Daerah	1.276.253	1.284.497	8.245	0,65
Dana Perimbangan	2.386.850	1.796.714	(590.136)	(24,72)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	4.006.117	4.269.474	263.357	6,57
Belanja Tidak Langsung	1.661.012	1.806.651	145.640	8,77
Belanja Langsung	2.345.105	2.462.823	117.717	5,02
Surplus / (Defisit)	(343.014)	(1.188.262)	(845.248)	246,42
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	388.218	1.425.511	1.037.292	267,19
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	156.900	237.249	80.348	51,21
Pembiayaan Neto	231.318	1.188.262	956.944	413,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (S	(111.696)	-	111.696	-

Sumber : Dept. Keuangan (diolah)

Di sisi lain, anggaran belanja yang terdiri dari dua komponen yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami kenaikan dari Rp4,01 triliun menjadi Rp4,27 triliun atau meningkat 6,57%. Kenaikan pada komponen belanja langsung tercatat sebesar 8,77%, yang disebabkan oleh terutama oleh naiknya belanja pegawai sebesar 17%. Sementara itu, kenaikan pada komponen belanja langsung tercatat sebesar 5,02%, disebabkan terutama oleh naiknya belanja modal sebesar 7,03%.

3. Realisasi Belanja

Dalam triwulan laporan, realisasi belanja di provinsi Riau sampai dengan triwulan III-2009 tercatat sebesar Rp2,05 triliun atau naik Rp1,16 triliun dibandingkan dengan semester I-2009 (Tabel 4.2). Dengan demikian, angka realisasi belanja SKPD Provinsi Riau pada triwulan III-2009 tercatat sebesar 48,06%, meningkat dibandingkan dengan semester I-2009 yang tercatat sebesar 20,77%. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III-2008 yang tercatat sebesar 50,64%.

Tabel 4.2. Nilai Transaksi Belanja SKPD Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon	Triwulan III-2008		Semester I 2009		Triwulan III-2009	
		Realisasi (%)	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Realisasi (%)
Badan Kepegawaian Daerah	25,833	52.74	8,278	32.04	14,798	57.28	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	17,019	70.37	6,734	39.57	11,861	69.69	
Badan Ketahanan Pangan	15,564	53.89	5,534	35.56	9,411	60.46	
Badan Lingkungan Hidup	13,859	54.39	5,807	41.90	9,491	68.48	
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	10,842	-	2,744	25.31	5,313	49.00	
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	11,139	-	2,595	23.29	5,035	45.20	
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	40,421	53.73	11,481	28.40	22,593	55.89	
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	17,566	56.61	5,071	28.87	11,693	66.57	
Badan Penelitian dan Pengembangan	21,505	49.80	5,869	27.29	11,764	54.71	
Badan Penghubung	9,457	55.59	2,796	29.56	5,625	59.47	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32,494	57.94	9,449	29.08	15,731	48.41	
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	22,755	67.35	5,503	24.18	12,597	55.36	
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17,583	79.25	8,193	46.60	14,137	80.40	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51,703	27.33	10,102	19.54	17,548	33.94	
Dinas Kehutanan	35,011	57.87	13,544	38.68	22,812	65.16	
Dinas Kesehatan	107,815	41.08	23,050	21.38	45,150	41.88	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data	12,974	81.09	4,375	33.72	8,943	68.93	
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15,625	68.27	6,952	44.49	11,583	74.13	
Dinas Pekerjaan Umum	832,801	46.67	189,206	22.72	421,009	50.55	
Dinas Pemuda dan Olahraga	380,591	10.59	11,044	2.90	35,474	9.32	
Dinas Pendapatan	119,306	65.34	29,511	24.74	61,369	51.44	
Dinas Pendidikan	413,895	51.07	78,082	18.87	249,150	60.20	
Dinas Perhubungan	66,618	43.40	11,323	17.00	31,805	47.74	
Dinas Perikanan dan Kelautan	48,956	44.96	10,878	22.22	17,661	36.07	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,348	57.80	10,730	39.23	19,383	70.87	
Dinas Perkebunan	59,687	32.01	9,961	16.69	17,147	28.73	
Dinas Pertambangan dan Energi	21,922	35.53	6,558	29.91	12,321	56.20	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34,926	41.74	6,243	17.88	13,360	38.25	
Dinas Sosial	31,530	49.65	11,472	36.38	20,885	66.24	
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	62,978	31.74	16,335	25.94	30,902	49.07	
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	59,594	54.36*	21,074	35.36	36,959	62.02	
Inspektorat	16,278	-	5,738	35.25	11,355	69.76	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,265	59.54	1,149	50.72	1,751	77.30	
Rumah Sakit Jiwa Tampuan	25,278	63.48	7,918	31.32	14,757	58.38	
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	135,819	48.95	45,808	33.73	85,027	62.60	
Satuan Polisi Pamong Praja	29,194	72.65	7,281	24.94	14,190	48.61	
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	11,137	-	1,797	16.14	4,482	40.24	
Sekretariat Daerah	1,330,017	59.54	240,555	18.09	646,973	48.64	
Sekretariat DPRD	79,206	70.34	25,630	32.36	49,194	62.11	
Jumlah	4,268,510	50.64	886,368	20.77	2,051,239	48.06	

*Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan pada Tahun 2008 masih terpisah sehingga menggunakan rata-rata

Sumber : Departemen Keuangan, diolah

Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai realisasi belanja Sekretariat Daerah yang tercatat memiliki porsi terbesar (31,54%) terhadap nilai keseluruhan dari nilai realisasi belanja SKPD Provinsi Riau sampai dengan Oktober

2009. Adapun nilai realisasi belanja SKPD tersebut sampai dengan Oktober 2009 tercatat sebesar Rp646,97 miliar atau mencapai 48,64% dari plafon anggarannya.

Dalam triwulan laporan, satuan kerja setingkat dinas yang tercatat mengalami angka realisasi belanja terbesar terdapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan angka sebesar 74,13% diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 70,87%.

4. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Total nilai transaksi belanja tidak langsung di Provinsi Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp856,1 miliar atau naik Rp468,47 miliar dibandingkan semester I-2009 yang tercatat sebesar Rp387,63 miliar (Tabel 4.3). Dalam triwulan laporan, diketahui bahwa nilai realisasi belanja tidak langsung SKPD di Provinsi Riau mengalami kenaikan dari 21,46% (semester I-2009) menjadi 47,39%. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja anggaran Sekretariat Daerah yang memiliki porsi terbesar dari Rp126,43 miliar menjadi Rp400,38 miliar.

Adapun realisasi transaksi belanja tidak langsung terbesar terdapat pada Dinas Koperasi dan UMKM yaitu sebesar 83,1% dengan nilai transaksi sebesar Rp6,34 miliar, diikuti oleh Dinas Pertambangan dan Energi sebesar 81,08% dengan nilai transaksi mencapai Rp7,26 miliar. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung terkecil terdapat pada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 8,41% dengan nilai transaksi sebesar Rp191 juta.

Sementara itu, dalam triwulan laporan diketahui bahwa kenaikan belanja tidak langsung terbesar terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 36,53%, dimana nilai transaksi belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari Rp3,03 miliar menjadi Rp5,69 miliar. Adapun SKPD lain yang mengalami kenaikan belanja tidak langsung cukup tinggi adalah Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kenaikan masing-masing sebesar 35,32% dan 35,18%.

Tabel 4.3. Nilai Transaksi Komponen Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon	Semester I 2009		Triwulan III-2009	
		jumlah	Realisasi (%)	Jumlah	Realisasi (%)
Badan Kepegawaian Daerah	12,306.90	4,888	39.72	8,341	67.77
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	9,233.96	3,928	42.54	6,927	75.01
Badan Ketahanan Pangan	8,884.39	3,860	43.45	6,468	72.80
Badan Lingkungan Hidup	6,765.55	3,251	48.05	4,986	73.69
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	7,610.82	1,761	23.14	3,343	43.93
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5,494.27	742	13.50	1,776	32.33
Badan Pemberdayaan, Masyarakat dan Pembangunan Desa	7,472.40	3,042	40.71	4,780	63.97
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	5,354.00	2,519	47.05	4,063	75.89
Badan Penelitian dan Pengembangan	13,536.50	4,867	35.95	8,642	63.84
Badan Penghubung	3,896.87	1,512	38.80	2,737	70.24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,198.76	4,429	33.56	7,276	55.13
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	12,968.17	4,014	30.95	7,387	56.96
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17,583.08	8,147	46.33	14,137	80.40
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14,470.63	5,446	37.63	8,796	60.79
Dinas Kehutanan	25,263.11	11,012	43.59	18,138	71.80
Dinas Kesehatan	33,974.79	11,361	33.44	20,980	61.75
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data	5,577.37	2,305	41.33	3,748	67.20
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7,625.98	3,654	47.92	6,337	83.10
Dinas Pekerjaan Umum	59,010.13	22,122	37.49	39,960	67.72
Dinas Pemuda dan Olahraga	7,312.53	3,032	41.46	5,690	77.82
Dinas Pendapatan	97,453.67	26,829	27.53	53,863	55.27
Dinas Pendidikan	35,470.69	12,601	35.53	20,932	59.01
Dinas Perhubungan	22,390.93	7,813	34.89	14,631	65.34
Dinas Perikanan dan Kelautan	11,066.81	5,131	46.36	7,900	71.38
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17,510.58	8,024	45.82	13,358	76.28
Dinas Perkebunan	18,088.07	7,802	43.13	12,944	71.56
Dinas Pertambangan dan Energi	8,953.57	4,097	45.76	7,260	81.08
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10,844.86	3,700	34.12	6,131	56.53
Dinas Sosial	16,339.36	6,851	41.93	11,368	69.57
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	24,323.32	11,563	47.54	18,683	76.81
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	33,231.33	15,310	46.07	24,013	72.26
Inspektorat	7,379.03	2,984	40.44	5,297	71.78
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,264.57	104	4.59	191	8.41
Rumah Sakit Jiwa Tampan	14,662.13	6,042	41.21	10,267	70.02
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	56,933.29	25,907	45.50	43,315	76.08
Satuan Polisi Pamong Praja	20,076.42	4,665	23.24	9,935	49.49
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	8,560.15	1,137	13.28	3,311	38.68
Sekretariat Daerah	1,110,928.77	126,434	11.38	400,384	36.04
Sekretariat DPRD	12,633.59	4,742	37.53	7,808	61.80
Jumlah	1,806,651.35	387,628	21.46	856,102	47.39

Sumber : Departemen Keuangan, diolah

5. Realisasi Belanja Langsung

Nilai transaksi belanja langsung di Provinsi Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp1,19 triliun atau naik Rp697,8 miliar dibandingkan dengan semester I-2009 yang tercatat sebesar Rp497,31 miliar³ (Tabel 4.3). Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja langsung SKPD di Provinsi Riau mengalami kenaikan dari 20,2% pada semester I-2009 menjadi 48,55% (triwulan III-2009) yang terutama disebabkan oleh meningkatnya belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki porsi terbesar dalam komponen belanja langsung, dari Rp167,05 miliar pada semester I-2009 menjadi Rp381,05 miliar. Hal ini diperkirakan seiring dengan

³ Dalam triwulan laporan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak memiliki plafon anggaran belanja langsung namun dalam realisasinya terjadi transaksi belanja sebesar Rp1,56 miliar.

meningkatnya belanja modal khususnya terkait dengan perbaikan maupun pelebaran jalan. Meskipun demikian, nilai realisasi belanja langsung sampai dengan triwulan masih mencapai 49,24%.

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa transaksi belanja langsung Sekretariat Daerah tercatat melebihi nilai plafon yang dianggarkan. Realisasi belanja langsung SKPD tersebut dalam triwulan III-2009 tercatat sebesar 112,55%. Adapun nilai realisasi belanja langsung SKPD yang cukup tinggi juga terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan dan Pengolahan data dengan nilai realisasi mencapai 70,24% atau sebesar Rp5,20 miliar.

Tabel 4.4. Nilai Transaksi Komponen Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau Triwulan III-2009 (dalam Rp juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon	Semester I 2009		Triwulan III-2009	
		Jumlah	Realisasi (%)	Jumlah	Realisasi (%)
Badan Kepegawaian Daerah	13,526	3,350	24.77	6,457	47.74
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	7,785	2,763	35.49	4,934	63.38
Badan Ketahanan Pangan	6,680	1,631	24.42	2,942	44.05
Badan Lingkungan Hidup	7,093	2,508	35.36	4,505	63.51
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	3,231	960	29.71	1,969	60.94
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5,645	1,839	32.58	3,259	57.73
Badan Pemberdayaan, Masyarakat dan Pembangunan Desa	32,949	8,398	25.49	17,813	54.06
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	12,212	2,505	20.51	7,630	62.48
Badan Penelitian dan Pengembangan	7,968	966	12.12	3,122	39.18
Badan Penghubung	5,560	1,245	22.39	2,887	51.93
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19,295	4,986	25.84	8,455	43.82
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	9,786	1,458	14.90	5,210	53.24
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	0	*
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37,232	4,618	12.40	8,752	23.51
Dinas Kehutanan	9,748	2,488	25.52	4,674	47.95
Dinas Kesehatan	73,841	11,656	15.79	24,171	32.73
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data	7,396	2,029	27.43	5,195	70.24
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7,999	3,250	40.63	5,246	65.58
Dinas Pekerjaan Umum	773,790	167,047	21.59	381,049	49.24
Dinas Pemuda dan Olahraga	373,279	7,971	2.14	29,784	7.98
Dinas Pendapatan	21,853	2,654	12.14	7,506	34.35
Dinas Pendidikan	378,425	65,445	17.29	228,218	60.31
Dinas Perhubungan	44,227	3,475	7.86	17,174	38.83
Dinas Perikanan dan Kelautan	37,889	5,701	15.05	9,761	25.76
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,837	2,660	27.04	6,025	61.25
Dinas Perkebunan	41,599	2,116	5.09	4,204	10.10
Dinas Pertambangan dan Energi	12,969	2,415	18.62	5,061	39.02
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24,081	2,509	10.42	7,229	30.02
Dinas Sosial	15,190	4,579	30.14	9,518	62.66
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	38,655	4,724	12.22	12,219	31.61
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	26,363	5,718	21.69	12,947	49.11
Inspektorat	8,899	2,714	30.50	6,058	68.08
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1,040	-	1,560	*
Rumah Sakit Jiwa Tampan	10,616	1,835	17.29	4,490	42.30
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	78,886	19,855	25.17	41,712	52.88
Satuan Polisi Pamong Praja	9,117	2,593	28.44	4,255	46.67
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	2,577	647	25.11	1,171	45.44
Sekretariat Daerah	219,089	114,110	52.08	246,589	112.55
Sekretariat DPRD	66,572	20,850	31.32	41,387	62.17
Jumlah	2,461,859	497,308	20.20	1,195,137	48.55

Sumber : Departemen Keuangan, diolah

Sementara itu, dalam triwulan laporan diketahui bahwa kenaikan belanja langsung terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan yaitu sebesar 43,01%, dengan nilai transaksi sebesar Rp228,22 miliar. Adapun SKPD lain yang mengalami kenaikan belanja langsung cukup tinggi adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data serta Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan kenaikan masing-masing sebesar 42,81% dan 41,97% dibandingkan dengan semester I-2009.

Bab

PERKEMBANGAN

SISTEM PEMBAYARAN

1. Kondisi Umum

Perkembangan peredaran uang kartal selama triwulan laporan, baik aliran uang keluar (*outflow*) maupun aliran uang masuk (*inflow*) mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Permintaan uang kartal yang tercermin dari *outflow* Bank Indonesia Pekanbaru mengalami peningkatan sebesar 27,09% menjadi Rp3,31 triliun, sementara *inflow* ke Bank Indonesia Pekanbaru mengalami peningkatan sebesar 9,82% menjadi Rp220,11 miliar. Dengan perkembangan tersebut, maka selama triwulan laporan Bank Indonesia Pekanbaru tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,09 triliun atau mengalami peningkatan 28,53% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Peningkatan peredaran uang ini seiring dengan memasuki akhir tahun anggaran sehingga beberapa proyek infrastruktur sudah mulai direalisasikan, dan adanya

perayaan hari besar keagamaan yang mendorong peningkatan uang keluar dari Bank Indonesia Pekanbaru.

Pada awal tahun 2009 yang lalu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menahan PTTB pada uang pecahan besar. Kebijakan ini berimplikasi pada menurunnya jumlah nominal PTTB yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru sejak triwulan I-2009 yang lalu. Namun demikian, PTTB pada triwulan laporan telah mulai mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi pembayaran non tunai melalui kliring mengalami penurunan baik dari sisi warkat maupun nominal, yang disebabkan oleh menurunnya kuantitas transaksi kliring selama triwulan laporan.

2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

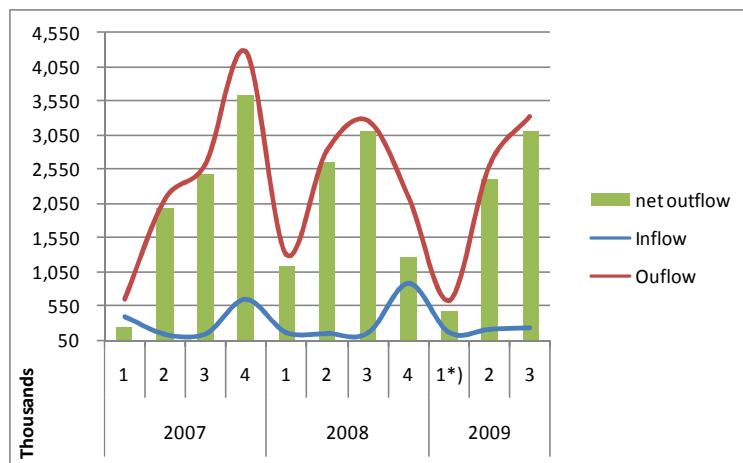
2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (*Inflow – Outflow*)

Perkembangan peredaran uang kartal pada triwulan laporan baik uang masuk (*inflow*) maupun uang keluar (*outflow*) mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Permintaan uang kartal yang tercermin melalui aliran uang keluar dari Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp3,31 triliun mengalami peningkatan 27,09% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena memasuki akhir tahun anggaran proyek-proyek infrastruktur sudah mulai berjalan, sehingga pembayaran terhadap proyek-proyek sudah mulai direalisasikan. Selain itu, perayaan hari besar keagamaan yang terjadi pada triwulan laporan yaitu Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri juga turut mendorong meningkatnya uang yang keluar dari Bank Indonesia Pekanbaru, terutama terkait dengan adanya peluncuran uang kertas pecahan baru oleh Bank Indonesia yaitu uang baru pecahan Rp2.000, sehingga meningkatkan animo masyarakat terhadap pecahan tersebut. Peluncuran ini terkait dengan *cost-effectiveness* uang kertas pecahan Rp1.000, seiring dengan tingkat harga yang semakin tinggi, biaya produksi dan usia pakai uang kertas seribu rupiah dirasakan tidak lagi memadai bila dibandingkan dengan nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat

Perkembangan uang masuk ke Bank Indonesia Pekanbaru juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp200,43 miliar menjadi Rp220,11 miliar (9,82%). Dengan perkembangan tersebut di atas, maka selama triwulan laporan terjadi *net outflow* sebesar Rp3,09 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 28,53%.

Grafik 5.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*



Sumber : Bank Indonesia Pekanbaru

2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

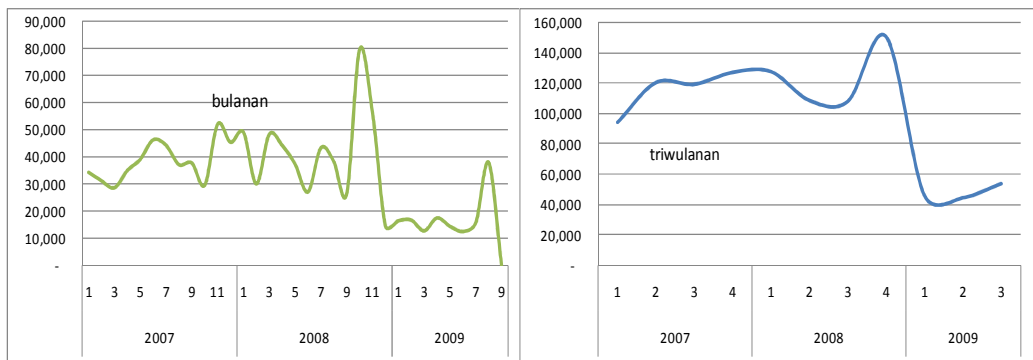
Kebijakan *Clean Money Policy* Bank Indonesia yang terkait dengan transaksi pembayaran secara tunai bertujuan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*fit for circulation*). Dalam melaksanakan kebijakan *Clean Money Policy* tersebut Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan pemusnahan uang yaitu uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang dari masyarakat dan menggantinya dengan uang layak edar.

Pada triwulan laporan, jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencapai Rp53,69 miliar, mengalami peningkatan 21,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp44,35 miliar. Namun demikian, jumlah tersebut masih mengalami penurunan yang signifikan

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp108,03 miliar.

Trend penurunan PTTB yang sudah terjadi sejak triwulan I-2009 yang lalu terkait dengan adanya kebijakan Bank Indonesia untuk menahan pecahan besar (Rp20.000 keatas) untuk tidak dimusnahkan, sehingga mendorong menurunnya PTTB terhadap uang kertas. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan cara memperlakukan rupiah dengan baik dan benar juga tampaknya sudah mulai dilakukan oleh masyarakat. Rasio PTTB terhadap *cash inflow* pada triwulan laporan tercatat sebesar 24,39% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 22,13%.

Grafik 5.2. Perkembangan PTTB di Bank Indonesia Pekanbaru



Sumber : Bank Indonesia Pekanbaru

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang rupiah yang layak edar dan uang rupiah pecahan tertentu bagi masyarakat, Bank Indonesia Pekanbaru juga secara rutin melaksanakan layanan penukaran uang secara langsung baik untuk uang lusuh atau rusak maupun penukaran uang pecahan kecil. Selain itu, Bank Indonesia Pekanbaru juga melakukan kegiatan kas keliling atau pelayanan kas di luar Kantor Bank Indonesia baik di Kota Pekanbaru Pekanbaru maupun di luar Kota Pekanbaru.

Pada pertengahan Juli 2009 yang lalu Bank Indonesia secara resmi meluncurkan/mengeluarkan uang pecahan baru yaitu pecahan dengan nominal Rp2.000 (duaribu rupiah) dan mengedarkan kepada masyarakat pada pertengahan Agustus 2009. Pecahan ini merupakan pecahan rupiah baru untuk melengkapi pecahan-pecahan yang selama ini telah beredar di masyarakat. Peluncuran uang pecahan baru ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap

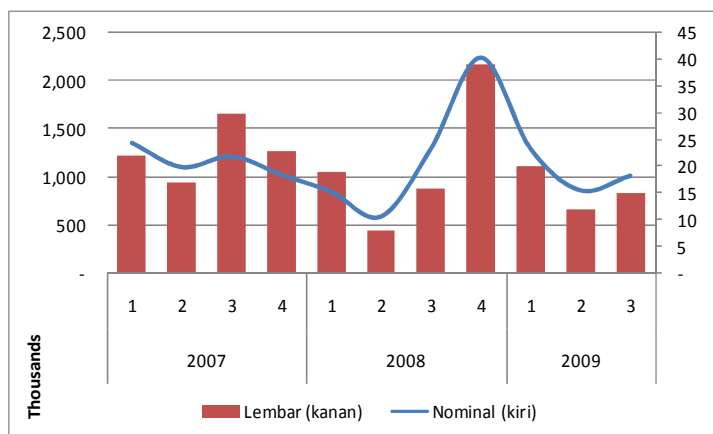
uang kertas dalam nominal yang lebih besar, karena uang pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) yang selama ini sudah beredar luas dirasakan tidak lagi memadai untuk mendukung transaksi ekonomi, khususnya yang bernilai kecil dan berfrekuensi tinggi. Selain itu, peluncuran ini juga terkait dengan *cost-effectiveness* uang kertas pecahan Rp1.000, seiring dengan tingkat harga yang semakin tinggi, biaya produksi dan usia pakai uang kertas seribu rupiah yang dirasakan tidak lagi memadai bila dibandingkan dengan nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

2.3. Uang Palsu

Dari *cash inflow* sebesar Rp220,11 miliar yang masuk ke Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan laporan terdapat uang palsu sebanyak 15 lembar dengan nominal sebesar Rp1,02 juta atau sebesar 0,00046%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dengan nominal sebesar Rp870 ribu dengan jumlah lembar yaitu 12 lembar uang palsu.

Untuk menekan peredaran uang palsu, Bank Indonesia secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan bagaimana memperlakukan uang dengan baik dan benar, sehingga peredaran uang palsu dapat dikurangi dan fisik uang tidak cepat lusuh dan rusak.

Grafik 5.3. Perkembangan Peredaran Uang Palsu di Riau



Sumber : Bank Indonesia Pekanbaru

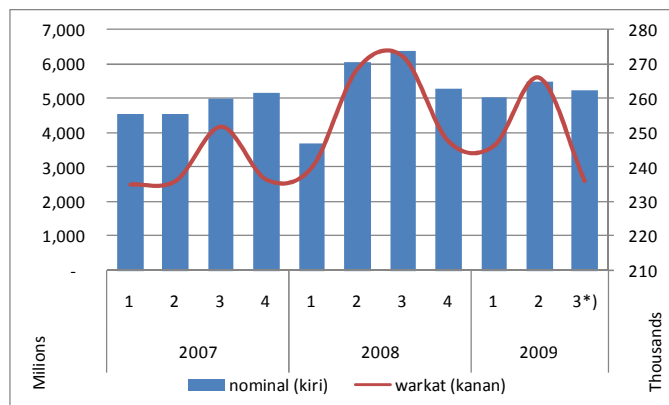
3. Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

3.1. Transaksi Kliring

Selama triwulan laporan, transaksi pembayaran non tunai melalui sistem kliring mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik dari sisi nominal maupun warkat. Nominal kliring mengalami penurunan sebesar 4,72% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp5,51 triliun menjadi Rp5,25 triliun. Sementara, jumlah warkat yang digunakan mengalami penurunan sebesar 11,27% yaitu dari 265.929 lembar menjadi 235.853 lembar.

Penurunan nominal warkat yang diikuti dengan penurunan jumlah warkat ini menunjukkan nilai transaksi kliring perwarkatnya cenderung tetap, namun terjadi penurunan kuantitas transaksi. Lebih rendahnya transaksi kliring triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meskipun terdapat *moment* Hari Raya diperkirakan karena pada triwulan sebelumnya terdapat kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mendorong peningkatan transaksi pembayaran tunai yang lebih besar.

Grafik 5.4. Perkembangan Transaksi Kliring di Riau

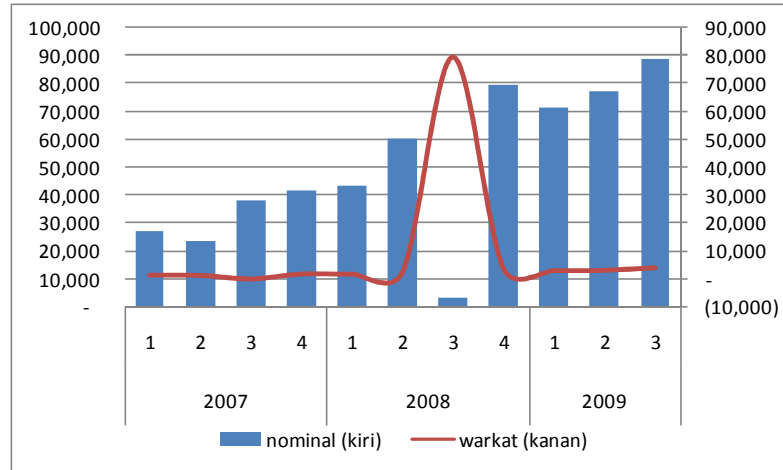


Sumber : Bank Indonesia Pekanbaru

Sementara itu, penolakan cek/BG kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah warkat maupun jumlah nominalnya. Jumlah nominal penolakan cek/BG kosong pada triwulan laporan sebesar Rp89,14 miliar dari Rp77,47 miliar pada triwulan sebelumnya atau meningkat sebesar 15,06%,

sementara jumlah warkatnya meningkat dari 3.390 lembar menjadi 4.259 lembar atau meningkat 25,41%.

Grafik 5.5. Perkembangan Penolakan Cek/BG di Riau



Sumber : Bank Indonesia Pekanbaru

Bab 6

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

DAERAH

1. Kondisi Umum

Perkembangan ketenagakerjaan dalam triwulan laporan menunjukkan hal yang cukup memprihatinkan. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam triwulan laporan tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya hingga mencapai 2.452 jiwa. Sementara itu, kondisi kesejahteraan di tingkat petani pada bulan Agustus 2009 menunjukkan kenaikan (0,76%) dibandingkan dengan periode sebelumnya meskipun secara *year-on-year* masih menurun (4,76%). Inflasi yang terjadi pada komoditas sayuran serta buah-buahan menjadi salah satu pendorong meningkatnya tingkat pendapatan petani dalam triwulan laporan.

2. Ketenagakerjaan

Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Riau sampai dengan September 2009 mencapai 2.452 jiwa (Tabel 6.1) masih cukup tinggi, meskipun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka PHK yang terjadi pada tahun 2008 yang tercatat sebesar 2.765 jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya kegiatan usaha di sub sektor kehutanan terutama terkait dengan terbatasnya pasokan kayu serta belum membaiknya permintaan ekspor kertas sehingga mengakibatkan sejumlah industri kertas melakukan efisiensi.

Dalam triwulan laporan, angka PHK yang dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Riau mencapai 1.963 jiwa.⁴ Menurut wilayah Kabupaten/Kota, jumlah PHK di wilayah kota Pekanbaru masih mengalami angka PHK tertinggi yaitu sebesar 300 jiwa. Tingkat PHK pada tahun 2009 ini cukup tinggi mengingat sampai dengan Desember 2008 jumlah PHK di kedua wilayah tersebut hanya mencapai 1.932 jiwa dan 360 jiwa.

Tabel 6.1. Perkembangan Jumlah PHK yang Dilaporkan Kepada Pemerintah Provinsi/Daerah Tingkat II Provinsi Riau Tahun 2006-2009

No	Wilayah	Periode			
		2006	2007	2008	2009*
1	Provinsi Riau	938	38	1.932	1.963
2	Kampar	87	9	81	20
3	Pelalawan	12	20	18	18
4	Kuantan Singingi	12	20	1	20
5	Pekanbaru	48	30	360	300
6	Rokan Hulu	3	5	36	2
7	Rokan Hilir	12	2	3	5
8	Indragiri Hilir	16	0	12	46
9	Indragiri Hulu	16	12	81	12
10	Siak	27	46	73	32
11	Bengkalis	48	32	96	17
12	Dumai	21	17	72	17
Jumlah		1.240	231	2.765	2.452

* Sampai dengan September

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

⁴ Angka PHK di tingkat provinsi tercatat cukup tinggi dikarenakan berkas perkara PHK secara langsung ditangani oleh pihak Pemprov.

Sementara itu, jumlah perusahaan⁵ yang melapor melakukan PHK sampai dengan September 2009 juga terlihat masih cukup tinggi yaitu sebesar 175 (Tabel 6.2), relatif tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 250. Sebagian besar perusahaan yang melakukan PHK berada di wilayah Kota Pekanbaru (77 perusahaan). Memburuknya kinerja sektor perdagangan diimplikasikan menjadi salah satu pengaruh utama banyaknya perusahaan yang melakukan perumahan karyawan di Kota Pekanbaru.⁶

Tabel 6.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan yang Melakukan PHK yang Melapor Kepada Pemerintah Provinsi/Daerah Tingkat II Provinsi Riau Tahun 2006-2009

No	Kabupaten/Kota	Periode			
		2006	2007	2008	2009*
1	Provinsi Riau	30	23	18	27
2	Kampar	12	9	6	6
3	Pelalawan	3	6	18	18
4	Kuantan Singingi	7	8	1	8
5	Pekanbaru	12	8	77	77
6	Rokan Hulu	3	5	12	2
7	Rokan Hilir	5	2	3	5
8	Indragiri Hulu	7	7	18	7
9	Siak	8	11	39	11
10	Bengkalis	12	10	47	10
11	Dumai	5	4	11	4
Jumlah		104	93	250	175

* Sampai dengan September

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

3. Nilai Tukar Petani

Tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) disajikan pada pada Tabel 6.4⁷. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa NTP bulan Agustus 2009 tercatat sebesar 99,75 atau meningkat 0,76% dibandingkan dengan bulan Juli 2009. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan, sebesar 4,06%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

⁵ Laporan perusahaan di Kab. Indragiri Hilir belum masuk.

⁶ Berdasarkan data BPS Provinsi Riau, laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru didominasi oleh sektor perdagangan dengan sumbangan sekitar 30%. Disamping itu, share PDRB sektor perdagangan terbesar berada di wilayah Kota Pekanbaru dibandingkan Kab./Kota lainnya.

⁷ NTP diukur berdasarkan perbandingan Indeks Harga yang Diterima (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar (Ib).

Penurunan ini terjadi akibat menurunnya penerimaan petani yang tercermin dari lebih rendahnya kenaikan Indeks Harga yang diterima Petani (It) dibandingkan dengan Indeks Harga yang Dibayar (Ib). Pada bulan Agustus 2009, diketahui bahwa pertumbuhan (y-o-y,%) It tercatat menurun sebesar 2,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas di tingkat petani sampai dengan triwulan III-2009 belum kembali kepada titik keseimbangan semula (triwulan III-2008).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6.3, kecenderungan pergerakan harga rata-rata beberapa komoditas utama dalam triwulan laporan masih menunjukkan penurunan secara *year-on-year*. Harga rata-rata komoditas perkebunan seperti CPO dan karet tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,19% dan 38,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan harga komoditas bahan makanan seperti beras dan jagung tercatat turun masing-masing sebesar 18,63% dan 20,78% dibandingkan triwulan III-2008.

Tabel 6.3. Perkembangan Beberapa Harga Rata-Rata Komoditas Internasional Tahun 2008-2009

Tahun	Triwulan	Karet (USD/kg)	CPO (USD/metric ton)	Jagung (USD/bushel)	Harga Kedelai (USD/bushel)	Harga Terigu (USD/bushel)	Harga Beras (USD/metric ton)
2008	I	285.23	1,077.91	4.84	12.77	10.17	396.55
	II	317.88	1,095.81	5.90	13.59	8.29	696.45
	III	328.94	836.97	5.34	13.16	7.48	614.15
	IV	220.59	454.68	3.46	8.65	4.70	547.21
2009	I	170.20	530.78	3.54	9.37	5.30	504.05
	II	178.67	718.26	3.87	11.24	5.63	490.26
	III	201.83	642.84	3.16	10.47	4.41	499.71

Sumber : Bloomberg

Sementara itu, pada Tabel 6.3 juga terlihat bahwa secara pergerakan harga CPO dalam triwulan laporan relatif menurun sehingga mengakibatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, petani di sektor perkebunan relatif tertolong dengan naiknya harga bahan olahan karet (Bokar) seiring dengan harga karet alami yang mengalami

kenaikan dari USD178,67/Kg (triwulan II-2009) menjadi USD201.83/Kg (triwulan III-2009) di pasar internasional.⁸

Tabel 6.4. Perkembangan Komponen Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Rincian	Periode			Pertumbuhan (%)	
	Ags '08	Jul '09	Ags '09	m-t-m	y-o-y
Indeks Harga Diterima	118,76	114,39	115,48	0,95	-2,76
Indeks Harga Dibayar	114,21	115,54	115,77	0,20	1,37
<i>Konsumsi Rumah Tangga</i>	111,74	112,69	112,96	0,24	1,09
Bahan Makanan	114,76	115,01	115,6	0,51	0,73
Makanan Jadi	104,99	110,74	110,74	0,00	5,48
Perumahan	112,28	108,21	108,16	-0,05	-3,67
Sandang	112,14	119,41	119,48	0,06	6,55
Kesehatan	109,04	115,73	115,73	0,00	6,14
Pendidikan, rekreasi & olahraga	103,16	106,45	106,45	0,00	3,19
Transportasi & komunikasi	117,24	106,74	106,74	0,00	-8,96
<i>Biaya Produksi & Penambahan Barang</i>	121,87	124,46	124,44	-0,02	2,11
Bibit	136,28	137,68	137,92	0,17	1,20
Obat-obatan & pupuk	115,83	117,41	117,05	-0,31	1,05
Sewa lahan, pajak & lainnya	110,8	111,34	111,34	0,00	0,49
Transportasi	129,02	123,97	123,97	0,00	-3,91
Penambahan barang modal	112,83	116,42	116,75	0,28	3,47
Upah buruh tani	112,88	130,38	130,59	0,16	15,69
Nilai Tukar Petani	103,97	99	99,75	0,76	-4,06

Sumber : BPS Provinsi Riau

Secara sektoral, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor di Provinsi Riau pada periode Juli-Agustus 2009 (Grafik 6.1) menunjukkan kecenderungan yang meningkat, kecuali sub sektor perkebunan rakyat dan perikanan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada NTP sub sektor hortikultura dan peternakan. Dalam triwulan laporan, kenaikan NTP sub sektor hortikultura secara triwulanan tercatat sebesar 3,1% (q-t-q) dan sub sektor peternakan sebesar 2,6% (q-t-q).⁹

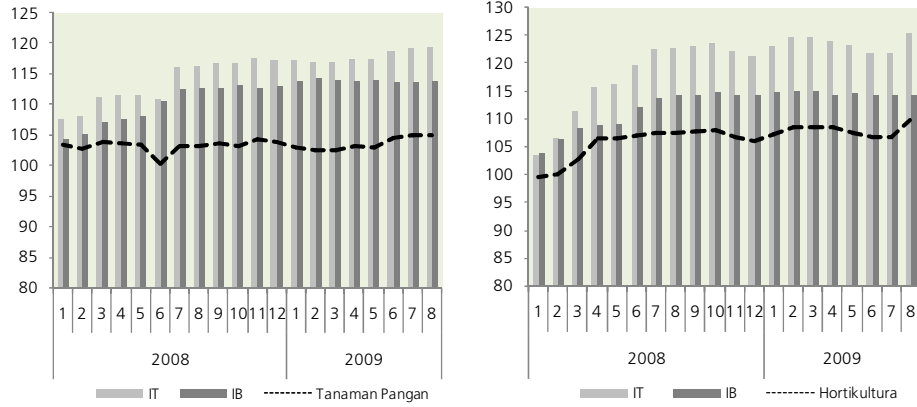
Kondisi ini tidak terlepas dari faktor hari raya idul fitri yang memicu kenaikan permintaan sayuran, buah-buahan dan daging olahan.¹⁰ Sedangkan penurunan NTP sub sektor perkebunan rakyat dan perikanan lebih dikarenakan meningkatnya lb khususnya pada sub indeks konsumsi yang berkisar 0,2-0,3%.

⁸ Harga Tandan Buah Segar (TBS) periode 9-15 September tercatat sebesar Rp1.352,48/Kg atau turun Rp49,9/Kg dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan Harga karet per September berkisar antara Rp14.700-Rp15.000/Kg, lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus yang tercatat sebesar Rp14.500/Kg.

⁹ Pertumbuhan sub sektor lainnya secara quarter-to-quarter yaitu tanaman pangan (0,5%), perkebunan rakyat (-1,4%) dan perikanan (-0,2%).

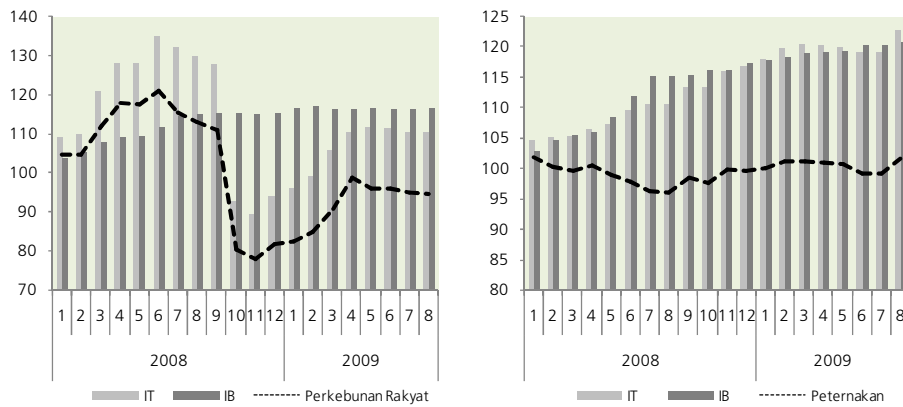
¹⁰ Pada Agustus 2009, indeks komoditi sayuran dan buah-buahan yang mengalami kenaikan (m-t-m) harga cukup tinggi antara lain rambutan dan cabe merah dengan andil masing-masing sebesar 1,27% dan 0,74%. Sedangkan pada indeks komoditas peternakan, kenaikan (m-t-m) cukup tinggi terjadi pada sub indeks komoditas ternak kecil (domba dan kambing) dan ternak besar (sapi) masing-masing sebesar 3,85% dan 2,99%.

Grafik 6.1. Perkembangan NTP Sub Sektor di Provinsi Riau Tahun 2008-2009



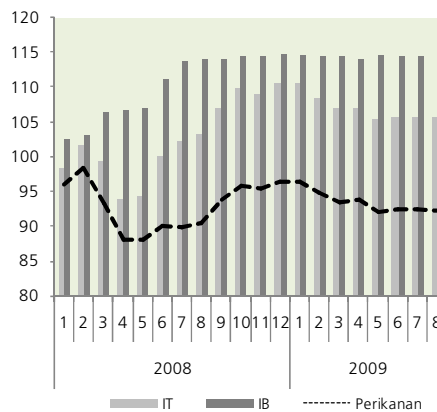
b. Tanaman Pangan

a. Hortikultura



d. Perkebunan Rakyat

c. Peternakan



e. Perikanan

Sumber : BPS Provinsi Riau

Bab 7

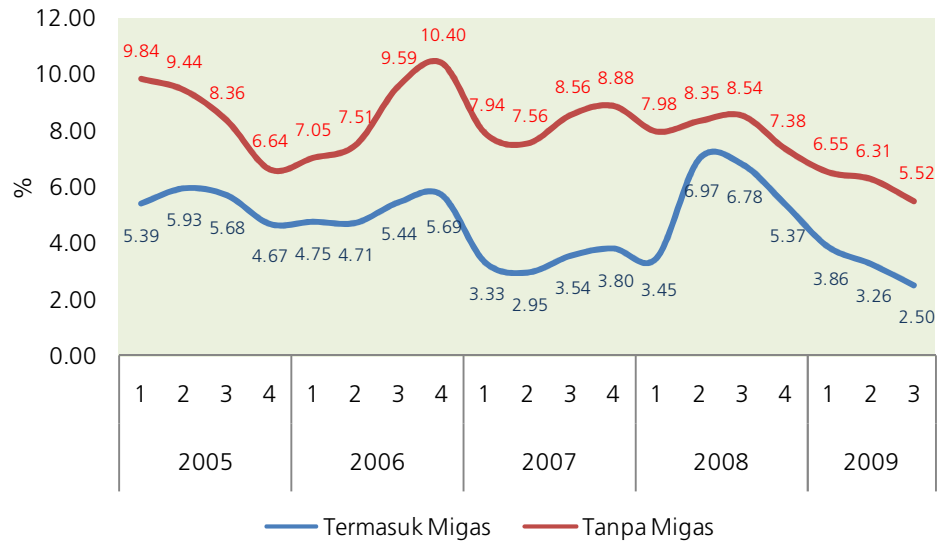
PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

I. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan IV-2009 diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2009 namun masih akan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan IV-2009, pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas diproyeksikan akan berada pada kisaran 2,3% (y-o-y) sampai 2,7% (y-o-y). Sementara, tanpa memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau diproyeksikan akan berada pada kisaran 5,6% (y-o-y) sampai 5,99% (y-o-y).

Grafik 7.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (Y-o-Y) Riau (%)



Beberapa faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah adanya penemuan ladang minyak baru di Kab. Indragiri Hulu yang dapat meningkatkan produksi minyak bumi Provinsi Riau serta adanya fase pemulihan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan komoditas ekspor non migas yang memberikan pengaruh besar seperti *Crude Palm Oil* dan karet. Sejalan dengan hasil survei liaison, sejumlah perusahaan merasa cukup optimis akan terjadi kenaikan permintaan ekspor komoditas non migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Disamping itu, upaya peningkatan produktivitas di sektor perkebunan yang tercermin dari adanya persetujuan investasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru¹¹ diindikasikan akan mendorong pertumbuhan sub sektor industri pengolahan non migas yang tercatat memiliki porsi terbesar dalam sektor industri. Di sisi lain, adanya tren kenaikan produksi batubara Provinsi Riau serta upaya pemulihan pada sektor kelistrikan dikarenakan adanya tambahan dari relokasi PLTD 8 MW pada akhir November 2009 dapat meningkatkan rasio elektrifikasi listrik Provinsi Riau, sehingga diimplikasikan akan turut memberikan kepercayaan bagi dunia usaha dan dapat mendorong pertumbuhan di sektor perdagangan. Adanya

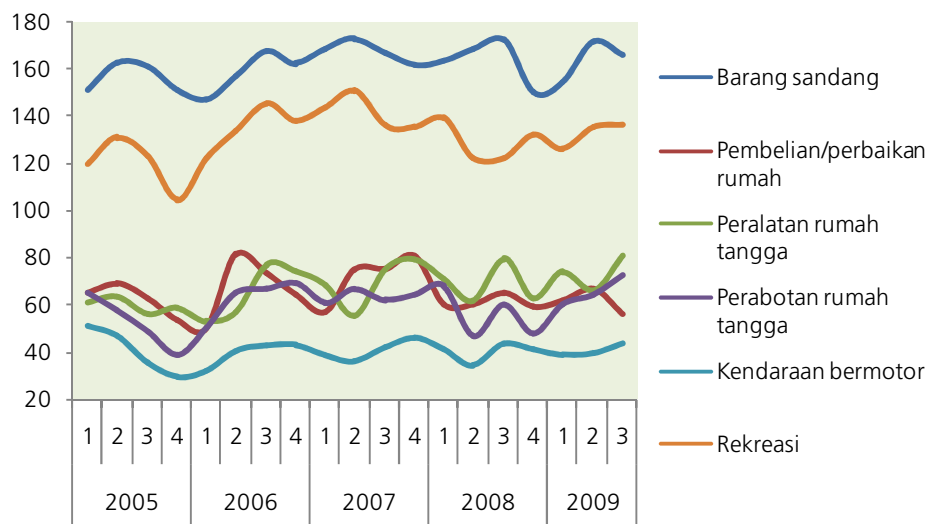
¹¹ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BKPM, diketahui terdapat persetujuan investasi baru di sektor industri pengolahan khususnya pembangunan pabrik pengolahan CPO dan pembangunan pabrik kelapa sawit di Kota Dumai dan Kab. Indragiri Hilir.

hari besar keagamaan Natal yang jatuh pada bulan Desember 2009 diindikasikan akan mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

Sementara itu, penyerapan anggaran belanja APBD yang diperkirakan cukup besar pada triwulan IV-2009 diindikasikan akan menjadi pemicu meningkatnya konsumsi pemerintah, sehingga kondisi ini diperkirakan akan memberikan momentum yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV-2009 yang akan datang.

Secara umum, berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru, konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan untuk 6-12 bulan yang akan datang. Peningkatan optimisme ini terjadi pada semua komponen ekspektasi konsumsi yang disurvei kecuali ekspektasi akan konsumsi terhadap barang sandang serta perbaikan rumah. Adanya indikasi peningkatan konsumsi barang tahan lama (*durable goods*) seperti peralatan rumah tangga, perabotan dan kendaraan bermotor pada triwulan IV-2009 yang akan datang mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat cukup yakin terhadap kondisi ekonomi kedepan sehingga seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dunia pada triwulan III-2009.

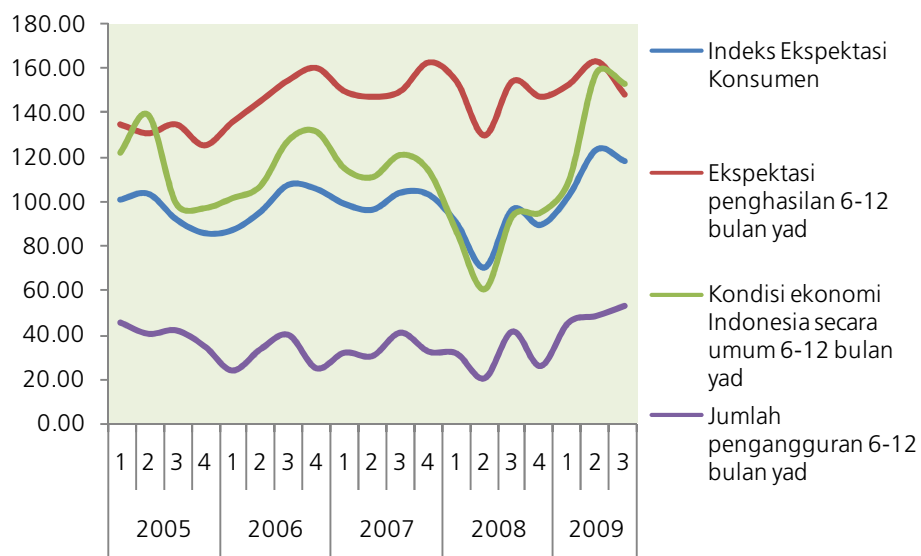
Grafik 7.2. Indeks Rencana Konsumsi Konsumen



Sumber : Survey Ekpektasi Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru, diolah

Selain itu, keyakinan masyarakat terhadap usaha pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran juga mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dorongan terhadap meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Riau ke depan yang berada dalam level optimis. Sementara, dari hasil survei juga diketahui bahwa sebagian besar konsumen optimis bahwa penghasilannya akan meningkat seiring dengan iklim usaha dan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Grafik 7.3. Indeks Ekspektasi Konsumen



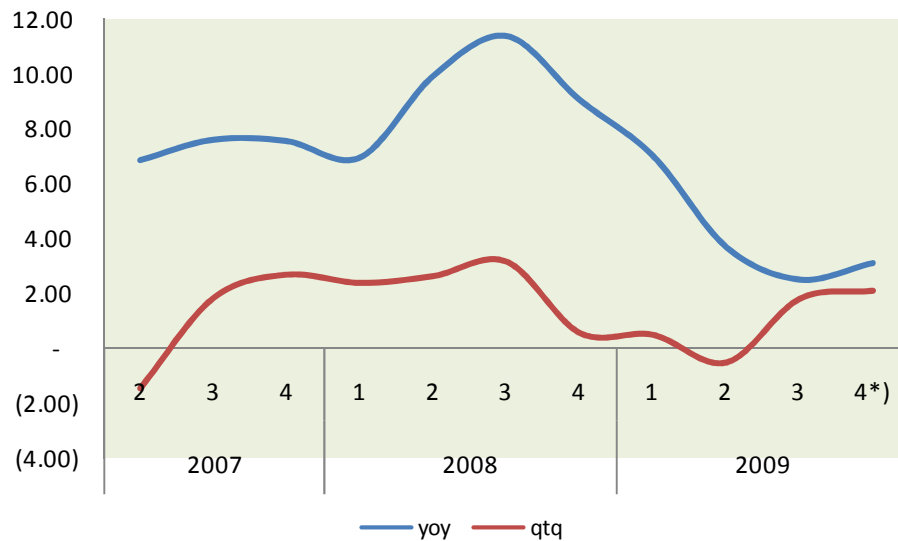
Sumber : Survey Ekpektasi Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru, diolah

II. Inflasi

Laju inflasi pada triwulan IV-2009 (q-t-q) diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2009. Indikator utama yang mendukung perkiraan tersebut adalah terkait dengan adanya perayaan hari besar keagamaan Natal, penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran dan kecenderungan pemulihan ekonomi global yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di Riau khususnya Pekanbaru terutama terhadap kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang dan transportasi. Secara bulanan, inflasi tertinggi diperkirakan akan terjadi pada bulan Desember 2009, terutama pada kelompok bahan makanan, perumahan dan sandang.

Secara umum, pada triwulan IV-2009 (q-t-q) inflasi Kota Pekanbaru akan berada pada kisaran 1,5% - 2,3%, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi. Sementara itu, secara tahunan (y-o-y) inflasi Kota Pekanbaru masih akan terus mengalami perlambatan, yaitu akan berada pada kisaran 3,1% - 3,9%.

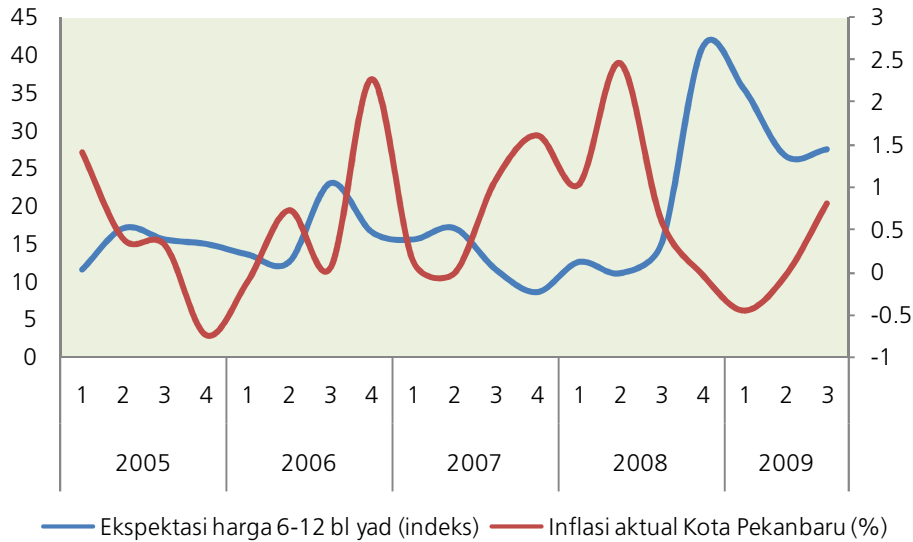
Grafik 7.4. Proyeksi Inflasi Tahunan (Y-o-Y) dan Triwulanan (Q-t-Q) Kota Pekanbaru



*) angka perkiraan

Berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru, secara umum masyarakat yakin bahwa akan terjadi peningkatan harga, terutama pada kelompok makanan, sandang, perumahan, bahan bangunan dan transportasi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin pesimisnya masyarakat akan tingkat harga di Pekanbaru. Kondisi ini diperkirakan seiring dengan perayaan Natal dan penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran.

Grafik 7.5. Indeks Ekspektasi Harga dan Laju Inflasi Aktual



Sumber : Survey Ekpektasi Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru, diolah

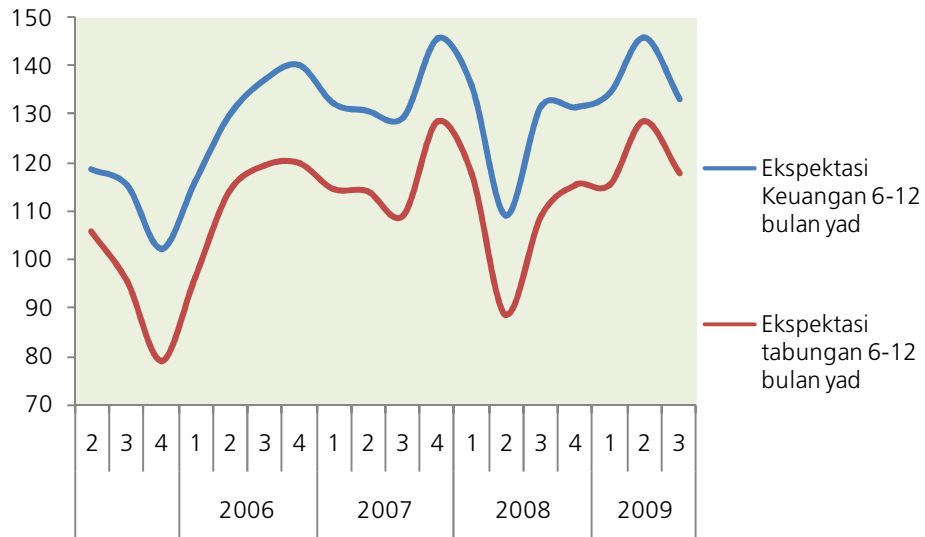
III. Perbankan

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit pada triwulan IV-2009 diperkirakan masih akan mengalami peningkatan, dibandingkan triwulan II-2009, sebagai pengaruh dari *trend* penurunan BI-Rate. Disamping itu, laju pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama Provinsi Riau diperkirakan akan memberikan kepercayaan kepada bank dalam menyalurkan dananya kepada pelaku usaha yang dalam beberapa periode terakhir bersifat *wait and see*.

Sementara itu, penghimpunan DPK diperkirakan juga akan mengalami perlambatan, terutama pada komponen giro dan deposito sejalan dengan peningkatan pemanfaatan dana milik Pemda untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur pada triwulan yang akan datang.

Namun demikian, khususnya untuk komponen tabungan diperkirakan akan mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru diperkirakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih cukup tinggi yang ditunjukkan oleh ekspektasi tabungan 6-12 bulan yang akan datang yang masih berada pada level optimis. Artinya, penempatan dana masyarakat di tabungan akan mengalami peningkatan.

Grafik 7.6. Ekspektasi Konsumen Terhadap Tabungan



Sumber : Survey Ekpektasi Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru, diolah

Peranan perbankan dalam mendukung pemberdayaan sektor riil dan UMKM, diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini seiring dengan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru antara lain (1) mengoptimalkan peran KKMB, (2) meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan, (3) melakukan pemetaan UMKM di Provinsi Riau melalui penelitian BLS (4) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan perbankan untuk mendorong realisasi Program Revitalisasi Perkebunan, dan (5) Menghimbau dan mendorong perbankan untuk dapat merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).